

Windy Triana, Citra Dwikasari, Haula Noor, Dedy Ibmar,
Savran Billahi, Narila Mutia Nasir, Aptiani Nur Jannah,
Grace Sandra Pramesty Rachmunda

MENJAGA MARWAH PESANTREN

REFLEKSI PENELITIAN KEKERASAN SEKSUAL
DI PESANTREN



A-Empat bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat
2025

MENJAGA MARWAH PESANTREN

Refleksi Penelitian Kekerasan
Seksual di Pesantren



MENJAGA MARWAH PESANTREN
Refleksi Penelitian Kekerasan Seksual di Pesantren
© 2025
All Rights Reserved

Penulis:

Windy Triana, Citra Dwikasari, Haula Noor, Dedy Ibmar, Savran Billah, Narila Mutia Nasir, Aptiani Nur Jannah, Grace Sandra Pramesty Rachmunda

Editor Bahasa:

Arief Subhan

Desain Sampul dan Tata Letak:

Oryza Rizqullah

Cetakan I:

Juni 2025

ISBN:

978-623-8552-37-5

Ukuran:

15,5x23 cm

Halaman:

x+128

Diterbitkan oleh: A-empat bekerja sama dengan PPIM UIN Jakarta

Gedung Kampus 2 UIN Jakarta, Jalan Kertamukti No. 5, Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Tentang Hak Cipta

- 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf I untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang dengan tanpa hak/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

***Buku ini didedikasikan kepada semua pihak
yang ikut terlibat dalam keberhasilan penelitian
besar ini. Buku ini merupakan sisi lain yang tidak
tersampaikan pada buku Menuju Pesantren
Ramah Anak: Pemetaan Ketahanan dan
Kerentanan Santri terhadap Kekerasan***



APA KATA MEREKA?



Tim penulis menghadirkan perspektif mendalam sebagai kontribusi terhadap pengembangan pembelajaran dan refleksi mengenai riset yang melibatkan anak, serta dinamika ketahanan, kekuatan, dan kerentanan sistem pendidikan pesantren di Indonesia. Karya ini tidak hanya memperkaya kapasitas pembaca untuk melaksanakan penelitian yang beretika, tetapi juga mendorong lahirnya kajian lain yang relevan dan kontekstual. Lebih jauh, buku ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya advokasi dalam membangun ekosistem pesantren yang mengedepankan hak-hak anak di Indonesia

Ni Luh Putu Maitra Agastya

(Direktur PUSKAPA UI)

Pesantren sebagai institusi pendidikan tertua di Indonesia

menghadapi berbagai tantangan, termasuk menjaga kearifan para kiai dan bu nyai sebagai pemimpin, pengasuh, pendidik, dan pengayom.

Di zaman yang cenderung berorientasi pada kekuasaan, alih-alih menjadi pemimpin yang mengayomi, kiai dan bu nyai dapat terjebak pada relasi kuasa yang manipulatif.

Buku ini mengungkap konteks situasi kekerasan di pesantren

melalui storytelling yang apik. Walaupun jumlah kasus masih relatif kecil dalam angka statistik dibandingkan dengan 36 ribu pesantren dan 4 juta santri yang bermukim, perubahan harus segera dilakukan agar pesantren terus menjalankan fungsi luhurnya sebagai institusi pendidikan berbasis agama.

Semoga buku ini dapat berkontribusi mendorong transformasi tersebut.

Alissa Wahid

(Ketua Tanfidziyah PBNU,
Direktur Gusdurian Network
Indonesia)

Sebagai alumni pesantren, saya memahami betul bahwa materi penelitian ini sangat sensitif, dan karenanya tidak mudah untuk mendapatkan data yang benar. Tapi, seperti

yang ditulis oleh ketua tim peneliti, penelitian ini tidak bermaksud untuk membuka aib pesantren dan mengobok-obok isi perut pesantren. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan perbaikan sistem pengasuhan pesantren, sehingga orang tua dapat menitipkan pendidikan anak-anaknya di pesantren dengan tenang. Pesantren menjadi ajang pendidikan anak-anak yang aman dan nyaman, mendidik santri dengan penuh empati sehingga santri-santriwati menyimpan kenangan yang indah ketika keluar dari pesantren. Buku ini menceritakan berbagai kisah bagaimana para peneliti menggali data dari pesantren. Alur cerita enak untuk dibaca dan reflektif. Selamat kepada seluruh tim peneliti, dan PPIM!

Selamat membaca!

Din Wahid

(Wakil Rektor Bidang
Kerjasama dan Kelembagaan,
UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta)

KATA PENGANTAR

Apakah mudah menggali data tentang kekerasan seksual di pesantren? Jelas tidak mudah. Tapi ternyata tim peneliti PPIM berhasil menyelesaiannya dengan sangat baik. Mengapa?

Nah di buku ini para peneliti menceriterakan bagaimana mengatasi kendala-kendala penelitiannya. Yang jelas sebagian besar peneliti PPIM adalah alumni pesantren sekaligus berpengalaman dalam penelitian. Sebagai alumni pesantren, para peneliti memahami keadaan dan budaya pesantren, seperti konsep takzim dan bagaimana hubungan santri dengan kiai/ustadz. Sementara itu, sebagai peneliti yang berpengalaman, mereka sudah terbiasa menghadapi bagaimana mendapatkan data.

Ada faktor lain yang ikut membuat penelitian terlaksana dengan baik, yaitu dukungan kuat keluarga dan para alumni pesantren. Selain akademisi dan peneliti, banyak keluarga dan para alumni pesantren kini menjadi pimpinan di kementerian/lembaga, legislatif, organisasi kemasyarakatan Islam, dan media. Mereka termasuk di antara pegiat advokasi kesetaraan gender, HAM, dan perlindungan anak dan sangat prihatin dengan kasus-kasus kekerasan seksual di beberapa pesantren. Para alumni tersebut ikut terlibat aktif memperjuangkan pesantren menjadi tempat aman bagi anak-anak untuk tumbuh.

Pesantren sendiri sejak tahun 2019 *de jure* telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, banyak peraturan perundungan, seperti Undang-undang tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Menteri Agama tentang Pencegahan Kekerasan Seksual, menuntut pesantren memenuhi hak-hak anak dan

melindungi anak dari kekerasan termasuk kekerasan seksual. Apalagi sekarang menjadi pilihan bagi sebagian anak dari kalangan menengah, terpelajar, dan perkotaan, pesantren tentu semakin dituntut memenuhi aspirasi masyarakat luas.

PPIM mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peneliti yang telah bekerja keras menyelesaikan penelitian dan menerbitkannya. Juga kepada Direktorat Pesantren Kementrian Agama, Kementrian Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementrian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang terus mendukung kegiatan. Kemudian kepada Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia yang telah memperkenalkan etika dan strategi penelitian tentang anak. Terakhir PPIM berterima kasih kepada Sekretariat INKLUSI yang telah mendukung kegiatan penelitian.

Didin Syafruddin, Ph.D.

Direktur Eksekutif

PPIM UIN Jakarta

PENGANTAR EDITOR BAHASA

AFTER THE FACT: REFLEKSI

SANTRI PENELITI PESANTREN

Penelitian tentang pesantren di Indonesia sudah banyak dilakukan. Sebagai lembaga pendidikan tradisional khas Indonesia, pesantren telah menarik minat banyak sarjana, baik dari Indonesia maupun luar negeri, untuk melihatnya dari banyak sudut pandang. Dari sudut kelembagaan dan asal-usulnya, dari sudut sistem dan metode pembelajaran, dari sudut kiai sebagai pemimpinnya, dan dari sudut modernisasi yang terjadi, serta interaksinya dengan sistem pendidikan modern yang ditawarkan negara. Sejalan dengan itu, pesantren telah mengalami modernisasi dan beradaptasi dengan sistem pendidikan modern. Negara sendiri pada 2019 merekognisi pesantren dengan memberikan dasar legal sebagai satuan pendidikan melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Posisi pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional telah menjadikan lembaga ini mengalami perkembangan pesat dari segi kualitas dan kuantitas—serta penyebarannya di seluruh Indonesia. Beberapa pesantren lahir, dengan bentuk dan tawaran sistem pembelajaran modern, dengan tetap mempertahankan identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam. Akan tetapi, sejalan dengan pesatnya perkembangan itu, beberapa kasus mulai muncul. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa santri dan beredar melalui media massa telah menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan tidak seolah-olah tidak ramah terhadap anak. Ini menimbulkan dorongan untuk bertanya: apakah pesantren merupakan lembaga pendidikan yang ramah anak atau sebaliknya?

Penelitian tentang pesantren dari sudut lingkungan pendidikan yang ramah terhadap anak termasuk tidak banyak dilakukan. Sehingga menjadi signifikan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Hasil penelitian dilaporkan menjadi dua bagian. Pertama, diberi judul “Menuju Pesantren Ramah Anak”. Ini merupakan hasil pengolahan data lapangan, dilengkapi dengan teori dan diskusi, yang mendeskripsikan realitas pendidikan yang berlangsung di pesanten. Kedua, “Menjaga Marwah Pesantren” yang berisi cerita di balik penemuan data lapangan yang dilakukan para peneliti—oleh karena itu dapat disebut sebagai *after the fact* karena dituliskan dalam bentuk refleksi peneliti setelah pengambilan data. Penting disampaikan bahwa sebagian besar peneliti adalah alumni pesantren, yang selama tetap menjaga keterikatan dengan pesantren tempat mereka belajar. Refleksi ini menjadi penting karena di sana ada pergulatan emosional peneliti dengan fakta baru tentang pesantren yang mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Selama ini peneliti merasakan pesantren sebagai tempat di mana santri tidak hanya belajar Islam, tetapi juga mendapatkan pendidikan disiplin, taat peraturan—and ini yang seringkali disebutkan—memiliki keterikatan dan ketaatan mutlak kepada kiai yang menjadi gurunya. Keterikatan dan ketaatan itu terus berlangsung, bahkan ketika santri telah menjadi alumni.

Refleksi peneliti, yang dituliskan dalam analogi ini, kiranya dapat menjadi informasi yang berguna untuk menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menjaga marwah pesantren dan menjaga keberlanjutannya sebagai lembaga pendidikan yang ramah anak.

Dr. Arief Subhan, M.Ag.
Peneliti PPIM UIN Jakarta
Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN — 1

Windy Triana

BAGIAN 1 RISET SENSITIF DI PESANTREN — 10

- 1 Bayang Otoritas, Independensi, dan Produksi Ilmu Pengetahuan — 11

Windy Triana

- 2 Menavigasi Proses yang Berliku — 24

Citra Dwikasari

BAGIAN 2 RUANG DAN INTERAKSI DI PESANTREN — 38

- 3 Antara Memiliki dan Membebaskan Diri: Refleksi Sarjana Santri — 39

Haula Noor

- 4 Interaksi yang Meninggalkan Jejak — 53

Dedy Ibmar

- 5 Stigma dan Cerita di Bilik Pesantren — 67

Savran Billahi

BAGIAN 3 EMOSI DAN ETIKA — 82

- 6 Terasa Tapi Tak Terucapkan: Kisah Pubertas di Pesantren — 83

Narila Mutia Nasir

- 7 Meruntuhkan Kepolosan, Meneguhkan Ketahanan — 96

Aptiani Nur Jannah

- 8 Trauma yang Menyelinap: Refleksi Emosi Peneliti — 114

Grace Sandra Pramesty Rachmada

PENUTUP — 124

Windy Triana

BIOGRAFI PENULIS — 126

PENDAHULUAN

 Windy Triana

“Hati-hati, ini isu sensitif!”

Kalimat ini yang terus menerus terucap dan ada di benak kami, para peneliti. Meneliti isu kekerasan seksual saja sudah sangat sensitif. Apalagi ketika menjadikan anak dan pesantren sebagai objek penelitian. Keraguan dan kekhawatiran seringkali muncul dalam proses penelitian ini, meski kemudian dapat diatasi dengan keyakinan bahwa yang kami lakukan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Isu kekerasan seksual di pesantren mulai menjadi perhatian masyarakat ketika kasus-kasus marak diangkat di media sejak 2022. Kemunculannya satu persatu dilihat sebagai fenomena gunung es dari isu kekerasan di lembaga berbasis agama. Tidak dapat dipungkiri, isu ini memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Sama sekali tidak terbersit dalam diri kami bahwa kami ingin “menjelek-jelekan”, menyudutkan, atau melakukan hal-hal yang merugikan pesantren. Mayoritas dari kami adalah lulusan pesantren, yang justru memiliki kecintaan dan kedulian terhadap institusi di mana kami tumbuh dan jati diri kami terbentuk. Dari sinilah kami termotivasi untuk mengungkap apa yang sebetulnya terjadi secara lebih objektif dengan menggunakan kemampuan kami sebagai akademisi dan peneliti. Dengan begitu, kami dapat berkontribusi dalam pengembangan kebijakan berbasis bukti; demi terwujudnya pendidikan yang ramah anak di pesantren.

Tulisan ini merupakan refleksi dari pengalaman kami selama kurang lebih dua tahun dalam menggarap penelitian

Bab-bab dalam buku ini merupakan refleksi dari pengalaman setiap individu dalam melakukan penelitian di institusi keagamaan dengan isu yang tidak biasa, bahkan penuh tantangan.

kekerasan seksual di pesantren. Kami merasa apa yang ada di balik layar pada proses penelitian ini terlalu berharga untuk diabaikan, dilupakan, dan tidak diceritakan. Tulisan tentang pengalaman balik layar dalam perjalanan penelitian dan aktivitas ilmiah lain mungkin hal yang cukup biasa. Sebut saja tulisan Alison L. Black, dkk. (2023) yang menyajikan pengalaman akademisi perempuan dalam menjalani peran sebagai akademisi dan peran keperempuanan, seperti ibu, istri, dan bahkan perempuan lajang. Selain itu, penelitian tentang pesantren juga sudah banyak yang melakukan. Namun, belum ada satu pun tulisan yang menyajikan bagaimana penelitian terhadap pesantren dilakukan dengan menembus batas “ketabuan” memasuki isu sensitif, seperti kekerasan seksual.

Bab-bab dalam buku ini merupakan refleksi dari pengalaman setiap individu dalam melakukan penelitian di institusi keagamaan dengan isu yang tidak biasa, dan penuh tantangan. Bahkan, pada tahap awal kajian pustaka (*literature review*), kami sempat mengalami kesulitan dalam menemukan studi-studi terkait kekerasan seksual yang melibatkan institusi keagamaan. Beberapa studi yang kami temukan bahkan secara eksplisit menjelaskan betapa sulitnya menjangkau topik ini. Kecenderungan untuk menjaga privasi institusi dan rasa hormat masyarakat terhadap lembaga tersebut membuat penelitian semacam ini menjadi sangat kompleks dan tidak mudah dilakukan.

Dengan latar belakang peneliti yang alumni pesantren dan relasi PPIM UIN Jakarta yang cukup dekat dengan pesantren, penelitian ini menjadi mungkin, walaupun tidak semudah yang dibayangkan. Penelitian ini dilakukan di 90 pesantren yang tersebar di 90 kabupaten/kota di 34 provinsi. Di beberapa lokasi, akses masuk ke pesantren tetap menjadi kendala. Belum lagi, mayoritas peneliti tidak memiliki pengalaman untuk melakukan penelitian terhadap anak, apalagi untuk isu sensitif.

Kami harus mengakui bahwa kami banyak belajar dari kawan-kawan kami di Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA), Universitas Indonesia, tentang bagaimana penelitian terhadap anak harus dilakukan. Ada pendekatan yang berbeda dan etika tertentu yang harus dijunjung tinggi serta kapasitas yang harus dimiliki seorang peneliti. Dalam proses mendesain penelitian, kami betul-betul membaca lembar demi lembar “Buku Pegangan Partisipasi Anak dalam Penelitian di Indonesia,” yang disusun oleh kawan-kawan di PUSKAPA. Selain itu, kami juga menjadi pendengar dan penyimak yang baik saat instrumen penelitian kami dikritisi dan diberi masukan oleh kawan PUSKAPA, Hendro Prasetyo sebagai ahli statistik, dan Iklilah Muzayyanah sebagai *gender specialist*. Belum lagi, ada kawan-kawan dari sekretariat INKLUSI yang selalu mengingatkan kami akan *Child Protection Protocols* (Protokol Perlindungan Anak) dan *GEDSI* (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*—Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) yang harus dijunjung tinggi. Jelas, kami banyak belajar dan ini menjadi pengalaman yang sangat berharga.

Selama masa penyusunan desain dan instrumen penelitian, kami juga mendapatkan masukan dari para peneliti senior PPIM UIN Jakarta. Apresiasi kami kepada Didin Syafruddin, Fuad Jabali, Hamid Nasuhi, Idris Thaha, Ilim Halimatussa'diyah, Ismatu Ropi, Jamhari Makruf, Saiful

Umam, Testriono, dan Yunita Faela Nisa. Ungkapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Arief Subhan, Lilik HS, dan Oman Fathurahman atas penyuntingan yang cermat terhadap tulisan-tulisan kami, demi memastikan kejelasan isi dan kepekaan makna dalam setiap tulisan yang dihasilkan.

Hal penting yang menjadi pegangan dalam penelitian kami adalah prinsip GEDSI. Melalui prinsip ini, kami berupaya untuk tidak melupakan dan mengabaikan kelompok rentan dan terpinggirkan. Kami meyakini bahwa semua suara perlu didengar; setiap pengalaman adalah berharga. *No one left behind!* Kami meyakini bahwa setiap orang memiliki pengalaman yang unik, terlebih bagi mereka yang dianugerahi dengan perbedaan, baik itu gender, disabilitas, latar belakang etnis, atau identitas sosial lainnya.

Harus juga diakui bahwa kepekaan semacam ini perlu diasah, dan tidak juga sederhana. Apresiasi kami terhadap Endah Trista Agustiana yang selalu mendampingi kami, mengingatkan, dan memberi nasihat terkait GEDSI. Kepekaan terhadap GEDSI, menjadikan kami berpikir berulang kali dalam setiap pembuatan keputusan. Tidak lupa, Paskal Kleden dan Virlan Nurkristi dari INKLUSI yang selalu mengawal dan membersamai setiap proses penelitian yang kami lakukan.

Prinsip GEDSI yang kami terapkan pada survei nasional, memastikan bahwa enumerator yang kami pilih, berpasangan untuk setiap wilayahnya. Ini menjadi strategi kami agar responden anak merasa nyaman mendiskusikan isu sensitif dengan lawan bicara dari jenis kelamin yang sama. Pada penelitian kualitatif, kami memilih asisten peneliti dengan jenis kelamin yang berbeda dengan setiap peneliti utama. Kami mengantisipasi kemungkinan ketidaknyamanan saat wawancara dilakukan oleh lawan jenis. Apalagi yang kami hadapi adalah anak-anak.

Kami juga menyadari bahwa menggali isu sesensitif kekerasan seksual akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Salah satu yang kami cemaskan adalah kemungkinan bahwa kami memicu trauma dengan pertanyaan-pertanyaan kami kepada santri. Kenyataannya, trauma bukan saja bisa terjadi pada orang yang diwawancara dan mengalami insiden yang tidak diinginkan, tetapi juga orang yang mendengar cerita tersebut. Inilah yang disebut dengan *secondary trauma* yang mungkin terjadi kepada peneliti.

Kami tidak diam!

Mengingat prinsip GEDSI dan *Child Protection Protocol* yang kami pegang, tim memutuskan untuk membekali setiap peneliti, baik peneliti utama, enumerator, maupun asisten peneliti dengan *Psychological First Aid*. Dua sesi workshop menjadi bekal kami menghadapi kemungkinan yang terjadi di lapangan. Pada kenyataannya, beberapa peneliti mengalami *secondary trauma*. Bahkan saya, sebagai koordinator penelitian, mengalami secara langsung gejala *secondary trauma* berupa kecemasan dan serangan panik ketika membaca hasil penelitian.

Bab-bab dalam buku ini betul-betul merupakan refleksi dari setiap individu peneliti yang difokuskan pada aspek-aspek tertentu yang menurut kami menarik untuk diungkap. Setiap bab mencerminkan berbagai isu yang jarang diceritakan dalam berbagai buku tentang hasil penelitian. Buku ini menunjukkan bahwa proses penelitian tidak selalu mekanik. Proses penelitian dapat mengusik sisi kemanusiaan seorang peneliti; sebagaimana ditunjukkan buku ini.

Kami membagi buku ini menjadi tiga bagian. Bagian pertama menceritakan bagaimana riset yang sensitif dilakukan di pesantren. Bagian ini terdiri dari dua bab. Bab pertama, yang berjudul “Bayang Otoritas, Independensi, dan Produksi Ilmu Pengetahuan” menceritakan tentang independensi

pesantren sebagai salah satu yang kami pertimbangkan dalam penelitian ini. Independensi merupakan karakteristik pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, yang tumbuh dan mengakar di masyarakat. Berbeda dengan sekolah, pesantren tidak didirikan oleh negara, tetapi didirikan oleh masyarakat, biasanya oleh tokoh agama yang disegani. Dengan begitu, melakukan intervensi terhadap pesantren, bukanlah hal yang mudah. Terlebih ketika intervensi dilakukan untuk isu yang sensitif seperti kekerasan maupun kekerasan seksual. Bagian ini menceritakan bagaimana kami merumuskan strategi dengan memanfaatkan karakter independen pesantren sebagai kekuatan untuk dapat bersinergi dengan pemerintah dengan tujuan menciptakan lingkungan pesantren yang ramah bagi anak.

Pada bab 2, Citra Dwikasari memaparkan tantangan yang kami hadapi dalam proses persiapan penelitian ini, termasuk bagaimana membuka akses pesantren dan berkomunikasi dengan berbagai pihak, yang dalam beberapa kesempatan, harus menghadapi banyak kendala. Citra merupakan asisten peneliti yang menjadi “penjaga gawang” bagi para peneliti. Perannya menjadi signifikan setara dengan peran peneliti. Ketangkasan dan kesigapan Citra merespons berbagai masalah telah membantu proses penelitian ini berjalan sesuai dengan rencana dan menjadi lebih mudah dilalui. Sehingga tidak berlebihan jika bab yang ditulis Citra berjudul “Menavigasi Proses yang Berliku”.

Bagian II terdiri dari tiga bab. Pertama, “Antara Memiliki dan Membebaskan Diri: Refleksi Sarjana Santri”, ditulis oleh Haula Noor. Haula merefleksikan dilema yang dihadapi saat masuk ke pesantren sebagai peneliti, dan, di saat yang sama, sebagai “santri” yang sudah berinteraksi dengan dunia luar. Haula melihat nilai ketaatan, yang dulu dijunjung tinggi, menjadi berbeda saat dilihat lebih dekat dan mendalam. Struktur ketaatan ini memiliki dimensi gender dan otoritas

absolut, yang menciptakan ruang bagi relasi kuasa. Haula mempertanyakan bagaimana ketaatan dapat menjadi celah bagi penyalahgunaan otoritas, terutama pada kasus kekerasan seksual. Sehingga, hal ini bukan lagi menjadi isu yang bersifat individual, namun sistemik.

Bab kedua bertajuk “Interaksi yang Meninggalkan Jejak”, ditulis oleh Dedy Ibmar. Dedy mengungkapkan kompleksitas proses penelitian, dan bagaimana interaksi yang terjadi antara peneliti dengan responden meninggalkan kesan dan mengubah cara pandang. Dedy juga berdiskusi tentang bagaimana pendekatan yang lebih manusiawi dibutuhkan dalam penggalian data, seperti bagaimana memperlakukan anak dan orang dewasa dengan cara yang berbeda. Ada dilema etis yang dihadapi oleh peneliti. Selain dilema individu, aspek etika kolektif menjadi pertimbangan sebagai upaya bersama menjaga integritas, menghormati partisipan dan memastikan bahwa penelitian berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan.

Pada bab terakhir bagian ini, Savran Billahi memilih topik “Stigma dan Cerita di Bilik Pesantren”. Dengan kasus-kasus kekerasan seksual di pesantren yang mengemuka, stigma negatif terhadap pesantren menjadi sulit dihindari. Savran mencoba menunjukkan bahwa kerentanan terhadap kekerasan seksual yang terjadi di pesantren, tidak semata-mata karena kurangnya fasilitas di pesantren, tetapi juga ada faktor lain seperti desain ruang, keterhubungan antar bangunan, serta pengawasan alamiah yang memungkinkan kontrol sosial. Meskipun banyak pesantren tidak didukung fasilitas “yang standar”, pesantren tetap menunjukkan ketahanan yang memadai dengan adanya dukungan kemandirian, keterlibatan masyarakat, dan tata kelola ruang yang terbuka. Dengan begitu, daripada tenggelam dalam stigma, bagian ini menunjukkan perlunya pesantren bersama masyarakat membangun dialog, memperbaiki sistem dan membuka diri

untuk menciptakan ruang yang benar-benar aman bagi semua santri.

Selanjutnya, bagian ketiga berjudul “Emosi dan Etika” mengungkap pergulatan peneliti dalam mendekati isu sensitif baik yang berkaitan dengan seksualitas secara umum, maupun kekerasan seksual, dan kesehatan mental. Bagian ini terdiri dari tiga bab. Pertama, bab enam ini ditulis oleh Narila Mutia Nasir yang menceritakan pengalaman pubertas santri di pesantren, dengan judul “Terasa Tapi Tak Terucapkan: Kisah Pubertas di Pesantren”. Pada bab ini Mutia menceritakan bagaimana peneliti menghadapi tantangan besar menggali cerita-cerita seputar pubertas santri yang cenderung dianggap tabu dan berhadapan dengan norma-norma pesantren yang ketat. Mutia menunjukkan bagaimana interaksi yang empatik dan pendekatan antropologis mampu membuka percakapan sensitif yang selama ini terpendam.

Pada bab ketujuh, tulisan “Meruntuhkan Kepolosan, Meneguhkan Ketahanan” merupakan refleksi Aptiani Nur Jannah dalam menggali isu kekerasan seksual di pesantren. Salah satu kerentanan santri terhadap kekerasan seksual disebabkan oleh kepolosan yang dalam arti minimnya pengetahuan tentang isu ini. Aptiani menceritakan bagaimana santri kesulitan dalam memahami dan menjawab pertanyaan peneliti karena berbagai istilah kekerasan seksual yang dianggap asing dan tidak pernah diajarkan dalam kurikulum pesantren. Pemahaman santri akan kekerasan seksual seringkali bercampur antara moral dan mitos, yang dalam beberapa kasus diperkuat oleh penafsiran narasi keagamaan yang kurang proporsional, seperti kecenderungan menyalahkan korban berdasarkan pakaian dan perilaku. Belum lagi, adanya budaya diam dan penyangkalan yang justru berpotensi melanggengkan kekerasan dan menyulitkan korban untuk bersuara. Dari sini, Aptiani menegaskan pentingnya pendidikan reproduksi yang komprehensif agar santri mampu

mengenali, memahami dan melindungi diri dari kekerasan seksual.

Bagian terakhir ditulis oleh Grace Rachmunda, dengan judul “Trauma yang Menyelinap: Refleksi Emosi Peneliti”. Grace merefleksikan bagaimana kami mengalami tekanan emosional bahkan *secondary trauma* saat harus membahas isu kekerasan seksual di pesantren. Tulisan ini mengungkapkan bagaimana trauma tidak hanya muncul pada korban, tetapi juga pada peneliti yang menyelami kisah-kisah traumatis secara mendalam. Pengalaman emosional ini menunjukkan betapa pentingnya empati dalam penelitian, dukungan dari sesama peneliti, pengelolaan kesehatan mental selama proses penelitian, dan, yang tidak boleh dilupakan, fokus pada korban.

Kami berharap, kisah kami dapat memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana penelitian bukan sekedar soal data dan metode, tetapi juga soal keberanian, empati dan kesiapan mental menghadapi kenyataan lapangan. Buku ini kami persembahkan untuk para peneliti, pengkaji, penyintas dan para pejuang isu-isu kekerasan seksual.

BAGIAN 1

RISET SENSITIF DI PESANTREN

BAYANG OTORITAS, INDEPENDENSI, DAN PRODUKSI ILMU PENGETAHUAN

• Windy Triana

Ketika kami berhadapan dengan hasil penelitian lapangan, terpikir berbagai rekomendasi yang berharap pesantren perlu melakukan ini dan itu; pemerintah perlu melakukan ini dan itu. Di tengah semangat merekomendasikan hal positif kepada pesantren, kami sempat lupa dengan satu karakteristik pesantren yang berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya di Indonesia, independensi! Karakteristik ini merupakan salah satu hal yang distingtif dari pesantren, yang menjadikan pesantren unik dibandingkan dengan lembaga pendidikan umumnya. Intervensi terhadap pesantren bukan hal mudah, meskipun yang dimaksud adalah intervensi yang berbasis kemitraan, bukan kontrol dari atas. Dengan begitu, diperlukan strategi yang tepat dan pertimbangan yang matang.

Pada 2022, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan pemberitaan kekerasan seksual yang terjadi di pesantren,

**Independensi!
Karakteristik
ini merupakan
salah satu hal
yang distingtif
dari pesantren,
yang menjadikan
pesantren unik
dibandingkan
dengan lembaga
pendidikan
umumnya.**

yang melibatkan tokoh terkemuka di pesantren. Pemberitaan ini kemudian diikuti dengan berbagai pemberitaan lain yang tidak hanya tentang kekerasan seksual, tapi juga kekerasan dalam bentuk lainnya. Sebagai “mantan” santri, saya mulai gelisah, mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di pesantren-pesantren ini. Media sosial diramaikan dengan perdebatan dan pertanyaan tentang pesantren dan figur-figur otoritas di dalamnya. Belum lagi, pemberitaan

tentang sulitnya menyelesaikan isu kekerasan di pesantren karena berhadapan dengan figur yang “dihormati” oleh masyarakat, dan kecenderungan pesantren yang tertutup. Intervensi negara, termasuk polisi dan pemerintah pusat, menjadi hal yang tidak mudah dilakukan.

Keprihatinan saya secara pribadi sebetulnya adalah pada insiden kekerasan seksual yang terjadi di institusi keagamaan yang sarat akan pendidikan moral. Tidak bisa tidak, isu ini mengagetkan dan membuat masyarakat mempertanyakan integritas pesantren. Meskipun kasus-kasus yang terjadi tidak mencerminkan apa yang terjadi di pesantren secara umum, nama baik pesantren secara keseluruhan menjadi taruhan. Saya merasa perlu melakukan sesuatu untuk memulihkan citra pesantren. Terlebih saya membayangkan luka adik-adik penyintas yang berjuang mendapatkan keadilan. Dilema subjektivitas sebagai seorang alumni pesantren dan tuntutan objektivitas seorang peneliti dan akademisi menjadi tantangan

bagi saya, dan tim. Namun, kami terus menegaskan jati diri kami sebagai peneliti dan akademisi.

Bersama dengan kawan-kawan peneliti di PPIM UIN Jakarta, kami memikirkan apa yang dapat kami lakukan dan bagaimana kami dapat berkontribusi secara lebih luas untuk pesantren. Setelah diskusi panjang dan konsultasi dengan berbagai pihak, kami memutuskan untuk mengangkat isu yang lebih luas yaitu Pesantren Ramah Anak.

Pesantren Ramah Anak: Perjalanan Menembus Sekat dan Persepsi

Pesantren Ramah Anak merupakan program yang diinisiasi oleh pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Agama. Salah satu peneliti di tim kami menjadi penyusun pedoman Pesantren Ramah Anak, yang selanjutnya disosialisasikan di beberapa pesantren. Pada diskusi desain penelitian, kami memilih topik Pesantren Ramah Anak untuk pada akhirnya dapat mengkaji hal-hal yang menjadi pertanyaan masyarakat seputar pesantren akibat pemberitaan-pemberitaan yang ada, termasuk kekerasan seksual.

Sejatinya, Pesantren Ramah Anak merujuk pada pesantren yang mampu memberikan pendidikan dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Dalam diskusi saya bersama Aris Adi Leksono, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ia menyampaikan bahwa tantangan terbesar dalam implementasi Pesantren Ramah Anak adalah mewujudkan kondisi pesantren yang benar-benar bebas dari kekerasan. Secara dixi, istilah Pesantren Ramah Anak memang tampak positif sebagai upaya menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Namun demikian, istilah ini tetap menimbulkan beragam penafsiran dan tidak selalu diterima secara seragam oleh semua pihak.

Dari diskusi awal saja, kami menemukan ada anggapan bahwa Pesantren Ramah Anak mendiskreditkan pesantren dengan mempertanyakan “apakah selama ini pesantren tidak ramah anak, sehingga perlu ada program Pesantren Ramah Anak?” Ada pula anggapan bahwa Pesantren Ramah Anak adalah program yang melarang “hukuman” bagi santri, padahal hal tersebut adalah bagian dari tradisi untuk mendisiplinkan santri. Kekeliruan pemahaman ini menjadi “pekerjaan rumah”, baik bagi pemerintah, maupun bagi kami yang akan merekomendasikan kebijakan berdasarkan temuan penelitian kami.

Belum lagi, ada anggapan bahwa Pesantren Ramah Anak merupakan upaya pemerintah yang ingin melakukan intervensi terhadap pesantren. Selanjutnya, intervensi ini dianggap sebagai ancaman bagi independensi pesantren, yang sudah terjaga sejak awal lahirnya institusi tersebut. Pada saat yang sama, negara merasa bertanggung jawab melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar yang meletakan tanggung jawab perlindungan anak di pundak pemerintah.

Dengan karakteristik pesantren yang independen, pesantren berhak menentukan arah penyelenggaraan pendidikan Islam tanpa ketergantungan terhadap pemerintah atau organisasi lainnya. Dari sisi pendanaan, pesantren umumnya didanai dengan swadaya masyarakat, donatur dan sumbangan dari santri. Pesantren menentukan kurikulum yang fleksibel dan tidak terikat oleh standar yang dibuat negara. Pada saat yang sama, kiai memiliki otoritas penuh dan mutlak dalam pengambilan keputusan, termasuk pada penentuan kurikulum, rekrutmen pengajar maupun sistem pembelajaran dan pengelolaan asrama.

Kami sadar, bahwa penelitian kami akan berhadapan dengan independensi pesantren, yang sangat berpotensi memengaruhi setiap proses perjalanan penelitian kami hingga akhir. Sejak awal kami perlu bersiap dengan tantangan

akses data, dan tantangan pada saat publikasi dan diseminasikan temuan penelitian. Di tahap awal, kami bertanya-tanya apakah independensi pesantren dapat menjadikan pesantren lebih terbuka, atau malah sebaliknya. Beberapa pemberitaan tentang insiden kekerasan dan kekerasan seksual di pesantren mengungkap ketertutupan pesantren dan sulitnya akses masuk ke institusi tersebut. Kami melihat bahwa tantangan semacam itu merupakan ekses dari independensi pesantren.

Pedoman Pesantren Ramah Anak, yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Kementerian Agama, mencerminkan pesantren yang ideal. Ideal baik dalam hal *setting* lingkungan, maupun interaksi antar santri, serta santri dengan orang dewasa di sekitarnya. Dari sisi lingkungan, kesediaan fasilitas yang ideal dilihat “terlalu indah untuk jadi kenyataan” atau mencerminkan “pesantren surga”. Bukan tidak mungkin diwujudkan, tetapi untuk dapat diwujudkan, jelas sekali dibutuhkan sumber daya yang sangat tidak sedikit.

Pada saat yang sama, dengan semangat independensinya, pesantren merasa perlu untuk berdiri di atas kaki sendiri—sering kali dengan sedikit, atau bahkan tanpa, dukungan dari pemerintah maupun pihak lain. Pesantren dengan fasilitas yang sangat ideal umumnya hanya dapat dijangkau oleh mereka yang memiliki dana besar. Sementara itu, masih banyak pesantren yang menjadi alternatif lembaga pendidikan bagi anak-anak dari keluarga menengah ke bawah. Dalam konteks ini, kesederhanaan menjadi ciri khas sekaligus identitas pesantren. Namun demikian, kesederhanaan tersebut tidak berarti pesantren tidak bisa menjadi lingkungan yang ramah anak.

Pengalaman salah satu peneliti kami di wilayah timur Indonesia dapat menunjukkan bagaimana kesederhanaan pesantren tidak menjadikannya tidak ramah terhadap anak. Jika dilihat dari bangunan pesantren yang terbuat dari bilik

bambu, orang akan melihat bahwa pesantren tersebut tidak mampu memberikan fasilitas yang cukup untuk anak. Mereka tidur dengan alas tikar dan merasakan dinginnya malam dari rongga-rongga angin di dinding bambu.

Peneliti kami memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan observasi ke wilayah sekitar pesantren dan rumah-rumah penduduk. Apa yang ditemukan cukup mengejutkan dan menjadi cerita berharga bagi kami semua. Ia menceritakan bagaimana pesantren menjadi satu-satunya tempat yang dialiri listrik dan memiliki pencahayaan yang cukup. Kondisi ini menunjukkan bahwa pesantren menjadi tempat yang lebih baik bagi anak-anak di sana. Pesantren memberikan kenyamanan dan keamanan di tengah-tengah keterbatasan dan kesederhanaan. Pengalaman ini cukup mengubah persepsi kami tentang definisi Pesantren Ramah Anak.

Mencari Titik Temu antara Independensi dan Perlindungan Anak

Merespons isu kekerasan seksual, untuk menjadi adil dan objektif, selain menggunakan Pesantren Ramah Anak sebagai pintu masuk, kami juga tidak hanya menggali potensi kerentanan pesantren terhadap kekerasan seksual tetapi juga ketahanannya. Dengan kasus-kasus yang mengemuka, tidak dapat dinafikan bahwa potensi kerentanan itu ada, tetapi kami juga berkeinginan untuk menggali bagaimana sebetulnya pesantren memiliki ketahanan terhadap kekerasan seksual. Lebih jauh, kami ingin mengurai aspek apa saja yang dapat ditangani untuk lebih menguatkan ketahanan pesantren demi mewujudkan pesantren yang ramah anak.

Dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini bisa jadi tidak mudah diterima oleh pihak pesantren, kami berdiskusi dengan berbagai pihak, baik pesantren maupun pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Bersama dengan peneliti-peneliti senior PPIM UIN Jakarta dan Bapak

Basnang Said, Direktur Pendidikan Pondok Pesantren, kami mendiskusikan strategi pendekatan ke pesantren. Merespons niat baik dari penelitian ini, Bapak Basnang Said memberikan dukungan dengan menyurati seluruh Kantor Wilayah di mana penelitian ini dilaksanakan. Bagi kami, dukungan ini menjadi amunisi semangat kami. Kami merasa optimis bahwa penelitian ini betul-betul dibutuhkan untuk pengembangan kebijakan berbasis bukti.

Berbekal “surat sakti” dari Kementerian Agama, kami mengutus 125 enumerator di 90 kabupaten/kota untuk memulai tahap penelitian pertama, yaitu survei nasional. Pada tahap ini, kami betul-betul mengandalkan enumerator untuk mendapatkan data lapangan. Selain mengumpulkan data, enumerator ini bertanggung jawab mengetuk pintu dan membuka jalan ke pesantren-pesantren. Untuk mencegah kemungkinan yang tidak diharapkan, kami merekrut enumerator-enumerator lokal yang lebih memahami medan yang dihadapi. Kami juga mensyaratkan latar belakang lulusan pesantren bagi setiap enumerator. Bermodalkan dua hal tersebut, kami berharap enumerator dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pesantren untuk mendapatkan data yang diharapkan.

Kebanyakan pesantren merespons dengan baik kedatangan para peneliti lapangan. Meskipun demikian, untuk dapat diterima, para enumerator membutuhkan waktu dan proses yang cukup berliku. Tidak semua pesantren langsung mengiyakan pada kedatangan pertama enumerator. Kehati-hatian pesantren untuk menerima kami, adalah sesuatu yang wajar. *Toh*, setiap kita pun akan berhati-hati dengan orang asing yang datang ke rumah untuk bertemu. Di luar dugaan kami, mayoritas pesantren menerima kami dengan sangat terbuka. Tujuan meneliti implementasi Pesantren Ramah Anak mendapatkan tanggapan yang cukup baik. Pesantren

bersedia menyambut dan mengizinkan enumerator untuk berinteraksi dengan santri dalam rangka pengambilan data.

Penting diceritakan di sini bahwa karakter independensi pesantren, berimplikasi pada kondisi di mana siapa pun tokoh masyarakat dapat mendirikan pesantren kapan saja, dan di mana saja. Akan tetapi, sejak tahun 2019, negara hadir untuk memastikan penyelenggaraan dan kualitas pesantren. Izin pendirian pesantren diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1626 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren. Sebelum itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6931 tahun 2019, pesantren dapat menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini untuk menjadi tanda kehadiran negara dalam pengembangan pesantren.

Meskipun demikian, dengan prinsip independensinya, pesantren dapat memilih untuk menerima atau tidak menerima bantuan dari pemerintah ini. Ada juga yang memandang bahwa BOS merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap pesantren, karena untuk menerima BOS, pesantren-pesantren harus mendaftarkan diri dan masuk ke dalam *database* pesantren yang dikelola oleh Kementerian Agama. Dengan begitu, ramai-ramai pesantren mendaftarkan diri agar terdata untuk mendapatkan bantuan ini. Sayangnya, data ini tidak sepenuhnya akurat.

Di beberapa wilayah, enumerator tidak menemukan pesantren yang terdata dalam sampel. Ada pesantren-pesantren yang bentuknya hanya masjid, atau bahkan sudah tidak ada. Di sini perjuangan enumerator diuji. Mereka harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menemukan pesantren pengganti. Belum lagi pendekatan dan perizinan yang membutuhkan proses. Seorang enumerator di salah satu

provinsi di Sumatera, misalnya, harus mengganti pesantren yang menjadi target penelitian sebanyak tiga kali. Satu pesantren menolak untuk dijadikan objek penelitian, sementara pesantren berikutnya tidak ditemukan. Dalam perjalannya, ketika enumerator itu diterima sebuah pesantren, ia harus melalui proses panjang. Ia harus menginap beberapa malam di sekitar pesantren untuk membangun komunikasi dan *trust* dari pesantren. Ia dengan sukarela mengikuti pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh pesantren untuk pada akhirnya mendapatkan akses bertemu dengan santri.

Penelitian kuantitatif yang kami lakukan berhasil dengan baik. Kami memperoleh 98% respons yang kemudian datanya dapat diolah dalam laporan kami. Di luar dugaan, dari penelitian Pesantren Ramah Anak ini, kami mendapatkan informasi yang dapat dikatakan sensitif. Dengan tetap menjaga integritas dan objektivitas keilmuan, dengan hati-hati, kami memilih dan memilah data yang terkumpul. Beberapa prinsip yang kami pegang kuat antara lain adalah menjaga privasi pesantren maupun santri dan guru yang menjadi responden kami.

Pada penelitian kualitatif, kami, para peneliti utama, turun langsung ke lapangan dengan didampingi asisten peneliti. Pesantren-pesantren yang kami datangi menerima kami dengan baik, tanpa penolakan. Bahkan sampai penelitian ini selesai, pesantren-pesantren tersebut tetap menjalin komunikasi dengan baik dan berharap bahwa hasil penelitian kami dapat menjadi dasar pengembangan pesantren di masa depan. Dalam proses ini, kami juga berkesempatan berdialog dengan para kiai dan nyai yang memegang otoritas di pesantren.

Berdasarkan pengalaman pribadi, saya merasakan keterbukaan yang tulus dari para kiai dan nyai. Saya menyadari, kiai dan nyai biasanya dikenal sangat selektif terhadap pihak luar.

Saya justru mendapatkan cerita dan perspektif yang berbeda dan kaya.

Perjalanan penelitian ini mengajarkan kami bahwa independensi dan otoritas pesantren tidak selalu berimplikasi negatif. Pengalaman saat penelitian kualitatif membuka mata saya dan kawan-kawan peneliti tentang pesantren masa kini, dan bagaimana mengkomunikasikan isu yang sensitif kepada pesantren. Dengan komunikasi yang tepat, justru independensi pesantren mendukung penelitian kami. Ini juga yang menjadikan kami lebih optimis untuk dapat mengkomunikasikan hasil penelitian ini ke pesantren. Inilah yang menjadi agenda kami selanjutnya.

Isu Kekerasan Seksual di antara Marwah dan Kepercayaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa independensi dan otoritas di pesantren memberikan tantangan keterbukaan. Pesantren berhak memilih dengan siapa mereka mau berinteraksi dan kepada siapa mereka mau terbuka. Dari wawancara kami dengan berbagai pihak tentang penanganan kekerasan seksual di pesantren, kendala yang sering dihadapi dan bisa jadi paling sulit adalah ketertutupan pesantren. Beberapa pesantren yang tertimpa kasus lebih sering menutup diri dan menolak intervensi, terlebih pada kasus-kasus yang melibatkan otoritas pesantren atau keluarga dari pemegang otoritas. Kalaupun tidak melibatkan pihak-pihak tersebut, kekhawatiran akan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pesantren dan terganggunya marwah pesantren, tetap menjadi isu yang dianggap lebih utama daripada membuka diri.

Meski demikian, salah satu peneliti kami menemukan praktik baik dari pesantren yang menghadapi insiden kekerasan seksual. Ini bisa dikatakan langka, namun kisah ini juga menunjukkan bahwa keterbukaan justru menjadi cara menjaga marwah pesantren. Dalam diskusi hasil temuan,

ia menceritakan bagaimana pesantren ini berupaya untuk terbuka dan menerima intervensi dari berbagai pihak. Keterbukaan ini didorong oleh keinginan untuk memberikan keadilan dan pemulihan bagi para penyintas. Pesantren ini membuka diri untuk berkonsultasi dengan banyak pihak. Diceritakan oleh salah satu otoritas di kota tempat pesantren itu berada, bahwa apa yang dilakukan oleh pesantren justru menunjukkan bahwa pesantren memiliki kepedulian dan bertanggung jawab terhadap kasus yang menimpanya.

Sebetulnya, ketertutupan yang sering kali terjadi di pesantren, bukan semata sikap individu. Akan tetapi, hal tersebut juga dipengaruhi oleh struktur relasi kuasa dalam pesantren. Budaya hormat sering juga menghambat kritik terhadap otoritas, yang kemudian didukung oleh ketiadaan mekanisme pelaporan dan pendampingan yang memadai.

Bagi kami, yang juga alumni pesantren, mendengar langsung bagaimana pergulatan pesantren dalam merespons isu kekerasan seksual betul-betul menguji empati sekaligus integritas kami. Keterhubungan kami dengan pesantren membuat kami memahami kekhawatiran pesantren akan stigma dan dampak jangka panjang isu tersebut terhadap reputasi lembaga. Namun di sisi lain, kami merasa bertanggung jawab terhadap nilai-nilai keberpihakan pada anak, apalagi bagi penyintas, dan prinsip perlindungan anak.

Bagi saya pribadi, mengkomunikasikan hasil temuan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah saya lakukan. Sejak awal, penelitian ini menguras emosi dan membawa beban psikologis, terutama saat kami berhadapan langsung dengan kisah-kisah kekerasan seksual yang dialami penyintas. Pada saat yang sama, ada rasa tanggung jawab terhadap pesantren dan tidak bisa tidak, subjektivitas saya sempat terusik. Meskipun demikian, bersama-sama dengan kawan-kawan peneliti, kami

saling menguatkan dan berupaya menjaga objektivitas kami sebagai peneliti dan akademisi.

Saya tertantang untuk dapat mengkomunikasikan hasil temuan tanpa menyinggung pihak mana pun terutama pihak pesantren yang menjadi target penelitian kami. Dengan independensi pesantren, bisa jadi kami akan berhadapan dengan resiko penolakan saat diseminasi hasil temuan. Pada saat yang sama, kami merasa bahwa kami harus jujur menyampaikan apa yang kami temukan kepada publik.

Secara pribadi, ada perasaan lega dalam diri saya ketika membaca hasil akhir penelitian kami. Kami menemukan bahwa ternyata ketahanan pesantren terhadap kekerasan seksual lebih besar daripada kerentanannya. Artinya, di tengah berbagai kekhawatiran yang muncul dari kasus-kasus yang mencuat ke permukaan, masih banyak pesantren yang memiliki mekanisme, nilai-nilai, dan budaya internal yang mampu mencegah serta merespons kekerasan. Temuan ini menjadi harapan, bahwa dengan pendekatan yang tepat, pesantren dapat menjadi ruang yang aman dan ramah bagi anak.

Namun, di balik rasa lega itu, saya juga merasakan beban moral yang besar. Meskipun kerentanan pesantren terhadap kekerasan seksual cenderung lebih kecil daripada ketahanannya, yang hanya 1,06%, angka ini menjadi berarti ketika dihadapkan pada jumlah santri yang mencapai angka 8 jutaan di seluruh Indonesia.¹ Artinya sekitar 40 ribu santri di Indonesia, masih berada pada posisi rentan terhadap kekerasan seksual. Ini bukan hanya sekedar statistik, tetapi puluhan ribu wajah, cerita dan masa depan santri. Sebagai peneliti, saya tidak bisa mengabaikan fakta itu. Saya harus berani dan menguatkan diri untuk bisa menyampaikannya

1 Detail temuan survei nasional dan penelitian kualitatif dapat dilihat dalam buku “Menuju Pesantren Ramah Anak” yang merupakan laporan dari survei nasional dan penelitian kualitatif yang sudah dilakukan.

ke publik, dan ke saudara-saudara saya di pesantren. Dalam kasus kekerasan, satu kasus saja sudah tidak dapat dibenarkan.

Ini penting untuk menjadi pengingat bahwa pekerjaan kita belum selesai, bahwa keterbukaan dapat menjadi kunci untuk membangun sistem perlindungan yang lebih kuat. Saya berkeyakinan, dengan pendekatan yang tepat, kesadaran pesantren untuk mewujudkan Pesantren Ramah Anak akan sangat mungkin dilakukan. Tanggung jawab perlindungan keselamatan dan kesejahteraan anak adalah tanggung jawab bersama, ungkapan *“it takes a village to raise a child”* menjadi benar adanya. Dengan begitu, keterbukaan akan sinergi dan kolaborasi menjadi perlu untuk memperkuat ekosistem perlindungan anak.

Dari situ, kepercayaan terhadap pesantren menjadi sesuatu yang tidak hanya dibangun dari citra, tetapi juga komitmen untuk melindungi dan menyejahterakan anak. Keterbukaan pesantren dan kesediaan untuk berbenah menjadikan kepercayaan masyarakat tumbuh lebih otentik dan berkelanjutan.

MENAVIGASI PROSES YANG BERLIKU

• Citra Dwikasari

Untuk dapat melakukan suatu penelitian secara aman dan lancar, terdapat proses berliku yang bersama-sama. Perjalanan berliku bagi setiap penelitian akan berbeda tergantung pada tingkat kompleksitasnya. Bab ini menggambarkan catatan refleksi pribadi saya sebagai asisten peneliti yang bersama-sama proses penelitian Pesantren Ramah Anak sejak awal persiapan hingga akhir hasil penelitian ini berhasil disampaikan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.

Isu dan Subjek Sensitif yang Berlapis

Pesantren Ramah Anak. Itulah topik riset yang kami teliti. Ketika menempuh jenjang perkuliahan, saya cukup dekat dengan proses riset. Baik saat menempuh pendidikan sarjana, maupun magister. Tetapi, proses yang saya lalui dalam penelitian ini merupakan pengalaman baru bagi saya. Inilah untuk pertama kalinya saya ikut menjadi bagian dari tim riset secara profesional. Riset kali ini memiliki tingkat kompleksitas yang menantang dan dampak yang nyata. Saat mendengar gambaran besar tentang riset ini, saya sangat bersemangat.

Pesantren Ramah Anak sekilas terdengar merupakan topik yang sederhana. Namun, setelah bergabung dalam tim penelitian ini, cara pandang saya berubah. Banyak sekali hal-hal baru yang saya temui dan pelajari.

Bagi saya, riset ini ternyata memiliki tingkat sensitivitas yang kompleks. Isu kekerasan seksual, subjek anak, dan pesantren merupakan tiga hal yang sensitif dan berisiko. Lapis pertama sensitivitas riset ini yaitu topik pembahasan tentang isu kekerasan seksual. Isu ini masih tabu dibicarakan di Indonesia. Susah untuk digali. Tetapi inilah fenomena yang terjadi hingga sekarang. Saya tersadar bahwa saya tumbuh di dalam lingkungan keluarga dan pergaulan pertemanan yang selama ini (bahkan hingga sekarang) tidak pernah diajarkan atau dibekali pemahaman tentang kekerasan seksual. Maraknya berita yang meliput kasus kekerasan seksual di Indonesia membuat saya tercengang. Ternyata kasus ini ada dan telah terjadi. Bahkan hingga saat proses penulisan ini pada April 2025, berita tentang kasus kekerasan seksual masih terjadi dan semakin menguak ke permukaan.

Bagi saya, riset ini ternyata memiliki tingkat sensitivitas yang kompleks. Isu kekerasan seksual, subjek anak, dan pesantren merupakan tiga hal yang sensitif dan berisiko.

Lapis kesensitifan kedua yakni adanya pelibatan santri anak sebagai salah satu subjek. Penelitian ini melibatkan santri putra dan putri berusia antara 16-18 tahun dan berada di kelas XI (Kelas 2 Sekolah Menengah Atas) atau sederajat untuk berpartisipasi menjadi subjek penelitian. Santri-santri

ini masih masuk dalam kategori anak. Menurut hukum di Indonesia, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun. Oleh karena itu, apa pun aktivitas, termasuk kegiatan penelitian yang melibatkan anak di dalamnya, memerlukan persetujuan (*consent*) orang tua atau wali. Hal ini dikarenakan anak belum memiliki otoritas sendiri dalam mengambil keputusan. Sebelum memulai pengambilan data kepada anak, berlaku juga prinsip *informed consent* dan *assent* yang memungkinkan anak berhenti berpartisipasi apabila anak merasa tidak nyaman. Penelitian ini juga menerapkan prinsip perlindungan anak yang melibatkan inklusi sosial. Prinsip inklusi sosial ini memungkinkan semua anak memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi, tanpa memandang latar belakang, kategori kelompok rentan atau pun berkebutuhan khusus. Selain itu, pelibatan anak dalam penelitian juga akan memengaruhi proses penelitian secara keseluruhan. Pemahaman saya menjadi lebih terbuka, bahwa ketika melibatkan anak, maka berlaku pula beberapa aturan. Misalnya penting memilih diksi yang digunakan dalam instrumen penelitian, mempertimbangkan durasi waktu partisipasi anak, dampak kondisi psikologis dan hal lainnya. Semuanya harus dipertimbangkan secara hati-hati dan serius dengan memperhatikan prinsip *do no harm* (tidak membahayakan).

Lapis ketiga yang paling menantang adalah riset ini dilaksanakan di pesantren. Latar belakang saya bukanlah santri. Saya tumbuh di jenjang-jenjang pendidikan umum negeri di suatu provinsi di Pulau Sumatera, Bengkulu. SDN, SMPN, SMAN yang saya tempuh bukanlah lembaga pendidikan keagamaan. Tentang pesantren, saya hanya sebatas pernah mendengar hal itu. Pertama kalinya saya mengenal lebih dalam tentang pesantren yaitu pada jenjang pendidikan tinggi, saat saya menempuh kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sivitas akademika universitas tempat saya pertama kali berinteraksi dengan dunia “luar”, mayoritas merupakan alumni pesantren. Karena berinteraksi dengan mereka, saya menjadi

paham tentang pesantren dan Islam. Di sini pula, saya baru memahami bahwa di dalam Islam terdapat keberagaman mazhab. *Wah, apa itu?* Sering kali gumaman itu terlontar oleh saya. Sebelumnya saya tidak mengenal empat Imam mazhab besar dalam Islam seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Lainnya, tentang adanya organisasi Islam yang ada di Indonesia seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan lain-lain juga baru saya pahami pada masa akhir perkuliahan.

Saya menyadari, penelitian Pesantren Ramah Anak ini tergolong menantang, terutama bagi saya yang bukan merupakan sarjana yang tidak berlatar belakang santri. Saya memahami bahwa kompleksitas riset ini beririsan dengan sensitivitas isu dan afiliasi subjek yang berlapis.

Riset ini Berskala Besar dan Kompleks

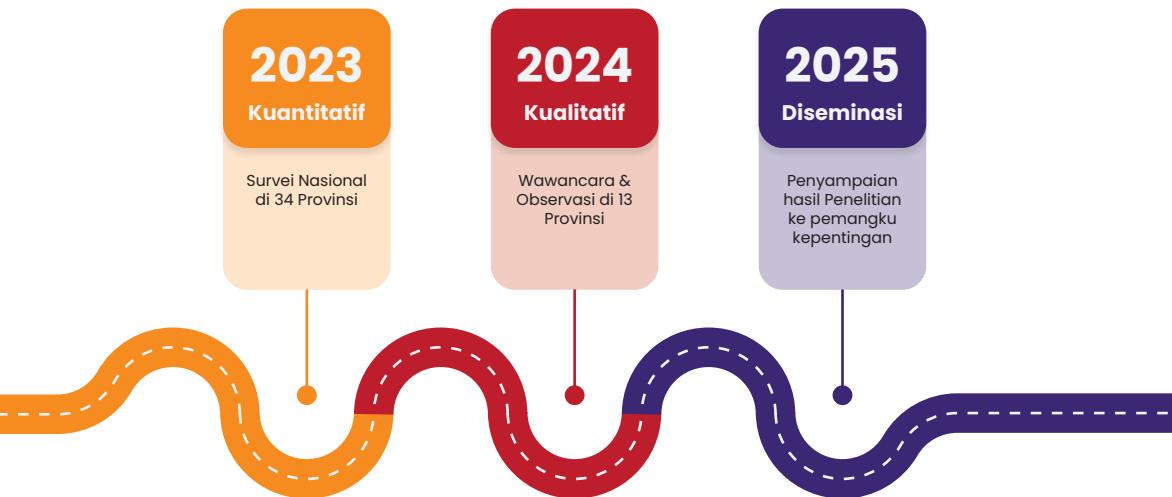
Selama ini, saya hanya terlibat dalam riset dengan durasi waktu singkat. Tidak bertahun-tahun. Tidak pula sampai mengurus perizinan legalitas, konsultasi pakar, atau penyusunan instrumen. Biasanya, saya menyelami riset dengan data digital yang sudah siap pakai untuk diolah. Berbeda dengan riset yang kami lakukan ini. Setiap tahapan riset ini diwarnai dengan berkali-kali revisi dan penuh kehati-hatian. Begitu kompleks perjalanan riset ini dari persiapan hingga akhirnya hasil riset ini berhasil disampaikan kepada pemangku kepentingan.

Dari segi waktu, diperlukan dua tahun penelitian, yaitu Februari 2023 hingga Februari 2025 untuk sampai ke tahap rampung. Riset ini menggunakan dua pendekatan. Pada 2023, riset dengan pendekatan kuantitatif dilakukan melalui Survei Nasional di 34 Provinsi di Indonesia. Survei ini ditujukan untuk memetakan potensi kerentanan dan ketahanan pesantren terhadap kasus kekerasan seksual. Pada 2024, pendalaman hasil temuan pada survei nasional dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi di 13

provinsi. Setelah mengintegrasikan hasil temuan penelitian melalui survei nasional, wawancara mendalam dan observasi yang telah dilakukan menjadi satu kesatuan yang utuh, pada tahun 2025 hasil penelitian ini berhasil disampaikan kepada pemangku kepentingan.

Penelitian kami memiliki tujuan akhir yang besar, salah satunya, adalah adanya perubahan kebijakan. Pemangku kepentingan memiliki niat dan upaya untuk meniadakan terjadinya kasus kekerasan seksual di pesantren. Kasus ini harus nol atau sama sekali berhenti terjadi. Pemangku kepentingan ini *multi-level* mencakup pemerintah pusat dan daerah, pesantren, Majelis Masyayikh, organisasi-organisasi Islam yang membawahi pesantren, hingga lembaga-lembaga lain yang terkait dengan upaya pencegahan, penanganan dan penanggulangan isu kekerasan seksual. Dari tingkat lokal hingga nasional, pemangku kepentingan harus bersama-sama melakukan perubahan.

Gambar 1. Tiga Tahap Penelitian Pesantren Ramah Anak



Sebagai asisten peneliti, saya bekerja keras dan selalu siaga menyiapkan berbagai kebutuhan sebelum pengambilan data dilakukan. Hal paling mendasar yang wajib saya siapkan adalah terkait perizinan atau legalitas. Di Indonesia, untuk melakukan penelitian, institusi penyelenggara penelitian wajib memiliki Surat Keterangan Penelitian yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri). Ini kami lakukan. Dalam proses perizinan, cukup banyak dokumen yang harus dilampirkan, seperti proposal penelitian, formulir penelitian, surat permohonan penelitian, surat pernyataan keabsahan dokumen penelitian, surat pernyataan taat hukum, Surat Keterangan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) institusi, foto diri dan NPWP ketua peneliti, Kartu Tanda Penduduk (KTP), *Curriculum Vitae*, dan sertifikat vaksin COVID-19 seluruh peneliti. Urusan izin ini penting untuk meminimalisir risiko pencekalan oleh pihak-pihak tertentu selama proses penelitian. Apalagi, penelitian ini bukan *abal-abal* dan apalagi ilegal.

Momen ini merupakan pengalaman pertama kalinya saya mengurus surat perizinan penelitian. Untungnya, di era digital sekarang ini, surat ini diajukan secara daring melalui situs ula.kemendagri.go.id. Saya terbantu dengan adanya sistem digital ini. Selain itu, daftar syarat yang perlu kami lengkapi sudah tertera jelas. Sebenarnya, waktu yang dibutuhkan dari pengajuan hingga surat keterangan terbit yakni 3-4 hari. Namun, pengajuan ini baru berhasil setelah empat kali percobaan yang mengakibatkan keseluruhan durasi waktu yang dibutuhkan menjadi dua minggu atau 14 hari. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan secara teliti, akurat, jelas, dan lengkap seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Perihal salah ketik atau *typo* sama sekali tidak ditoleransi. Ini untuk memudahkan verifikasi bertingkat pada mekanisme internal Kemendagri.

MENJAGA MARWAH PESANTREN

Refleksi Penelitian Kekerasan Seksual di Pesantren

Sembari menunggu surat keterangan penelitian dari Kemendagri terbit, saya juga mengurus surat izin etik. Dua surat tersebut bersifat esensial untuk bisa beralih ke tahapan berikutnya. Kelengkapan syarat yang dibutuhkan untuk mengurus izin etik ini cukup menantang bagi saya. Pertanyaan-pertanyaan dalam formulir etik seperti “bagaimana langkah mitigasi apabila risiko penelitian terjadi?”; “risiko apa yang akan terjadi?”; “siapa yang akan bertanggung jawab?”; “bagaimana mekanisme respons saat risiko terjadi?”; dan lain-lain cukup membuat saya berpikir lebih jauh dan matang. Dibandingkan mengisi formulir izin penelitian dari Kemendagri, saya merasa mengisi formulir izin etik lebih membutuhkan diskusi-diskusi matang bersama tim peneliti. Lagi-lagi, karena penelitian ini melibatkan anak, tim etik berkepentingan untuk memastikan penelitian ini secara etika aman untuk anak. Hal ini menjadi tanggung jawab kami sebagai peneliti.

Selain urusan surat izin penelitian dan etik yang cukup memakan waktu, terdapat beberapa daftar kelengkapan yang juga perlu disiapkan. Daftar kelengkapan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Dilampirkan untuk Otoritas Pesantren

- Surat pengantar penelitian
- Surat izin keterangan legalitas
- Surat izin etik penelitian
- Surat permohonan penelitian
- Surat tugas peneliti
- Kontrak asisten peneliti
- Sertifikat

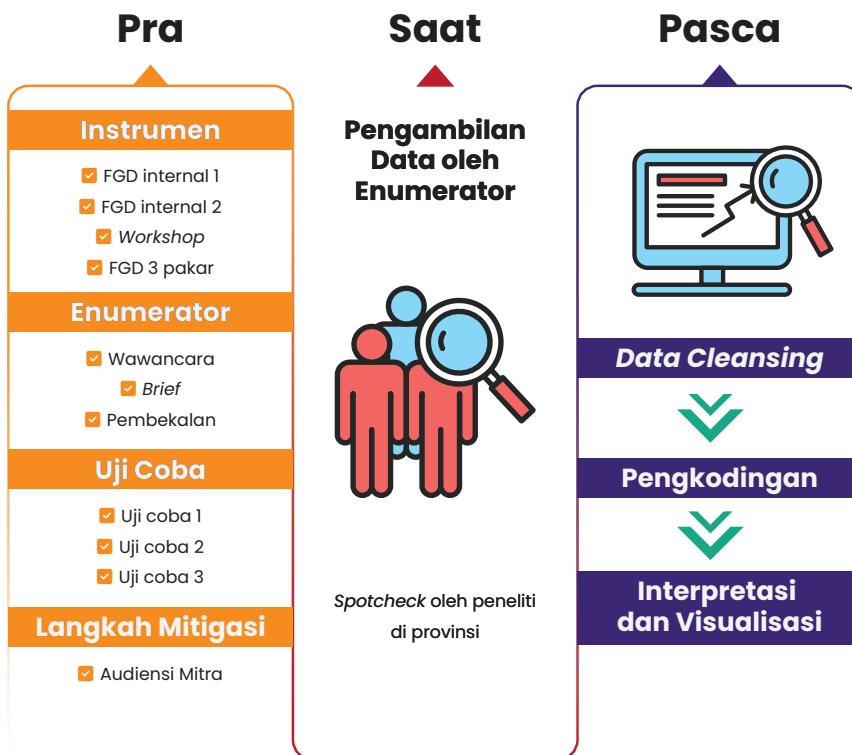
Disediakan saat Bersama Informan/Responden

- Lembar penjelasan penelitian
- Perlengkapan
 - Perlengkapan siaga trauma
 - Air Mineral
 - Tisu
 - Cemilan
 - ATK
 - Alat perekam
 - Laptop
 - Kamera
- Instrumen penelitian
 - Anak
 - Dewasa
- Alat peraga
- Informed consent*
 - Anak
 - Dewasa
- Cendera mata
 - untuk informan/responden
 - untuk pesantren

Output

- Rekapitulasi data informan
- Rekaman data
- Transkrip data
- Dokumentasi foto dan video
- Catatan harian peneliti
- Tanda terima cendera mata

Sebelum mencapai tahap ini, pengambilan data penelitian belum dapat dilakukan. Serangkaian kegiatan dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa penelitian ini minim risiko dan aman untuk dijalankan. Instrumen penelitian harus aman, metode harus efisien dan tidak berisiko, serta langkah-langkah mitigasi harus disusun dengan matang dan siap diterapkan. Semua ini berkaitan dengan topik penelitian yang menyangkut isu dan subjek yang sensitif. Penelitian berisiko gagal apabila terdapat kesalahan dalam pendekatan terhadap subjek, proses pengambilan data, maupun analisisnya.



Saat pengambilan data di lapangan berlangsung, saya bertugas menjembatani komunikasi dengan pihak-pihak yang dibutuhkan oleh enumerator dan peneliti. Dalam hati saya, ada perasaan khawatir apabila sesuatu terjadi dengan penelitian ini. Kekhawatiran tersebut misalnya timbulnya trauma primer bagi responden atau trauma sekunder bagi peneliti. Meskipun, upaya preventif dan langkah-langkah mitigasi sudah dipersiapkan secara matang, kemungkinan tersebut tetap ada. Untungnya, kekhawatiran tersebut tidak terjadi. Selain itu, saya juga siaga berperan sebagai *back up* (penunjang) saat dibutuhkan. Saya ikut turun ke lapangan saat penelitian kuantitatif. Tugas utama saya adalah melakukan *spotcheck* (cek lokasi penelitian) sebagai bagian kontrol risiko dan validitas data. Namun saat di lapangan, ternyata saya

juga merangkap peran seolah menjadi enumerator. Ya, saya ikut mengambil data di lapangan, bertemu dengan responden.

Bekal dan Modal Institusi Ternyata Tidak Cukup Membuka Akses

Skema penelitian sudah disusun secara matang. Urusan perizinan legalitas dan etik sudah didapatkan. Lalu bagaimana caranya untuk bisa masuk dan diterima oleh pesantren? “Pintu” besar pesantren ini tidak mudah dibuka. Kami menyiapkan beberapa strategi agar pintu tersebut dapat dibuka. Hal ini terkait dengan keragaman karakteristik pesantren yang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang digunakan pun turut beragam.

Sebagai asisten yang melakukan koordinasi hal-hal teknis selama penelitian, saya juga harus memastikan penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai rentang waktu yang telah ditentukan. Skema-skema yang telah dicanangkan melalui rapat-rapat panjang harus berhasil dilaksanakan. Dalam perjalanan riset ini, terdapat berbagai tantangan yang hadir. Mulanya, kami melakukan pengumpulan data kontak pesantren-pesantren yang menjadi subjek penelitian melalui penelusuran di Internet dan Sosial Media seperti situs resmi, Instagram, Facebook, YouTube, flyer kegiatan dan lainnya. Upaya membangun komunikasi berbekal nomor telepon yang dimunculkan di internet tidaklah mudah. Sedikit yang merespons. Beberapa nomor telepon yang ada tidak valid. Ada kendala besar tentang akses. Bagaimana caranya untuk terhubung ke para pesantren? Pertanyaan lebih lanjutnya adalah bagaimana cara agar pesantren dapat terbuka untuk menerima penelitian ini diselenggarakan di pesantren mereka?

Tidak semua orang bisa masuk ke pesantren. Penolakan dari pesantren merupakan bagian dari risiko yang dapat menghambat proses penelitian. Bahkan, kami, PPIM UIN Jakarta yang sebenarnya juga sebagian besar adalah masyarakat

pesantren, mengalami kendala akses. PPIM UIN Jakarta merupakan lembaga penelitian yang di dalamnya dipenuhi dengan orang-orang berlatar belakang organisasi-organisasi masyarakat Islam di Indonesia seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis dan lain-lain. Selain itu, mayoritas para penelitiannya adalah sarjana santri, bahkan berada dalam jaringan masyarakat atau pengurus pesantren. Tetapi, latar belakang ini tidak cukup membantu akses saat menghubungi pesantren-pesantren yang menjadi subjek penelitian. Ragam pendekatan kami lakukan sehingga tantangan akses berhasil dihadapi.

**Ragam
pendekatan
kami lakukan
sehingga
tantangan
akses berhasil
dihadapi.**

Langkah pertama yang kami lakukan untuk menanggulangi tantangan akses yakni dengan bantuan enumerator. Sejak awal, kami menentukan dengan matang kriteria Enumerator sebagai perpanjangan tangan peneliti PPIM. Kriteria seperti berasal dari daerah di mana pesantren berlokasi, memiliki latar belakang pesantren, hingga memiliki jaringan untuk mengakses pesantren merupakan upaya kami untuk memperbesar peluang penerimaan pesantren terhadap penelitian kami.

Ketika kami sudah berhasil terhubung dengan pesantren-pesantren tersebut, respons yang kami dapatkan pun beragam. Banyak respons yang menerima dengan senang dan terbuka. Namun, juga ada respons yang menolak, “Maaf, kami tidak dapat berpartisipasi dalam penelitian ini”. Respons ini kami jumpai, misalnya setelah perjuangan panjang mengetuk pintu satu pesantren di wilayah Jakarta. Meskipun kami sudah melakukan pendekatan dengan pimpinan pesantren dari

tingkat terendah hingga tingkat tertinggi pesantren tersebut, penolakan semacam ini masih dapat terjadi.

Beberapa pesantren di Indonesia berafiliasi dengan beragam organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya. Adanya jaringan kedekatan kami dengan pihak strategis atau pengurus inti organisasi-organisasi Islam tersebut turut membantu membuka akses. Meskipun demikian, kami terlebih dahulu menghubungi pengurus pusat organisasi-organisasi Islam tersebut dan dibantu melalui surat pengantar kepada pesantren di bawah naungan afiliasi mereka. Dengan cara ini, pesantren menjadi lebih terbuka terhadap penelitian kami.

Upaya menanggulangi akses lainnya yang kami lakukan adalah dengan melibatkan peranan Kementerian Agama yang berlokasi di daerah-daerah penelitian. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang ada di setiap wilayah otonomi tingkat kabupaten/kota turut membantu membuka akses ke pesantren. Upaya diplomasi dengan menggandeng perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama kami lakukan karena kami sadar, keberhasilan penelitian ini membutuhkan pendekatan beragam. Banyak tangan yang harus dilibatkan untuk membantu. Kesamaan identitas institusi saja tidak cukup.

Kolaborasi Massal Tidak Semudah Itu

Selain tantangan akses, perjalanan riset ini juga menghadapi tantangan dalam hal kolaborasi. Riset ini melibatkan banyak subjek penelitian yang tersebar luas secara geografis di seluruh penjuru Indonesia, sementara tim peneliti utama kami hanya terdiri dari tujuh orang. Sebagai contoh, subjek penelitian kuantitatif kami berjumlah 1.800 responden yang tersebar di 34 provinsi. Tentu saja, mustahil bagi para peneliti untuk melakukan pengambilan data secara serentak.

Selain tantangan besarnya jumlah responden, kami juga menghadapi tantangan geografis. Tim peneliti PPIM berkantor

di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten—lokasi yang tidak memungkinkan untuk menjangkau seluruh area penelitian hanya dengan perjalanan darat, seperti sepeda motor atau mobil. Perjalanan ke beberapa daerah memerlukan perjalanan udara dan air, seperti pesawat dan *speedboat*, karena penelitian ini mencakup seluruh wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan kontur geografis yang kompleks.

Untuk menyiasati dua tantangan ini, kami melibatkan peneliti lapangan atau enumerator (dalam riset kuantitatif) dan

asisten peneliti (dalam riset kualitatif) dari orang-orang setempat. Peran mereka sangat penting, terutama dalam mengakses pesantren dan mengumpulkan data. Namun, kerja kolaboratif ini juga diwarnai tantangan—terutama terkait perbedaan bahasa, budaya kerja, pengetahuan, dan pengalaman. Semua itu menjadi tantangan teknis yang harus saya hadapi sebagai “penjaga gawang”, bersama para peneliti lainnya.

Namun, kerja kolaboratif ini juga diwarnai tantangan—terutama terkait perbedaan bahasa, budaya kerja, pengetahuan, dan pengalaman.

Manajemen sumber daya manusia, khususnya saat bekerja dengan enumerator dan asisten peneliti, memunculkan

berbagai isu. Salah satu contohnya adalah ketika data yang dikumpulkan tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, tetapi peneliti lapangan tetap menuntut hak pembayaran sebagaimana tercantum dalam kontrak. Situasi ini cukup menantang, karena kami harus menjaga keseimbangan antara menjamin kualitas data dan memenuhi hak-hak mitra kerja.

Namun pada akhirnya, semua pihak yang terlibat dapat bekerja sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Peran mereka sangat krusial, tidak hanya dalam pengambilan data, tetapi juga di berbagai tahap penelitian lainnya. Sejak awal perumusan instrumen, kami sudah melibatkan banyak pihak dari pemerintah, lembaga, dan organisasi. Kolaborasi intensif dilakukan, misalnya, bersama Kementerian Agama, Bappenas, KemenPPPA, Satgas PPKS, PUSKAPA, dan berbagai lembaga lainnya. Kolaborasi ini bersifat saling melengkapi dan mendukung. Hasilnya, riset ini dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana.

Keseriusan kami dalam menjalankan penelitian ini mendapat sambutan hangat. Sebuah pesan indah dan menyentuh disampaikan langsung kepada saya: “Kami juga ucapkan terima kasih atas paparan hasil penelitiannya. Insya Allah sangat bermanfaat hasilnya. Apalagi bisa ditindaklanjuti dan setiap lapisan lembaga bisa saling bekerja sama dalam menangani kasus tersebut.”

“Surat cinta” ini datang dari perwakilan pesantren yang hadir dalam pemaparan hasil penelitian kami. Hati saya terasa penuh.

BAGIAN 2

RUANG DAN INTERAKSI DI PESANTREN

ANTARA MEMILIKI DAN MEMBEBASKAN DIRI: REFLEKSI SARJANA SANTRI

• Haula Noor

Bab ini muncul dari perasaan dilematik yang bercampur dengan perasaan sedih dan miris bermula ketika saya harus turun ke lapangan dalam rangka penelitian di pesantren. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus kekerasan di pesantren yang sejak tahun 2022 muncul ke permukaan. Hal ini, tentunya menjadi *wake up alarm*, tidak hanya bagi saya, tetapi juga bagi banyak kalangan, terutama mereka yang pernah merasakan hidup di pesantren. Kehidupan ini pernah saya pilih untuk saya jalani selama enam tahun pada masa SMP dan SMA saya. Kehidupan yang juga membentuk identitas keluarga saya. Ayah saya bahkan begitu bangga dengan keberhasilannya dapat menyekolahkan semua anak-anaknya ke pesantren. Semenjak berkecimpung di dunia akademik, dunia santri seolah-olah saya tinggalkan. Dunia yang menurut saya, sarat dengan ketaatan dan kering akan *critical thinking*.

Kini saya kembali sebagai orang yang berbeda. Saya kembali ke pesantren dengan misi khusus untuk memahami

apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Ingatan saya pun melayang ke masa-masa ketika saya dulu menimba ilmu agama, meskipun pesantren yang saya kunjungi kali ini bukanlah tempat saya belajar dulu. Suasananya masih terasa begitu akrab. Potongan-potongan ingatan muncul dengan samar-samar: dari bangun tidur pagi-pagi, antre mandi, antre mengambil sarapan, berjalan ke ruang kelas, shalat berjamaah, hingga berbagai rangkaian aktivitas lain yang pernah saya jalani dengan penuh kesungguhan.

Saya menyadari bahwa hidup sebagai santri, pada dasarnya, tidak memberikan banyak ruang untuk memilih: apakah ingin taat atau tidak. Segala sesuatu sudah diatur sedemikian rupa. *By design*, kehidupan di pesantren menuntut kita untuk hidup dalam kepatuhan—menjalani rutinitas, mengikuti aturan, hidup selaras dengan orang lain, dan berupaya meraih berkah dari para guru. Sebagai anak sekaligus santri, saya memahami bahwa taat kepada orang tua dan guru adalah kunci kesuksesan hidup. Dan keyakinan atas nilai itu pula, yang saya rasa, telah menghantarkan saya pada kehidupan akademik saya hari ini.

Bab ini merupakan refleksi perjalanan penelitian yang saya lakukan di beberapa pesantren di Indonesia. Saat ini saya memandang ruang dan waktu di pesantren dari sudut yang berbeda. Refleksi yang membuat saya bertanya-tanya: Apa yang saya lewatkan dari kehidupan pesantren? Apakah saya mengalami kejadian tersebut? Bagaimana mungkin pesantren yang seharusnya menjadi tempat aman bagi santri, justru menjadi tempat rawan bagi mereka? Kunjungan ini tidak hanya menjadi kerja penelitian, tetapi juga proses pembacaan ulang atas masa lalu saya sendiri. Refleksi ini adalah bagian dari usaha untuk tidak mengkhianati pengalaman saya sendiri, sekaligus upaya untuk mendengarkan suara-suara yang dulu mungkin saya abaikan—suara santri, suara saya sendiri.

Tumbuh sebagai Santri: Fondasi Keimanan dan Pengetahuan

Pesantren telah lama menjadi institusi pendidikan keagamaan yang bukan hanya mendidik secara keilmuan, tetapi juga membentuk karakter dan identitas santri melalui kedisiplinan, kemandirian, serta internalisasi nilai-nilai keislaman. Dalam literatur akademik, pesantren seringkali digambarkan sebagai ruang pembelajaran yang merepresentasikan kesalehan, kesederhanaan, dan keberkahan. Dalam sejarahnya, pesantren dihormati karena perannya menjaga warisan keilmuan klasik dan membentuk generasi yang patuh serta berakhlaq. Saya setuju dengan pernyataan ini. Sebelum akhirnya saya mendengar banyak kasus-kasus asusila yang dilakukan oleh pemilik otoritas di pesantren. Di situ saya merasa goyah.

Ketika saya melangkahkan kaki ke area pesantren sebagai peneliti, bukan lagi sebagai santri, saya membawa serta dua hal: nostalgia dan kegelisahan. Nostalgia akan masa remaja yang penuh kedisiplinan dan kebersamaan, namun juga kegelisahan karena kini saya tahu bahwa apa yang dulu saya terima sebagai sesuatu yang “biasa” ternyata menyimpan banyak persoalan yang tidak sederhana. Sebagai santri, taat adalah sebuah keutamaan. Taat kepada guru, kepada aturan, kepada nilai-nilai yang diwariskan di dalam pesantren. Kepatuhan ini bukan hanya diajarkan di ruang kelas, namun dibentuk melalui sistem yang terpola sedemikian rupa. Rutinitas harian yang diatur secara ketat, pembatasan interaksi dengan dunia luar, serta struktur otoritas yang begitu kuat menjadikan ketaatan sebagai bagian dari cara hidup yang tidak untuk dipertanyakan.

Kunjungan pertama saya ke salah satu pesantren di Jawa Tengah memberikan kesan mendalam. Melihat cara santri menjalani kehidupan pesantren, membuat saya bergumam, “Mereka sangat luar biasa”. Pimpinan pesantren langsung membawa saya dan rekan saya kepada seorang ustazah

muda. Ustazah muda itu mengantar kami ke tempat yang telah pesantren siapkan untuk kami menginap. Kami ditempatkan di salah satu kamar santri, tanpa pintu, dinding yang sudah lapuk, alas karpet sekedarnya, dan kipas angin untuk melawan hawa panas udara. Tentu fasilitas ini diberikan hanya kepada kami, bukan untuk para santri.

Tidak lama, saya harus pergi ke kamar mandi untuk berwudhu. Selesai dari kamar mandi, saya bilang kepada rekan saya, “airnya asin!” Lagi-lagi dalam hati saya berkata: “Jika saya yang berada di sini, saya mungkin tidak akan bertahan”.

Ungkapan ini keluar seolah saya tidak pernah tinggal di pesantren sebelumnya. Padahal saya paham betul bahwa menjadi santri bukan sekedar bertahan menjalani hari-hari di pesantren, melainkan belajar menyelami kehidupan sebagai bagian dari proses belajar berikut kesulitan yang menyertainya. Di balik rutinitas para santri yang padat, mulai dari bangun sebelum subuh, antri mandi, salat berjamaah, hafalan, belajar di kelas, hingga antre untuk makan, tertanam nilai-nilai fundamental yang menjadi fondasi ketataan, komitmen dan kegigihan. Dalam pelaksanaan aktivitas tersebut, ada interaksi yang terjalin antara santri dan guru yang secara tidak langsung mengajarkan adab, ketaatan, keikhlasan, menundukkan ego, menyelaraskan tindakan dan bersikap baik dengan santri lain dari berbagai latar belakang, serta menumbuhkan ketekunan dalam mencari ilmu.

Saya ingat sekali, ketika memasuki musim ujian, tempat tidur adalah tempat nyaman bagi saya untuk menghafal pelajaran. Saya tidak akan beranjak dari tempat tidur sampai saya benar-benar hafal. Begitu juga yang saya lihat dari santri-santri ini. Setelah shalat subuh, mereka berkumpul mendengarkan *tausiah* dengan mulut yang tak kuasa terus menguap. Mereka akan lanjut dengan setoran hafalan ke masing-masing guru. Beberapa dari mereka, sengaja duduk di kegelapan

demi mendapatkan tempat sunyi untuk menghafal. Saya tahu bagaimana rasanya berada di posisi mereka.

Saya juga ingat, seorang ustaz-wali kelas saya-pernah meminta saya untuk mencuci bajuannya. Sebagai santri, tentu saya menurutnya sebab ia merupakan guru dan orang tua kedua saya. Dan sebagai anak, tentu pekerjaan itu bukanlah hal sulit sebab di rumah saya selalu dididik untuk melakukan apa pun untuk keluarga. Mencuci baju dan mencuci piring seluruh anggota keluarga, hingga pekerjaan rumah lain yang dilakukan untuk keluarga. Saya tidak pernah tahu apa anggapan orang lain mengenai apa yang saya lakukan saat itu. Tetapi saya tidak pernah menyesal, bahwa saya melakukannya tulus untuk berbakti kepada guru. Saya menganggapnya hal biasa.

Apa yang saya alami sebenarnya juga terjadi pada santri di pondok yang saya kunjungi. Salah satu santri putri bercerita mengenai kegiatannya di pondok. Dalam tuturannya, ia harus membantu pemimpin pondok melayani tamu, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian. Terkadang mereka perlu berjaga hingga tengah malam sampai para tamu pulang meski mereka harus bangun pagi untuk berangkat ke sekolah. Tidak hanya itu, mereka juga bertanggungjawab ke dalam pengasuhan santri yang dilakukan hampir setiap hari. Mulai dari membangunkan santri di pagi hari, mengecek kerapian dan kebersihan kamar dan lingkungan pondok, memastikan tidak ada anak yang terlambat melakukan kegiatan, hingga memastikan santri untuk makan.

Cerita serupa juga saya dengar dari rekan peneliti. Dan cerita yang membuat saya sangat sedih adalah cerita tentang seorang santri yang bersedia dijodohkan dengan seseorang yang dipilihkan oleh kiainya, dengan atau tanpa persetujuan orang tua. Yang lebih menyakitkan lagi, adalah kisah-kisah ekstrem di mana santri, atas dasar ketaatan penuh kepada kiai atau guru, merelakan tubuhnya untuk disentuh di

bagian-bagian yang sensitif. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka merasa bangga karena merasa mendapatkan perhatian khusus dari sang kiai.

Para santri tersebut tidak pernah mengeluhkan pengalamannya. Saya paham mereka tulus dan bangga menjalannya. Tetapi melalui cerita seperti inilah ketaatan buta terjadi. Hasilnya, penyalahgunaan otoritas tidak bisa dihindari. Sehingga ketika terdengar oleh publik, pengalaman tersebut dianggap mencoreng nama baik pesantren. Pesantren yang dahulu dikenal sebagai tempat pendidikan moral dan spiritual, kini mulai dicurigai sebagai ruang yang tidak sepenuhnya aman bagi para santri. Ini bukan hanya menciptakan krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pesantren, tetapi juga menimbulkan dilema besar bagi mereka yang selama ini menjunjung tinggi nilai-nilai ketaatan, kedisiplinan, dan kemandirian yang diajarkan di pesantren.

Pertanyaan yang mungkin terlontar dari masyarakat ketika menyadari semakin banyaknya kasus kekerasan seksual di pesantren: Apakah mereka tidak bisa mengatakan "tidak" atas perlakuan tersebut? Jawabannya "bisa", tetapi apakah mereka mampu mengatakannya? Tentu tidak. Hal yang sama, jika pertanyaan ini diajukan kepada saya, saya juga akan mengatakan tidak mampu untuk menolak. Karena para santri yakin, di setiap kegiatan yang dilakukan atas permintaan seorang guru dan santri ikhlas untuk melakukannya, ada pahala ketaatan yang akan didapatkan. Jika pahala tersebut tidak dalam bentuk nilai baik di pesantren, pahala tersebut bisa jadi berbentuk kemudahan, kelancaran, atau keberkahan dalam hidup yang akan santri jalani nantinya.

Di sinilah pesantren memiliki peran penting sebagai ruang pembentukan intelektual yang khas. Ia bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan sebuah ekosistem budaya keilmuan yang kaya, di mana kitab-kitab klasik (*kutub al-turats*), sanad keilmuan yang bersambung hingga generasi

ulama terdahulu, serta petuah-petuah bijak para kiai menjadi fondasi utama dalam membangun nalar, karakter, dan identitas intelektual para santri. Tradisi mengaji kitab kuning dengan metode *sorogan* atau *bandongan*, menghormati otoritas keilmuan kiai, dan menjaga adab dalam belajar adalah bagian dari pembentukan intelektual yang bukan hanya mengedepankan kecerdasan rasional, tetapi juga membangun kedalaman spiritual dan etika keilmuan.

Saya harus mengakui, kekhasan nalar dan identitas inilah yang membentuk kombinasi unik dalam profil keilmuan para lulusan pesantren, terutama mereka yang kemudian melanjutkan karier di dunia akademik. Mereka membawa warisan keilmuan tradisional yang sarat nilai, yang tidak hanya berupa kumpulan teks, tetapi juga sebuah etos berpikir: keterhubungan dengan masa lalu, penghormatan pada otoritas ilmiah, dan kesabaran dalam proses belajar. Warisan ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan. Di satu sisi, santri dihadapkan pada tanggung jawab untuk menjaga autentisitas tradisi tersebut, mempertahankan nilai-nilai yang membentuk jati diri keilmuan mereka. Di sisi lain, ketika mereka memasuki dunia akademik modern, mereka juga dituntut untuk beradaptasi dengan paradigma baru: berpikir kritis terhadap teks, bersikap analitis terhadap tradisi, serta menawarkan solusi inovatif untuk tantangan-tantangan kontemporer.

Memasuki Dunia Akademik: Mengubah Cara Pandang

Saya beruntung dapat berkarier di dunia akademik, karier yang sebenarnya bisa saya prediksi. Ayah saya seorang guru, ibu saya pernah mengenyam pendidikan di sekolah guru, dan hampir seluruh anggota keluarga besar saya juga berprofesi sebagai pendidik. Sejak kecil, saya sudah membayangkan akan menjadi seorang guru di masa depan.

Saya tumbuh di keluarga seperti layaknya konstruksi keluarga Orde Baru. Ayah merupakan sosok yang memiliki

karakteristik “bapakisme”, di mana hubungan ayah dan anak sangat *hierarchical*, dengan ayah merupakan pemimpin di rumah yang harus dihormati dan dipatuhi secara mutlak. Sementara ibu, sebagaimana konsep “ibuisme”, beraktifitas penuh di rumah memenuhi kebutuhan suami dan anak.

Tentu saja keluarga saya tidak separah itu. Masih ada nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan, meskipun terbatas. Misalnya, ketika sedang memilih pendidikan setelah sekolah dasar, ayah mengatakan: boleh melanjutkan sekolah di mana saja yang penting di pesantren. Inilah yang saya maksud dengan demokrasi tetapi terbatas. Ayah menerapkan nilai-nilai ketaatan sejak dari rumah: untuk selalu mendengar dan mematuhi orang tua, tidak bertanya “kenapa?”, dan meyakini bahwa setiap permintaan orang tua adalah demi kebaikan dan masa depan anak-anaknya. Nilai-nilai ini yang membantu saya menjalani kehidupan pesantren tanpa banyak bertanya. “Patuhi saja, jalani, kamu akan paham dan selamat”, begitu kata-kata yang saya sematkan di kepala.

Tidak mudah memasuki dunia akademik. Melihat ke belakang, dunia pesantren yang telah membesarkan saya, mengajarkan apa arti diam dan patuh. Sementara di dunia akademik, saya dituntut untuk selalu berpikir kritis baik ketika mengajar, meneliti dan menulis. Di sini, berpikir kritis berarti memiliki kemampuan untuk secara tepat bertanya, mendefinisikan permasalahan secara jelas, secara objektif menganalisis informasi yang ada dan secara logis mengevaluasi fakta-fakta yang ada. Belum lagi tradisi kolegial yang juga kental di dunia kampus. Tradisi yang mengacu pada semangat kesetaraan dan kerja sama di antara pimpinan, dosen, staf dan mahasiswa.

Kemampuan ini tentu tidak mungkin diperlakukan di lingkungan pesantren. Di pesantren, gestur dan cara bicara terhadap kiai dan guru harus dijaga dan dilakukan hingga menjadi sebuah perilaku otomatis. Terutama bagi santri putri,

mereka mengalami internalisasi nilai ketaatan yang tidak bisa dilepaskan dari struktur gender, yang membuat santri memiliki kerentanan ganda. Rekan peneliti bercerita, santri di pesantren yang ia teliti akan secara otomatis berdiri dan menunduk ketika kiai atau guru mereka lewat sebagai bentuk ketaatan. Karena taat ini pula, santri tidak pernah berpikir untuk menolak permintaan atau perintah kiai. Saya teringat saat mendapatkan raut wajah santri yang kaget seolah tidak percaya ketika saya menanyakan, apakah mungkin perintah kiai atau guru kita tolak?

Meskipun demikian, beberapa perguruan tinggi masih ada yang menerapkan sopan santun *ala pesantren*. Tentu saja ini tidak terjadi di seluruh fakultas. Fakultas yang memiliki banyak mahasiswa lulusan pesantren dengan dosen yang masih enggan untuk meninggalkan tradisi tersebut, menjadi sebuah tradisi yang terbentuk secara sadar. Kejadian Ini saya alami sendiri ketika diundang ke salah satu universitas. Ketika sama-sama duduk di ruang dosen, seorang mahasiswa meminta izin untuk masuk menghadap dosen untuk keperluan akademik. Setelah menyampaikan salam, mahasiswa tersebut berjalan berlutut untuk menyalami dosen yang berada di ruangan tersebut satu persatu, termasuk saya. Saya tentu heran melihat ini. Saya bertanya-tanya “mengapa masih ada tradisi seperti ini di dunia kampus?”. Tentu saya risi melihatnya dan refleks saya mengatakan kepada mahasiswa tersebut untuk bangun dan berdiri. Praktik tersebut tentu tidak terjadi di semua kampus. Namun, pengalaman itu membuat saya merenung, apakah dunia pendidikan membutuhkan tradisi penghormatan semacam itu demi mempertahankan relasi guru-murid? Dunia akademik seharusnya jadi ruang berpikir setara, bukan tempat yang menghambat berpikir kritis dan kebebasan akademik untuk tumbuh. Saya bukan menentang sopan santun, tetapi ketika rasa hormat justru membuat kita takut atau merendahkan diri, kita perlu bertanya kembali, apakah itu masih relevan? Berpindah dari dunia pesantren ke

akademik bukan hanya soal ruang, tetapi juga soal cara kita berpikir dan memaknai otoritas.

Masuk ke dunia akademik membuat saya melihat kembali banyak hal yang dulu saya yakini sebagai kebenaran yang tak perlu dipertanyakan. Di pesantren, saya belajar bahwa diam dan patuh adalah bentuk penghormatan—and itu membentuk cara saya berinteraksi dengan ilmu dan otoritas. Tapi di dunia kampus, saya diajak untuk bertanya, berdiskusi, dan terkadang berbeda pendapat sebagai bagian dari proses mencari kebenaran. Bukan berarti saya menolak nilai-nilai pesantren, justru saya membawa nilai-nilai itu ke dalam ruang akademik dan mengajaknya berdialog. Saya belajar bahwa bertanya juga bisa menjadi bentuk hormat, bahwa berpikir kritis tidak selalu diartikan melawan. Dunia akademik memperluas cara saya memahami ilmu—bukan hanya sebagai hafalan dan kepuahan, tetapi sebagai proses yang hidup, yang mengajak kita terus menggali, menyimak, dan merawat kebenaran dengan cara yang jujur dan sadar.

Mengungkap Apa yang Salah dan Apa yang Bisa Dilakukan

Pesantren sering dilihat sebagai tempat paling aman bagi anak-anak untuk belajar agama dan membentuk akhlak. Tapi seperti lembaga lainnya, pesantren juga merupakan ruang sosial di mana relasi kuasa terbentuk. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren dibangun untuk menjadi tempat belajar bagi anak yang nyaman, sehingga dapat melahirkan lulusan yang memahami kebenaran dan nilai-nilai agama. Namun, saya menyadari bahwa dalam beberapa kasus, pesantren akhirnya membangun struktur kekuasaan dan ketaatan yang menjadi celah kerentanan terjadinya penyalahgunaan.

Sebagai “mantan” santri, saya tumbuh dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang datang dari guru adalah kebenaran yang harus diterima tanpa pertanyaan. Di masa

kecil saya, dan hampir semua orang, ketaatan dalam bentuk kesalehan menjadi nilai utama yang ditanamkan. Tetapi hari-hari ini, kasus-kasus kekerasan yang melibatkan otoritas di pesantren mulai muncul ke permukaan dan diberitakan media. Misalnya, salah satu ketua yayasan di pondok pesantren di Lombok yang dianggap Tuan Guru bagi santrinya, menyalahgunakan otoritas yang dimiliki. Ia dilaporkan melakukan kekerasan seksual terhadap 10 santriwatinya. Kasus ini menunjukkan, ketaatan yang dijalani dan dipahami tanpa pikiran kritis memberikan celah kerentanan terjadi. Ditambah lagi, tidak adanya mekanisme kontrol yang jelas, baik secara personal maupun institusional, sehingga celah penyalahgunaan kekuasaan bisa terjadi.

Penting untuk saya tekankan bahwa pengungkapan ini bukan untuk menyalahkan pesantren sebagai institusi, apalagi menyalahkan anak-anak. Sebaliknya, pengungkapan ini bertujuan agar pesantren dapat membenahi diri, sehingga tetap menjadi ruang belajar yang aman dan nyaman, dan tetap menjadi tujuan para orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Pendidikan seharusnya bisa menciptakan keseimbangan antara menaati dan mempertanyakan. Antara menghormati otoritas dan berani menguji kebenaran yang disampaikan otoritas tersebut. Taat tanpa nalar bisa menjebak seseorang dalam kepatuhan buta, sementara mempertanyakan tanpa dasar bisa mengarah pada pemberontakan yang tidak produktif.

Di titik inilah saya melihat pentingnya membangun ruang-ruang belajar yang tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga melatih keberanian untuk berpikir dan bertanya. Pendidikan seharusnya membebaskan. Bukan berarti membuang sopan santun atau adab, melainkan memberi fondasi moral yang kuat sekaligus membuka cakrawala berpikir yang luas. Di ruang seperti ini, santri dapat tetap menghormati gurunya tanpa kehilangan hak untuk bertanya;

dapat tetap belajar pada nilai-nilai kebaikan tanpa ragu menggunakan akal sehat dan rasa keadilan mereka.

Lalu apa yang bisa pesantren benahi? Salah satu hal yang perlu dibenahi pesantren adalah memberikan pemahaman bagi santri bahwa ketaatan dan kepatuhan memiliki ruang untuk bertanya. Melalui pemahaman ini, kesadaran bahwa penyalahgunaan terhadap otoritas mungkin terjadi dapat diwaspadai bersama. Selain itu, edukasi berkala mengenai sikap berlebihan terhadap ketaatan dapat menjadi celah terjadinya kekerasan seksual.

Pesantren perlu juga menanamkan nilai-nilai keagamaan yang substantif bagi semua pihak seperti pengasuh, guru, pengurus, dan santri, agar lebih sadar bahwa tindak kekerasan dapat terjadi kepada siapa saja dan oleh siapa saja. Penanaman nilai-nilai kepedulian juga perlu ditanamkan untuk menumbuhkan budaya sadar diri untuk melapor dan empati kepada korban ketika suatu pelanggaran terjadi. Sehingga, semua meyakini bahwa masalah kekerasan adalah masalah bersama, bukan hanya bagi keluarga korban.

Selain itu, pesantren dapat memperkuat pengawasan melalui pengawasan internal yang rutin dan transparansi untuk memastikan lingkungan pesantren aman dari kekerasan seksual dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Penguatan mekanisme pelaporan yang ramah korban, pelatihan kepada para pengasuh dan santri tentang kesadaran kekerasan seksual, serta kerja sama dengan pihak eksternal seperti lembaga perlindungan anak dan perempuan juga penting dilakukan untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan yang efektif. Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga contoh lingkungan yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keamanan, dan penghormatan terhadap setiap individu termasuk anak-anak.

Perlunya Keseimbangan Akal dan Moral

Melalui refleksi ini, saya belajar bahwa pesantren telah membentuk fondasi keagamaan dan identitas saya. Namun, saya harus meninggalkan pengalaman yang sempat menjadi bagian dari perjalanan hidup saya untuk diselami kembali, dilihat kembali ketika memasuki dunia akademik. Tradisi penghormatan santri terhadap guru merupakan tradisi luhur di pesantren yang menjadi kekuatan dan ketahanan santri. Tetapi, tradisi tersebut seperti dua mata pisau yang jika dimaknai dan dilakukan secara berlebihan dapat menjadi kerugian bersama. Ketika realitas kekerasan seksual di pesantren terungkap, saya dipaksa untuk membaca ulang masa lalu saya—bukan untuk menyangkal nilai-nilai baik yang saya dapatkan, tetapi untuk jujur terhadap sisi-sisi gelap yang selama ini terabaikan.

Pendidikan keagamaan perlu membuka ruang bagi pembentukan akal kritis dan kesadaran moral secara seimbang.

Dari perjalanan ini, saya memahami bahwa pendidikan keagamaan perlu membuka ruang bagi pembentukan akal kritis dan kesadaran moral secara seimbang. Pesantren harus berani membenahi diri, menumbuhkan budaya bertanya, melindungi hak-hak santri, dan menjaga integritas ruang belajar. Hanya dengan begitu, pesantren dapat tetap menjadi mercusuar pendidikan keagamaan yang tidak hanya melahirkan pribadi-pribadi saleh, tetapi juga individu-individu berdaya yang mampu berpikir jernih, bertindak adil, dan menjaga martabat sesama.

MENJAGA MARWAH PESANTREN

Refleksi Penelitian Kekerasan Seksual di Pesantren

Refleksi ini bukan akhir, melainkan ajakan untuk terus mendialogkan ketaatan dan keberanian berpikir demi membangun pendidikan yang berprinsip *do no harm* (tidak membahayakan) dan inklusif.

INTERAKSI YANG MENINGGALKAN JEJAK

• Dedy Ibmar

Tidak semua yang bermakna dapat dicatat, dan tidak semua yang terdengar dapat direkam. Ada interaksi yang tinggal lebih lama dari yang saya duga. Ia tidak menetap di alat perekam, tidak juga di baris-baris transkrip. Ia meninggalkan jejak jauh di luar catatan lapangan—mengendap diam-diam dalam tubuh, dalam pikiran, dalam cara saya memandang.

Bagian ini berisi tentang refleksi saya saat berbincang dengan anak-anak secara informal, wawancara mendalam kepada anak khususnya anak perempuan, berkunjung ke pesantren pelosok yang kuat dengan ritual adat. Karena bermukim selama beberapa hari di pesantren, saya tak dapat menghindari interaksi di luar wawancara. Dalam hal ini saya perlu memperhatikan kenyamanan dan persetujuan santri, serta melibatkan ustaz yang ditugaskan untuk menemani saya.

Interaksi-interaksi ini pada gilirannya bukan sekadar bagian dari proses penelitian. Ia terus hadir setelah wawancara usai, setelah data disimpan.

Interaksi dengan Lingkungan Pesantren

Saya berjalan dengan perlahan. Jembatan gantung yang telah miring karena salah satu talinya sudah terputus itu, perlu saya lalui dengan hati-hati. Dari tengah jembatan, terhampar batang-batang pohon yang lentur dan meliuk-liuk di kiri dan kanan sungai. Ketika angin tiba-tiba berhembus lebih kencang, daun-daunnya seakan-akan terbawa arus, bergoyang mengikuti irama angin.

Sudah hampir empat jam lamanya saya menyusuri jalanan yang tak bisa dilalui dengan kendaraan roda empat ini. Beberapa kali saya harus turun dari sepeda motor agar kawan saya—yang mengemudikan motor—dapat lebih mudah menyusuri jalanan bebatuan. Dan ketika harus melewati jembatan gantung yang miring ini saya lagi-lagi harus turun dari sepeda motor.

“Setelah jembatan ini, kita hanya perlu naik sedikit lagi” kata kawan ini, yang jauh-jauh hari sudah saya hubungi untuk membantu saya selama penelitian di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Lalu di mana kita bisa mendapatkan ayam putih?”

“Aman, Bung!” katanya.

Ia mengangguk pelan. Tak tahulah apa maksudnya. Saya senang saja apa pun maksud anggukannya.

Motor kami menanjak dan berbelok ke kanan. Pesantren sudah tepat di sisi kanan kami. Kami masuk ke sana. Segara saya lihat ustaz dan beberapa orang dewasa lainnya menyambut. Tetapi mata saya jatuh pada anak-anak yang sibuk dengan aktivitasnya, beberapa di antara mereka berjalan dengan membawa pakaian, beberapa lainnya sedang duduk-duduk di masjid.

Saya memasuki pesantren, menurunkan tas yang hampir seberat 20 kilogram dan ikut duduk di halaman masjid

pesantren. Tak lama, kawan saya masuk belakangan bersama tetua adat yang membawa ayam putih. Rupanya, kawan saya ini telah berkomunikasi dengan warga lokal untuk mencari seekor ayam putih.

Kini, di hadapan saya duduk tetua adat, pimpinan pesantren, beserta beberapa ustaz. Saya duduk berdampingan dengan kawan saya, dan terlebih dahulu diberi kesempatan oleh pimpinan pesantren untuk menyampaikan maksud dan tujuan saya datang ke pesantren.

Tetua adat memandangi saya sambil mengangguk. Tak lama, ia kemudian membaca doa dengan bahasa lokal yang tidak saya mengerti. Suaranya pelan, kadang-kadang bibirnya hanya terlihat bergetar-getar saja. Kedua tangannya memegang ayam putih yang juga tampak *khusyu* mendengarkan doa. Delapan hingga sepuluh orang yang duduk di belakang tetua adat, ikut berdoa bersama bapak tua itu.

Salah satu syarat agar saya diizinkan untuk bermukim di pesantren adalah saya harus meminta izin dan diterima secara adat melalui ritual adat. Konon, ritual ini diperlukan agar hal-hal jahat yang boleh jadi mengiringi saya selama di perjalanan tidak ikut menetap di pesantren.

Di desa ini, ritual merupakan pusat dari berbagai aktivitas sosial. Ketika seseorang meninggal dunia, warga akan menghentikan kesibukan mereka dan berkumpul. Hal serupa terjadi saat ada pernikahan, atau ketika tamu dari luar—seperti saya—datang dan tinggal sementara. Kehadiran selalu menjadi respons kolektif.

Tetua adat menjadi rujukan utama dalam urusan adat. Ia berperan layaknya konsultan yang membimbing pelaksanaan berbagai ritual, mulai dari urusan persembahan untuk kelancaran pernikahan hingga pemberian izin bagi tamu luar desa. Budaya telah mengakar kuat dalam kehidupan warga, dengan tetua adat sebagai sosok penuntun yang dihormati.

Bagi pesantren, tetua adat juga merupakan tempat bertanya. Bahkan dalam beberapa kasus, tetua adat juga terlibat dalam mekanisme operasional pesantren terutama jika berhadapan dengan para wali santri. Budaya telah lama hidup berdampingan dengan agama di lingkungan pesantren ini.

Karena penelitian kami punya keterkaitan dengan isu sensitif seperti kekerasan seksual di pesantren, tidak semua pesantren berkenan menerima kami. Beberapa dari mereka menolak untuk dikunjungi, beberapa lainnya tidak membalas pesan atau surat dari kami. Meski demikian, relatif banyak juga pesantren yang bersedia menerima kami. Tentu saja, dengan syarat dan isyarat tertentu yang harus kami hormati. Pesantren di NTT adalah satu di antaranya.

Interaksi dengan Anak Lelaki

Setelah menyalami dan mencium tangan saya, ia berdiri dengan gerak tertahan dan sedikit cemas.

Sore itu, seorang anak lelaki—dengan sarung dan kopiah yang agak lusuh—baru saja menjalani sesi wawancara mendalam di mana saya merupakan pewawancaranya. Dari caranya menjawab, kecanggungan dan kadang keraguan beberapa kali terasa di sela-sela sesi. Anak lelaki itu tampak tak terbiasa diwawancarai. Namun, saya berhasil membuatnya perlahan bercerita.

Lewat ceritanya yang disampaikan dengan keraguan namun kejujuran yang terasa, ia mengungkapkan banyak hal tentang kehidupannya di pesantren. Baginya, pesantren bukanlah tempat yang menakutkan atau berbahaya. Justru, ia memandangnya sebagai ruang pemulihan—tempat yang menyembuhkan luka-luka batin dan hati. Ia menaruh kepercayaan pada lembaga ini, dan juga pada sosok-sosok yang disebut ustaz—figur-firug terhormat yang dianggap berilmu dan bijaksana.

Namun sebagaimana yang juga dipaparkan dalam beberapa penelitian, pesantren juga dapat berubah menjadi ruang kekuasaan. Tempat di mana anak-anak beserta tingkah lakunya diawasi, diatur, dikendalikan, bahkan dilecehkan secara seksual. Kiai, ustaz, senior—atau siapa pun yang memiliki kuasa tertentu, tak lagi tampil sebagai pembimbing namun penguasa atas tubuh santri-santri. Dan penelitian kami menunjukkan bahwa sekitar 1,06% santri dari keseluruhan santri di Indonesia berada pada kerentanan yang semacam itu.

Anak lelaki itu kemudian mundur lima atau enam langkah dengan membungkuk, berniat untuk menghormati dan tidak membelakangi saya—sebuah praktik takzim yang relatif banyak dijumpai di pesantren.

Pada langkah mundurnya yang terakhir, saya kembali menangkap gerak tertahan di wajah anak lelaki itu. Seakan ada ketakutan yang menghunjam dalam dirinya, dan dengan sengaja isyarat itu ia cerminkan melalui sorot matanya. Satu hal yang saya tangkap dari sorot matanya ialah harapan agar saya menjaga kerahasiaan isi perbincangan kami.

Anak memiliki kecenderungan untuk lebih banyak diam dan hanya menjawab singkat mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam suatu wawancara, sebagaimana yang kami lihat dalam uji coba wawancara sebelum turun lapangan. Karenanya perlu pendekatan adaptif agar seorang anak merasa nyaman untuk bercerita perihal kisahnya di pesantren, apalagi kisah itu menyangkut kisah-kisah kelam.

Alih-alih langsung melakukan wawancara, saya cenderung memilih untuk terlebih dahulu melakukan interaksi-interaksi di luar wawancara. Misalnya berkenalan terlebih dan kemudian menemani mereka entah untuk bermain bersama atau sekedar berbincang-bincang di waktu luang mereka. Tentu dengan persetujuan mereka dan guru-guru mereka

di pesantren serta mempertimbangkan kondisi dan situasi memungkinkan.

Alhasil, di Lampung misalnya santri-santri bercerita relatif cukup panjang mulai dari pengetahuan tentang seksualitas, kesehatan reproduksi, hingga kekerasan dalam bentuk cambuk yang pernah ia lihat.

Interaksi-interaksi di luar wawancara, baik sebelum maupun setelah wawancara, berguna bukan sekedar agar mereka berani untuk berbicara melainkan juga untuk memahami lebih jauh sisi-sisi subjektif anak.

Di NTT, mulanya saya kesulitan memahami mengapa seorang anak dapat menjawab “nyaman” tinggal di pesantren, di mana kondisi pesantren tersebut masih amat sederhana dengan anggaran yang sangat minim. Saya melihat dan bahkan ikut tinggal di bilik-bilik ruangan yang terbuat dari papan dan bambu anyaman. Satu-satunya bangunan tembok di pesantren itu adalah masjid. Seorang donatur yang tidak diketahui namanya membangun masjid itu, kata pimpinan pesantren.

Satu hal yang sebelumnya tidak saya duga, kata “nyaman” di pesantren itu sungguh bukanlah sekedar basa-basi formalitas dalam menjawab pertanyaan, juga bukan sekedar buaian untuk menjaga nama baik pesantren. Pesantren itu sungguh telah memberi fasilitas yang bahkan tidak ada di desa itu seperti listrik yang menyala meskipun hanya beberapa jam di malam hari atau air yang melimpah di mana warga desa juga sering berkunjung ke pesantren itu untuk mendapatkan air.

Kemiskinan seakan menjadi sesuatu yang mengakar dan menyebar luas di desa itu. Tak sedikit keluarga yang tak sanggup membiayai pendidikan anak-anak mereka ke kota. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari pun banyak yang kesulitan. Dalam kondisi seperti itu, pesantren

menjadi pilihan yang masuk akal—tempat bernaung dan belajar bagi anak-anak dari keluarga tak mampu.

Pada suatu sore, saat saya bersama seorang ustaz muda dan seorang anak lelaki mencari kayu bakar—sebuah kegiatan rutin di mana para santri laki-laki bertugas mengumpulkan kayu sementara santri perempuan menyiapkan makan malam—saya sempat bertanya kepada anak itu sambil mengais-ngais tumpukan kayu, “Kalau sudah besar, kamu ingin jadi apa?”

Awalnya saya mengira anak itu akan menjawab dokter, polisi, atau pilot—jawaban umum yang sering diucapkan anak-anak ketika ditanya tentang cita-cita. Tapi ternyata tidak. Ia hanya tersenyum sebentar, lalu diam, kembali sibuk memainkan potongan kayu di tangannya. Mungkin ia sempat ingin menyebutkan salah satu profesi itu, tapi urung karena sadar akan realitas hidupnya. Ia tak memberi jawaban. Mungkin juga ia memang tak tahu harus menjawab apa. Cita-cita tampaknya adalah kemewahan yang hanya dimiliki anak-anak dari keluarga yang lebih mampu. Saya pun merasa bersalah telah mengajukan pertanyaan itu.

Menyelami sisi-sisi subjektif anak dengan pendekatan adaptif memang sangat berguna bagi setiap peneliti. Pendekatan adaptif yang saya maksud yaitu pendekatan yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan informan. Meski demikian, tak semua pesantren mengizinkan saya untuk menginap di pesantren. Di Sulawesi Tengah, pihak pesantren memberi saya izin masuk ke lingkungan pesantren hanya saat wawancara akan berlangsung. Dan karena itu, saya tidak memiliki banyak waktu untuk membangun relasi yang lebih dalam kepada para santri dan juga pihak pesantren.

Beberapa informan berbicara dengan lirih, seolah menguji apakah saya benar-benar bisa dipercaya. Ada juga yang memeluk diam, menolak bercerita, mungkin karena tidak ada

yang ingin dikatakan, atau mungkin juga karena terlalu banyak yang ingin dilupakan. Saya belajar untuk tidak memaksa. Saya belajar bahwa menjadi peneliti dalam konteks ini bukan hanya tentang mendapatkan data, tetapi juga tentang hadir sebagai manusia—yang tahu kapan harus bertanya, dan kapan cukup menemani.

Dengan cara ini, meskipun tidak banyak, saya masih mendapati beberapa santri yang dapat bercerita secara lugas tentang kehidupannya di pesantren. Termasuk cerita-cerita tentang aturan-aturan yang pernah mereka langgar seperti pacaran, menonton pornografi, hingga kasus mengintip santri putri—yang relatif tidak diketahui oleh pihak pesantren.

Interaksi dengan Anak Perempuan

Mulanya saya berpikir, tisu yang berbungkus-bungkus itu tak perlu berada dalam tas sebagai bagian dari perlengkapan saya menuju pesantren-pesantren di beberapa provinsi. Selain akan memakan tempat karena tas saya sudah dipenuhi belasan suvenir yang cukup besar dan banyak barang lainnya, *toh* rasa-rasanya tisu itu juga tidak akan berfungsi sebagaimana peruntukannya yakni untuk menyeka air mata yang jatuh. Citra Dwikasari—asisten peneliti PPIM UIN Jakarta—menyiapkan banyak tisu sebagai antisipasi bilamana informan saya terpaksa menangis.

Kini, tepat di hadapan saya, anak perempuan itu tidak saya duga benar-benar menangis sesengguhan pada pertanyaan yang saya lontarkan. Saya sendiri memang telah mempersiapkan diri untuk menghadapi momen seperti ini. Sebelum turun lapangan kami bahkan mendapat beberapa pembekalan seperti *child protection protocols* dan *psychological first aid*. Tetapi tetap saja, menenangkan anak perempuan yang menangis sungguh merupakan tantangan tersulit dalam penelitian ini.

Saya bertanya, dengan nada yang saya kira netral, tentang seberapa sering orang tua berkunjung ke pesantren. Pertanyaan yang, di benak saya, tidak tampak berisiko dibanding pertanyaan-pertanyaan yang lebih menjurus pada kekerasan seksual. Pertanyaan yang termasuk dalam pertanyaan awal, yang kami desain untuk melihat mekanisme pesantren menyediakan pertemuan antara wali santri dengan anaknya. Tetapi tak ada jeda panjang sebelum wajahnya mulai meneang, lalu matanya basah. Suaranya tercekat. Ia menunduk, menutup sebagian wajah dengan kerudungnya.

“Ayah sudah tidak ada...” katanya pelan, di antara isak.

Saya terdiam. Tisu-tisu itu, yang saya pikir tak berguna, akhirnya berpindah dari tas ke genggaman. Saya sodorkan perlahan, tak berkata apa-apa. Ini bukan waktu untuk memburu jawaban, apalagi melanjutkan daftar pertanyaan. Saya biarkan suasana hening mengambil tempat.

Di dalam kepala, saya mencari ulang semua protokol: *do no harm, active listening, psychological first aid*. Tetapi di luar kepala, yang ada hanya hati yang ikut tercekat, dan tubuh saya yang mencoba tetap duduk tenang, meskipun ada dorongan kuat untuk minta maaf telah menyentuh luka yang mungkin belum mengering. Dari sudut ruangan, ustaz dan asisten peneliti saya terlihat ingin mendekatinya dan bertindak, tetapi saya memberi isyarat agar mereka membiarkan anak perempuan ini sejenak, memberi ruang dan waktu untuknya.

Kami duduk dalam diam selama beberapa menit. Saya menunggu isaknya sedikit reda. Ia akhirnya berkata, masih pelan, “Maaf kak.”

Saya hanya menjawab tidak mengapa. Ia boleh menangis. Saya bahkan ingin menghentikan wawancara. Dalam pelatihan, saya diajarkan bahwa respons emosional yang kuat adalah tanda untuk memberi ruang, bukan menggali lebih dalam. Tapi sebelum saya sempat berkata apa-apa,

ia menyeka matanya, menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang mulai stabil, “Ayo lanjut kak.”

Wawancara pun kami lanjutkan, tetapi nadanya telah berubah. Tak lagi sekadar tanya-jawab, melainkan menjadi percakapan. Ia bercerita dengan ritme yang lebih pelan. Tentang sahabatnya di pesantren, tentang suka duka hari-harinya, dan tentang ibunya, yang katanya suka membawakan makanan kesukaan tiap kali datang berkunjung. Ia tak menangis lagi, tapi saya tahu rasa kehilangan itu belum benar-benar pergi—hanya sedang ia pelajari untuk ditata.

**Tentang
bagaimana
pertanyaan
penelitian,
betapa pun hati-
hatinya, tetap
bisa menyentuh
titik-titik rapuh
yang tidak
terduga.**

Kepada anak perempuan itu, saya tidak banyak mendapatkan catatan lapangan yang terkait dengan fokus utama penelitian kami. Tetapi sepertinya, saya belajar paling banyak darinya. Tentang bagaimana pertanyaan sederhana bisa membangkitkan kehilangan yang dalam. Tentang bagaimana pertanyaan penelitian, betapa pun hati-hatinya, tetap bisa menyentuh titik-titik rapuh yang tidak terduga. Dan tentang mengapa, rupanya, lembar tisu bisa menjadi lebih penting dari lembar pertanyaan.

Beberapa hari setelah pertemuan itu, saya mendatangi pesantren lain di provinsi lain. Kali ini di Lampung, saya merasa lebih siap—atau paling tidak, saya berharap begitu. Tetapi ternyata, tantangan lain menanti. Bukan tentang duka, melainkan tentang keheningan yang kaku.

Saya duduk berhadapan dengan seorang santri perempuan, mencoba mencairkan suasana dengan obrolan ringan

tentang makanan kantin dan aktivitas sore. Wajahnya ramah, tetapi saya bisa merasakan batas yang rapat. Saat saya mulai menyentuh topik yang lebih sensitif—seputar pengalaman perempuan tinggal di pesantren, tentang kesehatan reproduksi, dan bagaimana mereka mengelola kebersihan—ia tampak mulai gelisah.

Pertanyaan-pertanyaan itu memang perlu. Tetapi menyampaikannya sebagai laki-laki kepada perempuan berusia sekitar 17 tahun bukan hal sederhana. Kata-kata, intonasi, bahasa tubuh, bahkan jeda bicara—semuanya saya pikirkan bahkan saya latih sebelum turun lapangan. Dan sebagaimana latihan-latihan saya, saya mengajukannya dengan bahasa yang netral—seolah itu adalah hal biasa, percakapan wajar antara peneliti dan seorang anak. Saya tak berbicara dengan nada sensasi, tak juga menampakkan bahwa topik itu tabu. Saya tahu, jika saya menunjukkan keraguan atau ketegangan, ia bisa menangkapnya, dan percakapan akan segera membeku.

Saya memilih kata-kata yang ringan, datar, tetapi tetap jelas. Saya menghindari kalimat yang berputar-putar khas mahasiswa filsafat. Dalam wawancara seperti ini, justru kesederhanaan adalah strategi. Dan kesan “biasa saja” bisa menjadi jembatan agar santri merasa aman untuk bercerita.

Interaksi dengan Diri Sendiri

Dunia pesantren bukan sekadar objek studi. Ia adalah ruang hidup saya dahulu—tempat saya belajar membaca kitab, menundukkan ego, dan mencintai dengan cara diam. Pengalaman itu memberi saya bahasa dan gestur untuk masuk. Saya tidak datang sebagai orang asing. Tetapi justru karena itu, beban yang saya bawa terasa jauh lebih rumit.

Kedekatan saya dengan dunia pesantren membuka banyak pintu. Beberapa informan bersedia berbicara lebih terbuka karena merasa berbagi latar belakang yang sama.

Di saat yang sama, saya pribadi juga tidak merasa kesulitan dalam adaptasi hidup dan tinggal di pesantren—meski pesantren itu berada di pelosok daerah, tanpa jaringan listrik maupun telekomunikasi. Saya tahu bagaimana dunia itu bekerja—apa yang boleh dikatakan, dan apa yang harus disimpan rapat. Kedekatan itu akhirnya merupakan keuntungan, sekaligus beban.

Maka, misalnya, ketika seorang santri lelaki menatap saya dengan ragu setelah bicara, saya bisa membaca lebih dari yang ia ucapkan. Dalam suaranya ada ketakutan, tetapi juga ada harapan. Harapan bahwa saya, orang luar yang kebetulan pernah jadi orang dalam, bisa menjadi tempat aman.

Saya mengangguk, seolah berkata: “Kamu bisa percaya padaku”. Tapi justru di situlah kegelisahan saya dimulai.

Di tempat yang lain, beberapa hari setelah wawancara itu, saya melakukan wawancara mendalam dengan seorang ustaz pengasuh. Obrolan kami ringan, sampai akhirnya ia bertanya: “Kalau ada santri yang melakukan hal tak pantas, tolong laporkan ya?” Saya tersenyum, tetapi tidak langsung menjawab. Sebab jawaban saya, apa pun itu, pasti salah.

Sebagai konteks, selama wawancara berlangsung akan ada ustaz yang mendampingi anak. Namun beberapa kali saya mendapati momen anak mengecilkan suaranya, atau melihat ke kiri dan ke kanan, dengan maksud agar suaranya tidak terdengar oleh ustaz pendampingnya.

Dan jika saya melaporkan, saya melanggar *informed consent*—lembar persetujuan. Saya mengkhianati kepercayaan informan saya yang jelas-jelas dapat bercerita secara lugas karena adanya garansi kerahasiaan. Tetapi jika saya diam, saya mungkin saja membiarkan hal buruk berlanjut. Saya tahu ada kemungkinan bahwa cerita yang saya dapatkan bukan peristiwa satu-satunya. Tapi bagaimana jika saya salah

menafsirkan? Bagaimana jika membuka suara justru membahayakan si anak?

Di titik itu, saya tidak lagi merasa sebagai peneliti. Saya merasa sebagai manusia biasa yang bingung harus berdiri di sisi mana. Akademi mengajarkan bahwa menjaga kerahasiaan adalah kewajiban etis. Tapi nurani saya terus mengajukan pertanyaan: Bagaimana jika diam berarti pemberian atau bahkan persekongkolan?

Sesaat, saya sempat teringat pada sosok Raskolnikov dalam *Crime and Punishment* (1866) karya Dostoyevsky. Ia pernah meyakini, dalam pikirannya sendiri, bahwa sebuah pelanggaran kecil, bila dilakukan demi tujuan besar, adalah sah. Tetapi yang terjadi bukanlah pembebasan, melainkan kesendirian yang pekat. Luka batin yang makin menggerogoti. Semua alasan “rasional” itu—seolah logis, masuk akal—tetapi justru menuntunnya pada kehancuran di dalam dirinya sendiri.

Saya pun bertanya dalam hati:

“Jika saya memilih berbicara, apakah itu bentuk tanggung jawab, atau sekadar kedunguan yang dibalut rasa heroik?”

“Jika saya memilih diam, apakah itu penghormatan terhadap etika, atau pengecut yang dibenarkan oleh prosedur?”

Saya tidak segera mengambil keputusan. Saya mencatat, merenung, dan berdiskusi dengan rekan sesama peneliti. Dan pada akhirnya, saya memilih untuk memegang perjanjian awal dengan informan dan tidak melaporkannya secara langsung kepada pihak pesantren terkait. Bukan karena saya menutup mata terhadap hal buruk, bukan pula karena saya ragu terhadap pihak pesantren (terlebih dalam penelitian kami, selain kerentanan kami juga menemukan banyak keterhanan pesantren yang ramah terhadap anak), tetapi karena saya sadar: kepercayaan yang sudah diberikan itu rapuh. Dan,

MENJAGA MARWAH PESANTREN

Refleksi Penelitian Kekerasan Seksual di Pesantren

jika saya merusaknya, saya bisa saja menutup pintu bagi para santri lain yang mungkin juga ingin bicara.

Dan, tanpa menyebut identitas informan dan pesantren, kami menuliskan temuan-temuan semacam itu dalam bentuk laporan penelitian. Kami kemudian menyuarakannya di ruang-ruang diskusi kepada pemangku kebijakan serta organisasi dan instansi terkait sembari mempertahankan prinsip kerahasiaan.

Akhirnya, dalam refleksi saya, riset ini bukan hanya soal menemukan fakta. Ia adalah perjumpaan antara dua dunia: dunia metodologi yang ketat, dan dunia manusia yang retak. Dan saya berada di tengah-tengahnya—dengan pena yang kadang ragu, dengan hati yang kadang gelisah.



5

STIGMA DAN CERITA DI BILIK PESANTREN

 Savran Billahi

Berbagai kasus kekerasan seksual di pesantren yang muncul ke publik menimbulkan banyak pertanyaan tentang ruang aman pesantren. “Apakah pesantren aman dari kekerasan seksual?”, “apakah tidak masalah jika putra atau putri kami tempatkan di pesantren, ia harus tidur berbarengan dengan temannya yang lain hingga berbagi kamar mandi dan toilet?”, “bagaimana hubungan yang ideal antara sesama santri, dan juga dengan para gurunya, sementara orang tua tidak bisa memantauanya setiap hari?”

Di Nusa Tenggara Barat (NTB)—di mana laporan kasus kekerasan seksual meningkat—narasi dan pertanyaan ini nyata adanya, ditanyakan langsung kepada saya oleh beberapa kenalan baru saya. Pertanyaan-pertanyaan ini sekilas seperti menyudutkan pesantren dengan segala kelebihannya. Namun, dengan kenyataan yang ada, tidak salah juga jika ada yang bertanya soal itu. Ini menjadi otokritik atau evaluasi bersama untuk menguatkan pesantren sebagai institusi

pendidikan yang asli (*genuine*) Indonesia dan sudah terbukti zaman.

Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang-ruang pesantren seperti membuka kotak pandora yang isinya bisa mengubah citra pesantren secara umum. Orang-orang tak lagi bertanya dengan pasti, “Ilmu apa yang akan kamu cari di pesantren x?” Melainkan bertanya memastikan, “Apakah pesantren x aman untuk putra/putri kami?”

Salah satu cerita kasus yang saya dengar langsung sangat menyayat hati. Bagaimana tidak? Setidaknya 20 santri perempuan mengalami pelecehan dan kekerasan seksual dengan modus “kerahiman suci” dari pelakunya yang merupakan pemimpin pesantren. Jika korban menginginkan keturunan suci, ia harus menerima air “dzuriyat” (air mani) dari pelaku. Dan, pelecehan itu terjadi di ruang pesantren.

Saya mendengar cerita ini saat mengunjungi salah satu lembaga setempat yang aktif mengurus kasus kekerasan seksual. Banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual di NTB terjadi di ruang-ruang pesantren. Modusnya berbagai macam. Pada kasus yang menggunakan modus “kerahiman suci” itu, pelaku memanggil korban satu per-satu untuk kemudian melampiaskan hasrat bejatnya. Adalah ironi, tindakan penyelewengan itu terjadi di rumah pelaku, dan dilakukan ketika istri sahnya berada di luar rumah! Di sini ada aspek ruang dan waktu yang mendorong kesempatan terjadinya kekerasan seksual.

Cerita-cerita sejenis saya dengar dari semua informan saya di Mataram. Saat saya sedang berbincang dengan salah satu informan di kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) NTB, tiba-tiba datang seorang remaja perempuan turun dari mobil dengan mimik muka dan gestur yang pasrah menunduk, berpakaian santri didampingi beberapa orang.

“Ini kasus baru, mas. Kami sedang tangani,” ujar informan saya itu.

Informan saya adalah seorang dosen di sebuah kampus di Mataram dan sudah lama aktif menangani kasus kekerasan seksual. Melihat tatapan kosong perempuan remaja itu, saya menyimpan banyak pertanyaan. Tetapi saya menyadari posisi saya sebagai peneliti yang dipagari etika-etika penelitian, saya lebih menahan diri. Saya memilih untuk mempercayakannya kepada petugas UPTD PPA dan kepolisian yang sangat kooperatif dan progresif menangani kasus-kasus kekerasan seksual di NTB.

Melihat Lebih Luas

Sebagai seseorang yang pernah *nyantri* selama enam tahun di dua pondok pesantren, di Madura dan Banten, saya relatif paham dengan ruang-ruang di pesantren dan bagaimana interaksi yang khas di dalamnya terbentuk. Saya mafhum bahwa ruang-ruang pesantren, selayaknya lembaga-lembaga pendidikan berasrama lainnya, memang mendorong peluang untuk memunculkan potensi pelecehan maupun kekerasan seksual.

Meski mafhum dengan kondisi itu, dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi, saya selalu bertanya, apakah potensinya sebesar itu? Bertahun-tahun, bukankah sudah terbukti kiai/nyai, para guru (ustaz dan ustazah) mendidik para santri, dan banyak menghasilkan cerita sukses, karena itu pesantren menjadi kebanggaan tersendiri untuk Indonesia? Apa yang salah? Pertanyaan-pertanyaan itu bermunculan di benak saya.

Dengan kasus-kasus yang bermunculan, akhirnya tidak sedikit pihak yang ingin menyelamatkan citra pesantren itu dengan membuat standar khusus bagaimana seharusnya ruang-ruang pesantren diatur dan dibangun. *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, misalnya, mengharuskan

pesantren memiliki fasilitas yang memungkinkan pengayoman keluarga santri/wati; anak tidak tidur di atas kasur yang sama; pekarangan yang luas; tersedianya ruang aman, nyaman, bersih, sehat, inklusif, dan kondusif; serta tersedianya ruang yang memberikan kesempatan santri menyampaikan aspirasi (UNICEF 2015).

Kementerian Agama (Kemenag) juga tidak kalah terlibat dengan membuat pedoman Pesantren Ramah Anak. Dalam standar sarana prasarana ideal Kemenag, pesantren setidaknya perlu memiliki beberapa fasilitas berikut: gedung pesantren; pondok atau asrama, kantor, ruang belajar mengajar, ruang pengaduan, mushala/masjid, perpustakaan, klinik, tempat makan, dapur, kantin, tempat bermain dan pengembangan minat bakat, halaman/kebun/taman, jalan menuju ke pesantren, instalasi sanitasi, instalasi listrik, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, toilet, air bersih, sirkulasi udara, dan sarana komunikasi.

Dalam penjelasannya, Kemenag menurunkan beberapa rincian, antara lain, gedung pesantren yang tidak berada di zona bencana dan memiliki fasilitas mitigasi; gedung pesantren mudah dijangkau masyarakat, termasuk dengan moda transportasi umum; fasilitas yang memadai untuk keamanan dan pencegahan penyakit menular; toilet yang terpisah secara jenis kelamin dengan rasio yang memadai, bersih, pencahayaan dan ventilasi cukup (30% dari luas lantai); higienis (tersedia tempat sampah terpilah, memiliki saluran air limbah yang tidak mencemari lingkungan, memiliki tempat cuci tangan dengan air bersih, dan memiliki sistem penyaluran air hujan yang berfungsi baik); pencahayaan yang cukup di kamar tidur; tersedianya fasilitas kamar (kasur, bantal, selimut, kursi, meja belajar, kunci kamar, dan kunci laci); ada petunjuk darurat; kantor pesantren yang memadai; ruang kelas memiliki kapasitas yang proporsional dengan jumlah santri, memiliki ruang *indoor* dan *outdoor* untuk bermain dan

belajar; tersedianya ruang pendidikan dan pengajaran (posko kesehatan, tempat ibadah, kebutuhan informasi).

Mencari Standar Ideal: “Pesantren Surga”?

Dalam rapat-rapat kami di kantor Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, kami mendukung pedoman Pesantren Ramah Anak tersebut. *Walakin*, ada yang selalu mengganggu pikiran saya, “bukankah pesantren lazimnya diciptakan untuk menguatkan semangat kemandirian dan keberanian santri, dan karenanya ruang-ruang pesantren adalah wajar dibangun selayaknya ‘tempat penataran’?”

Lagi pula, berbeda dengan sekolah, secara historis, pesantren dibangun swadaya oleh warga. Sering kali bahkan tidak terkonsep. Ada rezeki untuk bangun satu kelas, ya dibangun untuk kelas itu. Suatu saat ada sedekah dari warga dan cukup, dana sedekah itu bisa jadi akan dialokasikan untuk tambahan sarana lain.

Mengutip Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Basnang Said, sulit untuk pesantren memenuhi semua kriteria ruang yang termaktub pada pedoman-pedoman yang dibuat UNICEF maupun Kemenag.

“Kalau seperti itu (mengikuti pedoman), itu pesantren surga,” kata Basnang menjelaskan kemungkinan kecil pesantren dapat memenuhi kriteria-kriteria itu, yang sering saya dengar jika ia menjelaskan tentang kriteria pesantren ramah anak.

Dua pesantren tempat saya belajar pada awalnya bahkan dibangun dari dapur tua yang dibagi untuk kelas dan kamar. Jika merujuk pedoman-pedoman itu, tentu “tidak ramah anak”. Pesantren tempat saya *nyantri* itu baru berkembang

pesat dua dekade kemudian setelah berdiri, dibangun secara swadaya dengan dukungan masyarakat.

Di Madura, salah satu pesantren yang saya *mukimi* selama tiga tahun, pada awalnya minim penerangan. Bahkan pada tahun-tahun awal setelah Maghrib, lampu harus dimatikan. Jika ingin belajar, santri perlu menyalakan lilin. Kiai Idris, pemimpin pesantren tempat saya *nyantri* itu, menurut cerita para alumni, setiap minggu pernah secara rutin meletakkan bakul beras ke rumah-rumah warga untuk seminggu ke depan ia ambil sebagai bahan makanan santri. Pun saat ini, kedua pesantren tempat saya *nyantri* itu menjadi salah satu pesantren terbesar di Indonesia, juga masih jauh dari kata mewah. Tidak atau setidaknya belum memenuhi semua kriteria pesantren ramah anak UNICEF maupun Kemenag.

Semangat kemandirian itu agaknya menjadi karakter kuat pesantren. Tidak salah banyak pesantren memang yang dibangun “ala kadarnya”. Beberapa pesantren yang kami kunjungi juga tidak sedikit yang “ala kadarnya” itu. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, kami menemui pesantren “ala kadar”-nya itu, jauh dari kota dan keramaian. Kawan peneliti saya, Dedy Ibmar, perlu berkontak jauh-jauh hari dengan peneliti lapangan di sana, karena rencana perjalanan penelitian perlu dengan persiapan yang lebih matang. Turun dari bandara ia menginap di kota sehari, kemudian esoknya melanjutkan perjalanan ke lokasi, perlu menempuh perjalanan darat hingga empat jam menggunakan sepeda motor.

Ia menyewa dua motor, satu untuk asisten dan satu lagi untuk dirinya dan asisten lainnya, karena medannya tidak bisa dilewati mobil. Ada jembatan gantung kayu yang sempit yang bahkan ia perlu menuntun motornya agar lebih hati-hati karena sudah rapuh. Perjalanan menuju lokasi ia akui terasa berat, terlebih ia membawa tas gendong *carrier* yang biasa digunakan para pendaki gunung.

Saat mencapai lokasi, ia dihadapkan pada fakta sarana dan prasarana pesantren yang minim. Pesantren hanya memiliki empat kamar tidur untuk santri, dua untuk santri putra dan dua lainnya untuk santri putri. Itu pun dengan materi bangunan anyaman kayu, sehingga jika tidur, jika angin sedang kencang, dari luar dapat sepoi-sepoi menerobos masuk dari bilik-bilik. Karena pesantren juga menerima santri dari tingkat sekolah dasar, ada kasus santri mengopol. Kamar mandi dan toilet berada di lokasi berbeda dengan kamar tidur. Sementara, ruang kelas hanya tersedia dua lokal, meski lokasi lain, seperti teras kamar, dapat juga difungsikan sebagai kelas.

Pada dasarnya, pesantren di NTT itu jauh dari segala kriteria pesantren ideal UNICEF dan Kemenag. Meski demikian, kami secara hati-hati tetap kategorikan pesantren itu sebagai “moderat”. Artinya, cukup memiliki ketahanan dari pelecehan maupun kekerasan seksual.

Pesantren ini tidak memiliki area yang luas, sehingga semua ruangan di pesantren ini bersifat terbuka. Relatif tidak ditemukan stimulasi yang padat (*overloaded*) atau kekurangan (*deprived*). Namun, masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi agar sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai pesantren moderat sepenuhnya. Pesantren di NTT itu belum menyediakan ruang-ruang khusus untuk santri mengekspresikan minat dan bakatnya.

Kami kategorikan moderat, karena di antaranya, berdasarkan keterangan santri dan penelusuran lanjutan ke warga sekitar, fasilitas di pesantren NTT itu setidaknya lebih baik dibandingkan rumah-rumah keluarga santrinya sendiri. Ada kesan, para santri dan warga sekitar menganggap fasilitas pesantren lebih “mewah” dibandingkan tempat tinggal mereka, meskipun secara umum terlihat jauh dari mewah. Pada kasus ini, kami memperhitungkan pendekatan interseksionalitas, terutama subjektivitas relatif dari masyarakat pesantren.

Pesantren di NTT itu juga mencerminkan ruang budaya masyarakat setempat, sehingga masyarakat sekitar merasa memiliki pesantren. Kawan saya yang terjun langsung ke lokasi, pada hari pertama perlu membeli ayam putih untuk dibawa ke upacara adat, karena ia baru pertama kali memasuki wilayah desa dan pesantren yang berada di desa itu. Di pesantren itu, tetua adat cukup berperan menjadi penyelesaikan masalah. Keberadaannya juga menjadi titik temu masyarakat berkumpul. Mereka merasa memiliki pesantren karena merasa terbantu dengan kehadirannya dalam mendidik anak mereka di tengah keterbatasan pilihan.

Dengan terjun langsung ke pesantren-pesantren, kami memahami bahwa standar ideal pesantren ramah anak yang disusun UNICEF dan Kemenag bisa saja dicapai, namun bisa jadi pula tidak selalu kompatibel. Sebab, karakter kemandirian pesantren menjadikan tiap pesantren memiliki keberagaman yang khas. Bisa jadi secara objektif suatu pesantren terkesan tidak memiliki ruang atau fasilitas yang ramah anak, namun ada unsur subjektivitas relatif dari masyarakat pesantren dan kondisi pesantren yang perlu dipertimbangkan.

Untuk menentukan standar tertentu, agak kurang adil memang jika hanya satu arah. Aspek interseksionalitas, termasuk memahami apa yang dirasakan oleh subjek riset kami perlu diperhitungkan. Dan, untuk riset ini, PPIM UIN Jakarta memiliki kelebihan tersendiri. Bukan narsistik, melainkan latar belakang para peneliti yang terlibat menjadi nilai tambah tersendiri. Karena, selain memiliki rekam jejak dunia akademik yang mumpuni, hampir semua peneliti memiliki latar belakang pendidikan pesantren. Selain sebagai “orang luar” atau *outsider*, peneliti juga dapat berperan sebagai “orang dalam” atau *insider*.

Isu kekerasan seksual agaknya tidak jarang berada pada kondisi hipokognisi—kekurangan ide-ide yang dibutuhkan atau konsep yang relevan untuk menjelaskan suatu

isu—sehingga masyarakat tertentu, seperti pesantren dapat bersikap acuh atau bahkan resisten terhadap masalah yang serius ini. Sebelum kami memulai penelitian, kami banyak mendengar bahwa penelitian kami yang berfokus pada masalah kekerasan seksual di pesantren adalah sesuatu yang sulit. Banyak pihak yang enggan melakukan riset dengan topik ini. Namun, dengan peran ganda peneliti sebagai *outsider* dan *insider* kami mampu membuat pihak pesantren menerima peneliti, dan menjadikan isu kekerasan seksual menjadi lebih kaya pendekatan, termasuk dalam menilai ruang aman pesantren.

Ini relevan dengan pertimbangan teori stimulasi (*stimulation theory*) yang mempertimbangkan banyak hal. Berdasarkan teori stimulus, frekuensi dan durasi stimulasi berlebihan yang dihasilkan dari sebuah ruang dapat memberikan dampak yang negatif. Di sebagian pesantren, fitur spasial mencerminkan stimulasi positif yang moderat, namun di sebagian pesantren lain menunjukkan stimulasi negatif dengan karakter lingkungan yang memicu perasaan ketidaknyamanan karena terlalu banyak rangsangan yang melebihi kapasitas individu untuk memprosesnya (*overloaded*).

Stimulasi atau rangsangan itu dapat timbul dari kamar tidur yang terlalu padat atau sebaliknya, kondisi masyarakat dan budaya, perasaan tidak nyaman karena kurangnya fasilitas yang mendukung kenyamanan emosional atau fisik (*deprived*), sehingga muncul perasaan kesepian, terisolasi, atau terkekang.

Stimulasi yang berlebihan atau *overloaded* dan kekurangan atau *deprived* dapat membuat pesantren rentan dari pelecehan dan kekerasan seksual. Sebaliknya, stimulasi yang moderat dapat membuat pesantren memiliki daya tahan dari pelecehan dan kekerasan seksual.

Saat kami mengobservasi secara langsung dan kemudian menganalisisnya, kami sangat memperhatikan bagaimana stimulasi-stimulasi yang ada di pesantren, baik suatu hal yang disadari oleh masyarakat pesantren maupun tidak, memengaruhi perasaan dan interaksi mereka. Kami kategorikan setidaknya menjadi dua, yaitu pesantren yang memiliki ruang-ruang yang moderat atau artinya memiliki ketahanan dari kekerasan seksual dan pesantren yang memiliki ruang-ruang yang kurang atau tidak moderat, sehingga rentan terhadap kekerasan seksual. Pesantren yang kami kategorikan tidak moderat bisa berarti memiliki stimulasi yang berlebih (*overloaded*) atau kekurangan (*deprived*).

Keterbatasan yang Tidak Memicu Kerentanan

Banyak yang berasumsi bahwa pada dasarnya pesantren adalah ruang yang rentan karena eksklusivitasnya. Pada umumnya, di pesantren yang sudah eksklusif itu terdapat banyak ruang privat, hanya boleh dimasuki oleh masyarakat pesantren, seperti kamar santri yang pada umumnya tidak boleh dimasuki oleh masyarakat luar pesantren, termasuk orang tua santri sekalipun, atau rumah kiai/nyai yang akses ke dalamnya sering kali tertutup.

Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, tetapi tidak sepenuhnya benar pula. Ruang-ruang privat seperti itu adalah suatu keniscayaan di pesantren. Dengan karakter pesantren seperti itu, kita perlu memahami bahwa pihak pesantren juga sering kali ingin mendidik para santrinya untuk bisa mandiri dan tangguh.

Meski demikian, kita tidak dapat memungkiri bahwa pada banyak kasus, kekerasan seksual terjadi di ruang-ruang privat itu. Namun, apakah sarana prasarana yang memadai tidak cukup untuk mencegah pelecehan maupun kekerasan seksual? Atau, apakah pesantren kecil yang memang lebih rentan? Yang membingungkan, terkadang kasus kekerasan

seksual terjadi pada pesantren besar yang dari luar terkesan memiliki fasilitas yang memadai. Tetapi, kerap kali terjadi juga pada pesantren-pesantren yang memang tidak memiliki fasilitas memadai.

Lantas, jika melihatnya dengan pendekatan hubungan ruang dengan kekerasan seksual, apa yang membuat pesantren dapat rentan atau sebaliknya, memiliki daya tahan?

Kami tidak buru-buru menyimpulkan bahwa jika suatu pesantren memenuhi standar pedoman-pedoman yang disebutkan di atas tadi, maka pesantren memiliki daya tahan. Selain mempertimbangkan faktor budaya dan subjektivitas relatif, bagi kami adalah juga penting mempertimbangkan keterhubungan antar-bangunan dan antar-jalan di suatu pesantren.

Rumah kiai dapat menjadi rentan atau tidak jika mempertimbangkan bagaimana posisi rumah itu di antara ruang-ruang pesantren lain. Jika rumah kiai atau ruang-ruang privat lainnya saling terhubung dengan jalan-jalan atau bangunan-bangunan di pesantren, kerentanannya dapat berkurang, bahkan cenderung memiliki daya tahan. Sebaliknya, jika rumah kiai atau ruang-ruang privat lainnya tidak terhubung dengan jalan-jalan atau bangunan-bangunan di pesantren, kerentanannya dapat meningkat.

Saat saya mendatangi salah satu pesantren di Kalimantan Selatan, pada awalnya saya punya asumsi bahwa pesantren itu memiliki kerentanan. Pertama, karena lokasinya yang cukup jauh dari pusat keramaian, meskipun di sekelilingnya ada perkampungan kecil. Kedua, secara mendasar pesantren itu belum memenuhi standar ideal UNICEF dan Kemenag. Namun, anggapan saya di awal itu ternyata kurang tepat. Meskipun, fasilitas-fasilitas di pesantren itu belum ideal, bangunan-bangunan dan jalan-jalan di pesantren itu

saling terhubung, sehingga kami kategorikan pesantren di Kalimantan Selatan itu sebagai moderat.

Pesantren rintisan tidak serta-merta menjadi rentan. Dengan tata kelola yang memerhatikan keterhubungan jaringan jalan dan bangunan menjadikan pesantren memiliki daya tahan karena memungkinkan pengawasan alamiah.

Kesempatan beberapa hari mengobservasi pesantren di Kalimantan Selatan itu, saya memanfaatkannya untuk secara cermat mengamati ruang-ruang di pesantren. Di pesantren itu, hampir semua ruangan menghadap ke halaman tengah pesantren. Baik kantor sekretariat pesantren, kelas-kelas, kantin, hingga kamar-kamar (terutama kawasan santri putra) menghadap ke halaman utama pesantren. Hal ini memungkinkan pengawasan alamiah. Setiap masyarakat pesantren bisa saling melihat aktivitas sesama mereka secara langsung, meskipun tetap terdapat ruang privasi seperti kamar mandi atau asrama putri yang hanya dibelakangi ruang kantin. Dengan tata letak bangunan

dan jalan seperti itu, santri atau masyarakat pesantren lainnya juga memiliki ruang pelarian bila terdapat kasus pelecehan maupun kekerasan seksual.

Sebaliknya, teman kami, Narila Mutia, di Sumatera Barat menemukan pesantren yang secara fasilitas lebih baik dari pesantren di Kalimantan Selatan, namun kami kategorikan “tidak moderat”. Di pesantren di Sumatera Barat itu terdapat beberapa kasus yang mengarah pada pelecehan seksual. Kasus terjadi di antaranya di lorong sekolah yang pada siang

hari selalu kosong, dan tidak terhubung dengan fasilitas lain. Lorong itu jauh dari pengawasan alamiah masyarakat pesantren.

Di Aceh, kami juga menemukan pesantren yang meletakkan area santri putri, termasuk area kamar mandi, terhubung langsung dengan tempat pengajian di mana guru laki-laki dapat berlalu-lalang. Baik sengaja maupun tidak, guru laki-laki dapat melihat secara langsung aktivitas di sekitar area kamar mandi putri.

Karena itu, kami sangat memerhatikan faktor keterhubungan antar-bangunan maupun jalan yang menentukan bagaimana visibilitas suatu ruangan. Pesantren-pesantren yang masih dalam kategori rintisan atau dalam proses berkembang tidak serta-merta memiliki kerentanan. Begitu juga sebaliknya, pesantren besar, seperti yang ditemui teman kami di Jawa Tengah, tidak serta-merta menjadi pesantren yang memiliki daya tahan dari kekerasan seksual.

Meskipun belum memiliki fasilitas yang memadai atau masih jauh dari “mewah”, dengan tata kelola yang memerhatikan keterhubungan jaringan jalan dan bangunan memungkinkan pengawasan alamiah. Hal ini dapat memberikan daya tahan pesantren dari kekerasan seksual.

Faktor keterhubungan ini juga berhubungan dengan aspek temporal yang sering dilupakan. Sering kali pesantren pada siang hari tampak memiliki daya tahan. Tetapi pada malam hari, bisa saja sebaliknya, terdapat kerentanan terhadap pelecehan maupun kekerasan seksual. Misal, saat kami mengunjungi pesantren di NTB, pada siang hari pesantren itu terkesan cukup memiliki daya tahan.

Namun, karena kami menginap di sekitar pesantren, pada malam hari, terdapat area yang sangat gelap dan jauh dari jangkauan pengawasan. Tidak ada CCTV dan juga tidak terawasi secara alamiah. Karena itu, meskipun pada siang

hari pesantren itu memiliki ketahanan, pada malam hari kerentanan cukup mengintai.

Kurang bijak jika kita harus memaksakan sebuah institusi memenuhi aspek-aspek materiil. Kita perlu membuka mata bahwa ada faktor-faktor lain yang bisa saja terlupakan untuk menentukan bagaimana suatu ruang dapat rentan atau tahan

Pada beberapa kasus yang kami dengar dari teman-teman aktivis yang intens menangani kasus kekerasan seksual, ditemukan beberapa kasus kekerasan seksual terjadi di rumah pemimpin pesantren ketika istrinya tidak berada di rumah. Lokasi rumah pemimpin pesantren yang berada di luar pesantren dan jauh dari jangkauan alamiah masyarakat menjadi penyebab. Beberapa pesantren yang kami jumpai secara fasilitas memang terkesan cukup memadai, namun karena rumah pemimpinnya atau kediaman para ustaz/ustazahnya jauh dari pengawasan alamiah, kami sangat berhati-hati untuk tidak mengatakannya moderat. Karakter ruang pesantren yang terbatas dari publik (*excluded*)

dapat menjadi lebih rentan jika aspek pengawasan dan temporal ini tidak diperhatikan.

Refleksi Bersama, Sikap Optimis

Di titik ini, kita harus memahami bahwa pesantren yang sejak lama teruji oleh sejarah sebenarnya dari dalam memiliki sumber potensi ketahanannya tersendiri terhadap kekerasan seksual. Keterlibatan masyarakat, kemandirian pesantren, hingga pengawasan alamiah yang tercipta dari pengaturan

tata kelola pesantren menjadi kekuatan tersendiri yang perlu dipertimbangkan.

Saat meneliti ini, saya pribadi merasa lebih arif untuk melihat faktor kerentanan dan ketahanan sebuah institusi dari kekerasan seksual. Kita memang selalu berharap selalu ada peningkatan kualitas fasilitas, dalam kasus ini pesantren, namun saya merasa kurang bijak jika kita harus memaksakan sebuah institusi memenuhi aspek-aspek materiil yang berhubungan dengan kekuatan finansial.

Kita perlu membuka mata bahwa ada faktor-faktor lain yang bisa saja terlupakan untuk menentukan bagaimana suatu ruang dapat rentan atau tahan dari kekerasan seksual, seperti rasa kepemilikan dari masyarakat, perasaan subjektivitas relatif, dan juga faktor keterhubungan antar-jalan dan bangunan. Belum lagi cara pandang masyarakat pesantren terhadap isu ini—yang banyak dibahas di bab lain di buku ini.

Pada akhirnya, kita tidak perlu pesimistis melihat pesantren. Pesantren memang perlu selalu berbenah. Tetapi tidak sedikit pesantren yang sebenarnya sudah memiliki daya tahan. Riset ini pun juga mengajak kepada masyarakat umum untuk mendekatkan diri dan lebih berinteraksi dengan dunia pesantren.

Begitu juga sebaliknya, pesantren perlu lebih dekat dengan masyarakat umum. Keterbukaan seperti itu dapat menjauhkan pesantren dari kerentanan terhadap pelecehan maupun kekerasan seksual yang mungkin terjadi.

BAGIAN 3

EMOSI DAN

ETIKA



6

TERASA TAPI TAK TERUCAPKAN: KISAH PUBERTAS DI PESANTREN

• Narila Mutia Nasir

Dalam siklus kehidupan manusia, masa remaja adalah salah satu periode penting untuk membentuk bagaimana seorang manusia akan menjalani kehidupan masa dewasa yang panjang. Masa remaja diawali dengan proses pubertas yang salah satu penanda nyata adalah *menarche* (menstruasi pertama kali) pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki. Dalam ajaran Islam, kedua peristiwa ini menjadi dasar seseorang memasuki masa akil balig.

Secara umum, pembahasan soal pubertas ini sering dianggap tabu untuk dibicarakan karena terkait dengan nilai budaya dan agama yang berkembang di masyarakat Indonesia. Topik tersebut seakan berlalu begitu saja dan dianggap sebagai sesuatu yang akan dimengerti dengan sendirinya oleh para remaja. Padahal, pemahaman soal tubuh dan seksualitas merupakan hak dasar anak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan yang benar mengenai kesehatan reproduksi, termasuk tentang pubertas. Ketika saya,

seseorang yang bukan lulusan pesantren diberi kesempatan untuk meneliti di pesantren, mulai muncul pertanyaan-pertanyaan di benak saya. Apakah mereka para santri di pesantren juga dibiarkan melalui tahapan pubertas dalam kebingungan, seperti remaja di luar sana? Apakah santri mendapatkan bekal pengetahuan yang cukup ketika akan memasuki pubertas?

Bab ini akan menggambarkan bagaimana kisah-kisah pubertas di pesantren yang ternyata sering kali dilalui santri dalam diam padahal mereka sebenarnya memiliki banyak pertanyaan yang pada akhirnya tak terucapkan. Ketika turun ke pesantren mewawancara para santri, saya mendengarkan cerita beragam tentang kisah pubertasnya. Menyelami kisah-kisah itu membuat saya berpikir ulang apa yang seharusnya dilakukan agar pubertas yang dialami santri bukan menjadi sesuatu yang disimpan rapat, tetapi bisa dibuka dalam ruang dialog tanpa harus mengorbankan koridor nilai-nilai yang ada di pesantren. Tulisan ini adalah refleksi saya, tidak hanya sebagai peneliti yang bukan berasal dari dunia pesantren, tetapi juga sebagai manusia, sebagai ibu yang percaya bahwa setiap anak berhak memahami apa yang terjadi pada tubuhnya dan menyadari bahwa pubertas bukan sesuatu yang memalukan atau menakutkan, melainkan proses natural menuju kedewasaan.

Saya mencoba memahami bagaimana para santri menyikapi perubahan fisik dan mental yang mereka alami dalam sistem nilai yang menjunjung kesucian, namun masih menyisakan ruang sunyi atas pengalaman pubertas mereka. Pesantren, dengan kekuatan moral dan spiritualnya, sejatinya memiliki potensi besar untuk menghadirkan ruang pembelajaran yang utuh bagi jiwa dan raga dalam memaknai pubertas. Pengalaman ini tidak hanya menghadirkan tantangan metodologis dan etis, tetapi juga menyentuh sisi emosional dan eksistensial saya sebagai manusia, perempuan, dan peneliti.

Bab ini mendorong para pembaca, tidak hanya peneliti, tetapi juga pengasuh dan pendidik di pesantren untuk merenungi apakah selama ini kita sudah serius membicarakan pubertas. Sudahkah kita memberikan cukup ruang untuk berbicara bagi mereka yang akan menghadapi atau sedang menjalani tahapan pubertas? Atau justru kita masih menganggap hal itu cukup kita biarkan tersimpan di sudut ruang hati sampai mereka memahaminya sendiri?

Para santri sudah sepantasnya tahu ke mana harus bercerita tanpa rasa takut atau malu tentang berbagai perubahan yang mereka alami dalam menjalani masa pubertas yang penuh gejolak.

Para santri sudah sepantasnya tahu ke mana harus bercerita tanpa rasa takut atau malu tentang berbagai perubahan yang mereka alami dalam menjalani masa pubertas yang penuh gejolak.

Kepada Siapa Harus Bercerita?

“Gak cerita ke siapa-siapa, takut mau cerita ke ayah.”

Kalimat sederhana namun sarat dengan nuansa kepasrahan itu meluncur begitu saja dari mulut seorang santri putra di pesantren yang saya datangi untuk penelitian. Saat itu, saya bertanya kepada siapa dia bercerita ketika pertama kali mengalami mimpi basah. Jawaban dari pertanyaan itu singkat tetapi cukup lama meninggalkan tanya di benak saya tentang ruang bercerita yang mungkin tak ada, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang mungkin tak dimiliki, dan rasa takut yang seharusnya tak boleh hadir. Pengalaman pubertas

sebagai sesuatu yang seharusnya bisa diceritakan, nyatanya hanya tersimpan dalam diam.

Sebagai seorang peneliti dan dosen yang memiliki latar belakang ilmu kesehatan reproduksi, “mimpi basah” dan “menstruasi” merupakan istilah yang sering saya bicarakan dengan gamblang kepada mahasiswa saya karena itu adalah bagian dari tahapan pubertas yang wajar dialami oleh setiap remaja. Namun, hal yang wajar di dunia teori bisa menjadi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan di dunia nyata termasuk di lingkungan pesantren. Ketakutan bercerita tentang penanda akil balig yang dialami oleh santri putra itu mungkin juga dialami oleh teman-teman seusianya di pesantren.

Mimpi basah, penanda bagi laki-laki bahwa mereka sudah memasuki masa reproduksinya. Kondisi ini kerap kali dilalui dengan episode penuh tanya, tanpa punya keberanian untuk mengungkapkannya kepada siapa pun. Mereka yang sedang dalam masa remaja dan melewati pubertas, mengalami masa yang penuh gejolak. Dan sebagian besar remaja terpaksa membiarkan gejolak dalam dirinya itu mereda dengan sendirinya tanpa memperoleh penjelasan yang mereka butuhkan.

Pubertas adalah hal universal yang dialami oleh setiap manusia dalam tahapan kehidupannya. Masa pubertas merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang penuh dengan perubahan, secara fisik dan mental yang terkadang menguras sisi emosional remaja. Namun, sering kali masa ini justru menjadi fase minim komunikasi bagi remaja. Mereka tak punya ruang untuk memahami tubuhnya sendiri atau bahkan bertanya tentang perubahan yang mereka alami seperti pertumbuhan payudara, perubahan suara, hingga mimpi basah atau menstruasi. Kebingungan, rasa takut, rasa bersalah, rasa malu kadang muncul akibat perubahan yang terjadi saat masa pubertas, walau kemudian hal itu tak terungkapkan.

Secara umum, pembicaraan yang berkaitan dengan pubertas seperti mimpi basah dan menstruasi sering kali dihindari karena dianggap tidak sejalan dengan budaya Indonesia. Terbesit tanya, apakah fenomena yang sama akan saya temukan juga di lingkungan pesantren? Tempat di mana adab dan kesopanan menjadi dinding-dinding yang mengatur ucapan dan gerakan, tempat yang menjunjung tinggi nilai keagamaan.

Pesantren merupakan tempat pertumbuhan karakter yang kuat, tetapi apakah santri diberikan ruang yang aman dan nyaman untuk memahami dan membicarakan proses pubertas yang dialaminya? Pertanyaan-pertanyaan itu mengisi ruang-ruang di benak saya ketika saya memutuskan memasuki dunia pesantren untuk melakukan wawancara mendalam. Bagaimana saya bisa memahami pubertas bukan sekedar proses perubahan secara fisik, tetapi juga proses perubahan secara emosional, kultural, dan juga spiritualitas yang sering kali tak terucapkan.

Kurangnya pemahaman tentang tahapan pubertas yang dialami bukan hanya didominasi oleh santri putra, santri putri pun tak luput dari kekosongan informasi. Salah satu santri putri yang saya wawancarai mengatakan bahwa ia terkejut saat mendapati tanda kemerahan di pakaian dalamnya karena tak pernah mendapatkan informasi tentang hal itu sebelumnya, bahkan cara menggunakan pembalut pun akhirnya ia pelajari sendiri. Fenomena

Fenomena ini menggambarkan minimnya ruang interaksi di kalangan santri terutama soal persiapan menghadapi pubertas secara mental dan fisik.

ini menggambarkan minimnya ruang interaksi di kalangan santri terutama soal persiapan menghadapi pubertas secara mental dan fisik. Di pesantren lain, seorang guru mengungkap bahwa mereka mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan menstruasi termasuk cara bersuci ketika menemukan seorang santri putri menangis mendapati dirinya mengalami menstruasi pertama kali dan merasa malu untuk bercerita kepada orang lain.

Fakta ini menunjukkan bahwa terkadang informasi penting tentang pubertas terlambat disampaikan kepada santri. Mereka terkadang tidak memiliki persiapan sama sekali baik secara fisik maupun mental. Dan ketika penanda pubertas itu tiba, mereka pun tak tahu ke mana harus bercerita, bahkan bertanya dalam diri, haruskah mereka bercerita?

Meluruskan Niat Memasuki Ruang

Saat saya pertama kali diminta untuk terlibat dalam penelitian ini, ada sedikit rasa gamang yang muncul karena saya bukanlah lulusan pesantren. Saya menyadari bahwa memasuki dunia pesantren sebagai peneliti luar pasti tidak mudah. Pesantren dikenal sebagai tempat yang memiliki otoritas penuh dengan nilai-nilai khas di dalamnya. Kehadiran saya sebagai “orang asing” mungkin akan memunculkan jarak dan resistensi, apalagi saya akan meneliti isu yang cukup sensitif yang dianggap sebagai ruang privat yang tidak mudah untuk dibicarakan secara terbuka.

Ada rasa optimis karena saya akan turun ke lapangan sebagai tim peneliti PPIM UIN Jakarta, lembaga yang sudah beberapa kali melakukan riset di pesantren. Akan tetapi, terlepas dari berbagai kondisi itu, saya mencoba meluruskan niat untuk memasuki ruang yang sering dikatakan sulit dicapai. Saya menempatkan pesantren sebagai “rumah saya” meski saya bukan berasal dari lingkungan itu, sehingga saya menguatkan niat bahwa kedatangan saya ke pesantren bukan

hanya seka dar mengambil “data” tetapi juga untuk membuat “rumah” itu menjadi tempat yang nyaman bagi para santri yang sedang melewati salah satu tahapan penting dalam hidupnya yaitu masa pubertas. Saya memulainya dengan menggunakan pendekatan antropologis, yaitu menghargai nilai-nilai budaya dan kebiasaan yang diterapkan di pesantren, serta terbuka menerima masukan dan membuka diri untuk mempelajari hal-hal baru dari pesantren .

Berkat bantuan para enumerator (asisten peneliti), saya langsung bisa datang ke pesantren-pesantren yang dituju. Ada pesantren yang dengan mudah menerima saya, tetapi juga ada yang butuh sedikit tambahan usaha agar saya bisa melakukan wawancara. Namun secara umum, pesantren tidaklah se-eksklusif yang saya pikirkan. Saya tidak merasakan canggung karena mendapat sambutan hangat dari pihak pesantren. Kekhawatiran yang sempat muncul sirna seketika karena penerimaan yang luar biasa. Di tengah kemudahan itu, saya tetap berusaha membangun kepercayaan dengan pimpinan pesantren, pengasuh pondok pesantren, ustaz/ustazah, dan yang terpenting dengan santri.

Segala upaya saya lakukan termasuk menyesuaikan tampilan saya dengan atmosfer pesantren. Di salah satu pesantren yang saya datangi di daerah Sumatera, saya bahkan mengubah total penampilan, mulai dari gaya berpakaian dan berhijab hingga menutup sebagian wajah saya karena saya menyadari kemungkinan ustaz dan santri putra di pesantren tersebut tidak nyaman dengan kehadiran perempuan tanpa *niqab* di depannya. Sebenarnya di awal pun saya merasakan sedikit “rasa asing” berada di lingkungan yang isinya semua berbeda jenis kelamin dengan saya, tetapi saya mencoba menenangkan diri agar semua yang saya wawancarai juga ikut merasakan ketenangan itu. Di pesantren lainnya, saya mencoba menggunakan bahasa lokal yang kebetulan saya

kuasai. Dan ternyata itu amat membantu santri untuk lebih banyak bercerita.

Cerita tentang Diri yang Tak Lagi Sama

Perjalanan dari satu wawancara ke wawancara lainnya, dari satu pesantren ke pesantren lainnya mengungkap bahwa perubahan pada diri santri selama masa pubertas tidak semuanya bisa diceritakan oleh santri kepada guru atau ibu nyai, terutama jika mimpi basah atau menstruasi itu pertama kali terjadi di pesantren. Ada perbedaan yang cukup mencolok antara santri putra dan santri putri. Jika santri putra cenderung diam terkait pengalaman pubertasnya, sementara santri putri lebih beragam responsnya. Dalam beberapa wawancara, santri putri juga lebih ekspresif dalam mengungkapkan pengalaman pubertasnya dibandingkan santri putra yang terkesan biasa saja.

Perubahan fisik yang dialami santri saat memasuki masa pubertas sebenarnya merupakan perubahan normal. Namun, kondisi tersebut memunculkan rasa bingung dan kegelisahan mengapa perubahan itu terjadi, apa yang harus mereka lakukan dengan perubahan itu, dan bagaimana mereka memaknai perubahan-perubahan selama masa pubertas itu. Seorang santri putri menceritakan jika ia merasa senang setelah tahu dirinya mengalami menstruasi pertama kali saat di pesantren karena itu menandakan dirinya sudah besar. Pandangan positif terhadap pengalaman pubertas itu membuat santri tersebut justru merasa ia lebih kuat dan lebih bisa mengendalikan emosi dibanding masa kanak-kanak.

Cerita yang berbeda datang dari santri putri lainnya yang mengalami menstruasi pertama kali juga di pesantren. Ia memilih tidak bercerita kepada siapa pun bahkan merasa malu untuk meminta pembalut sehingga memilih menggunakan pakaian dalam berlapis-lapis. Selain itu, ia juga merasakan perubahan secara sosial, seperti merasa berbeda

ketika berinteraksi dengan lawan jenis, merasa lebih dewasa, dan lebih bertanggung jawab. Perasaan takut, merinding, bahkan geli saat mengalami menstruasi pertama juga diungkapkan oleh santri putri lainnya. Ragam respons yang ditunjukkan para santri mencerminkan bahwa perubahan tersebut tetap memunculkan berbagai perasaan, terlepas dari apakah mereka sudah memperoleh informasi tentang menstruasi sebelumnya.

Berbeda dengan santri putri, hampir semua santri putra memilih untuk tidak bercerita kepada orang lain tentang mimpi basah yang dialami. Mereka terkesan tertutup. Ketika ditanya mengapa tidak menceritakan pengalaman tersebut, mereka beralasan “Gak enak untuk ngomong”. Ada perasaan malu, takut, atau merasa tidak perlu menceritakannya kepada siapa pun karena hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat pribadi. Setelah tahu mereka sudah masuk akil balig, beberapa santri putra memandang perubahan yang terjadi pada diri mereka secara positif bahwa mereka menjadi lebih dewasa dalam tingkah laku. Tetapi, mereka semua menyadari ada pengetahuan yang kurang mengenai pubertas, sehingga berdampak pada kebingungan mereka dalam bersikap. Berdasarkan penuturan mereka, tidak semua hal terkait perubahan dalam masa pubertas dan dampaknya itu didiskusikan secara terbuka, sering kali mereka berusaha mencari dan mencerna sendiri tentang perubahan itu.

Santri adalah kelompok remaja yang membutuhkan bekal pengetahuan yang memadai tentang tanda-tanda akil balig. Pengetahuan ini akan membantu mereka memahami perubahan yang dialami, bagaimana menyikapinya, serta dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini akan membantu mengurangi masalah mental dan fisik yang mungkin muncul akibat perubahan yang terjadi pada diri santri. Tetapi pada kenyataannya, beberapa dari mereka justru mendapatkan penjelasan setelah mereka mengalami

pubertas. Ketidaktahuan mereka terkadang menyisakan rasa terasing, malu, dan bingung terhadap perubahan yang terjadi. Jika sebagian santri putri memiliki keberuntungan dapat berdiskusi tentang perubahan diri dan pengalaman pubertas dengan ibu nyai atau ustazah yang mendampingi, maka santri putra justru lebih banyak berjuang dalam kesunyian, menyimpan cerita tentang dirinya yang tak lagi sama.

Bermain Peran untuk Menyentuh Sisi Tersembunyi

Tidak mudah bagi tim peneliti termasuk saya untuk bisa menggali pertanyaan soal pengalaman pubertas santri. Mimpi basah atau menstruasi pertama yang dialami bukanlah topik yang mudah untuk didiskusikan secara terbuka. Datang ke institusi pesantren yang memiliki standar nilai sendiri membuat daftar pertanyaan dan alat perekam serta pengetahuan metodologis tak cukup menjadi modal untuk memperoleh informasi dari para santri. Bermain peran menjadi teman, kakak, bahkan ibu bagi santri adalah strategi yang saya terapkan untuk membangun kepercayaan dan menciptakan kenyamanan bagi santri untuk bercerita.

Meskipun saya tidak menginap di pesantren tetapi saya selalu datang pagi-pagi dan pulang hampir menjelang Magrib. Saya memastikan punya waktu yang cukup untuk berbincang dan membangun kepercayaan dari santri. Kala seorang santri putri menangis menjelaskan kegundahan hatinya karena merasa putus asa sendiri, saya refleks menggenggam erat tangannya untuk menunjukkan rasa empati dan membantu menguatkan. Peran sebagai kakak ternyata mampu meruntuhkan dinding ketakutannya sehingga ia tak sungkan untuk menceritakan hal yang selama ini ditutupinya.

Ketika saya datang kembali keesokan harinya, santri tersebut selalu mendekati saya untuk sekedar menyapa dan bercerita ringan. Pada saat hari terakhir pengambilan data, sambil menunggu mobil jemputan, ia mendekati dengan

tatapan matanya yang sedikit suram seakan tak rela saya pergi. Saya berikan pelukan untuknya sambil berkata bahwa ia harus selalu gembira dan kuat. “Kesini lagi ya!” ucapnya sambil berusaha tersenyum.

Lain lagi cerita saat saya mewawancara santri putri yang menganggap saya seperti orang tua atau pengasuhnya. Ia memanggil saya Umi, panggilan yang menurut saya merupakan bentuk penghormatan atau cara mereka untuk membangun ikatan kepercayaan dengan saya. Dengan lugas dan riang, santri putri itu bercerita banyak hal, termasuk soal pengalaman pubertasnya tanpa beban. Saya mendengarkan ceritanya yang menyiratkan bahwa tak ada kekhawatiran tentang perubahan yang terjadi pada dirinya.

Pengalaman menggali informasi pada santri putra sangat menarik dan penuh tantangan. Saya merasa sedikit kesulitan di awal ketika harus bertanya tentang pengalaman pubertas pada mereka. Terlihat ada rasa ragu yang ditunjukkan para santri putra. Gesture tubuh mereka tak bisa menutupi bahwa mereka sedikit enggan untuk bercerita hal yang mereka anggap tak perlu dibicarakan. Saya bahkan mendapati seorang santri putra sampai berkeringat ketika saya menanyakan pengalaman mimpi basah pertamanya. Saya yakin itu bukan karena cuaca yang panas, melainkan ia sedang berpikir keras menyusun kata-kata untuk menjawab pertanyaan yang selama ini hanya ia simpan sendiri.

Sebagai peneliti, menanyakan hal-hal sensitif kepada santri tentu bukan perkara mudah. Seorang rekan peneliti mengungkap bahwa sejak awal ia memilih untuk “mematikan rasa” dan menetralkan pikirannya dari *mindset* tabu. Sikap ini membantu mengurangi rasa sungkan para santri untuk bercerita, karena percakapan seputar pubertas diposisikan sebagai sesuatu yang wajar. Namun, perbedaan jenis kelamin antara peneliti dan santri yang diwawancara juga menghadirkan dinamika tersendiri. Diperlukan kepekaan tingkat tinggi agar

santri merasa nyaman dan terbuka dalam berbagi pengalaman. Ketika terlihat santri kurang nyaman, peneliti kemudian memutuskan untuk melibatkan asisten peneliti dengan jenis kelamin yang sama dengan santri, guna menggali informasi lebih dalam seputar pubertas.

Pengalaman menarik juga datang dari seorang peneliti yang pernah menjadi santri. Ia memosisikan diri seolah-olah kembali menjadi santri, merasakan kembali pergulatan batin. Karena itu, ia sangat hati-hati dalam menggali informasi, membayangkan dirinya di posisi santri, dan berusaha menggunakan kata-kata yang tepat agar santri yang diwawancara bersedia terbuka.

Tidak Berhenti di Sini: Harapan dan Renungan dari Lapangan

Menggali kisah-kisah pubertas di pesantren adalah pengalaman berharga yang dipenuhi oleh pergolakan batin, kejutan, tantangan, sekaligus perenungan. Wawancara mendalam yang saya lakukan bersama para santri tidak hanya berlangsung dalam ruang metodologis, tetapi juga melebur dalam ruang perjumpaan antar manusia—antara peneliti dan santri. Meskipun saya datang dengan bekal pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan metodologi yang matang, pada akhirnya saya menyadari bahwa kita tidak bisa sepenuhnya terpaku pada instrumen. Ketika mendengar cerita santri putra yang takut membicarakan mimpi basahnya, atau santri putri yang kaget dan bingung saat pertama kali melihat darah menstruasi, respons yang bisa saya berikan bukan semata-mata berdasarkan teori. Yang dibutuhkan adalah empati—peran saya sebagai manusia, bukan sekadar peneliti.

Pengalaman meneliti isu sensitif seperti pubertas di pesantren menyadarkan saya bahwa para santri—yang juga remaja—membutuhkan ruang untuk bertanya dan bercerita tanpa rasa sungkan. Pesantren, dengan seluruh nilai luhur

dan spiritualnya, memiliki potensi besar untuk menyediakan ruang yang memungkinkan santri mendiskusikan hal-hal yang selama ini dianggap tabu.

Saya belajar untuk melebur, mendengarkan, dan menerima bahwa pendekatan ini bukan sekadar soal “seharusnya begini atau begitu”, tetapi tentang menumbuhkan harapan—bahwa pesantren dapat mengintegrasikan pemanahaman tentang pubertas dan kesehatan reproduksi secara lebih terbuka, dengan tetap menjunjung nilai-nilai kebaikan bersama.

Sebagai peneliti, perjalanan pulang dari pesantren membawa banyak *oleh-oleh* berharga. Saya tidak hanya kembali dengan catatan lapangan, transkrip wawancara, atau foto-foto penuh makna, tetapi juga dengan keyakinan bahwa penelitian bukan sekadar upaya menghasilkan pengetahuan. Penelitian ini telah membuka ruang diskusi dan ruang perubahan, agar pesantren dapat menjadi tempat yang nyaman bagi para santri dalam menapaki setiap tahapan pubertas dengan makna dan kegembiraan—bukan sekadar penuh tanda tanya. Karena sejatinya, santri tidak cukup hanya merasa; mereka juga membutuhkan ruang untuk bercerita ketika pubertas itu tiba.

MERUNTUHKAN KEPOLOSAN, MENEGUHKAN KETAHANAN

• Aptiani Nur Jannah

Selama ini, kita banyak membaca kasus kekerasan seksual di pesantren terkuak di media. Meskipun pemberitaan awak media nampaknya menggambarkan situasi darurat kekerasan seksual di pesantren, masih banyak masyarakat bahkan di pesantren sendiri menyangsikan hal ini terjadi. Istilah kekerasan seksual masih belum banyak dipahami secara benar di kalangan pesantren. Padahal saya ingat kejadiannya memang ada di pesantren. Selama saya melakukan penelitian ini, tidak saya sangka kenangan ketika menjalani hari-hari di pesantren semasa *nyantri* dulu menjadi lebih gamblang teringat. Dari wawancara dengan santri yang semula mengalir ringan dan luwes-membahas rutinitas keseharian di pesantren-atmosfer perlahan berubah ketika saya mulai menyinggung isu kekerasan seksual. Kata-kata seolah menguap, digantikan oleh sikap diam para santri yang tampak kebingungan. Isu tersebut terasa asing di tengah kepolosan mereka.

Bab ini merupakan refleksi mendalam selama saya meneliti isu kekerasan seksual di pesantren. Sejak dari

persiapan instrumen penelitian kuantitatif dan kualitatif hingga penulisan laporan, beberapa kali saya merujuk pengalaman saya kala mondok dahulu selama tujuh tahun di pesantren. Misalnya ketika membuat daftar pertanyaan untuk survei dan wawancara, saya otomatis akan melihat diri saya di masa lalu. Saya membayangkan menjawab pertanyaan sulit, topik yang tidak saya paham, bahkan memandang pewawancara pun, rasanya saya akan malu. Saya seorang santri yang terlalu polos.

Tidak hanya itu. Membaca pilihan ganda definisi kekerasan seksual di lembar kuesioner saja, saya mungkin akan terkejut, bahkan kabur dan menolak menjawab. Karena bergabung dengan penelitian ini, saya mulai menyadari bahwa dulu warga pesantren saya mungkin pernah mengalami kekerasan seksual. Hal-hal yang mereka alami barangkali tergolong pelecehan, walau mereka tidak menyadarinya. Dari sinilah saya ingin memfokuskan bab ini pada betapa rentannya santri terhadap kekerasan seksual yang disebabkan karena kepolosan, ketidaktahuan, dan sikap diam mereka.

Bab ini merefleksikan pengalaman saya melakukan penelitian kualitatif yang bersinggungan dengan isu kekerasan seksual di pesantren. Di awal penelitian, tujuan saya adalah menggali berbagai tantangan struktural, sosial, dan budaya untuk merespons isu kekerasan seksual di pesantren. Namun seiring berjalannya penelitian, saya berulang kali sampai pada satu kesadaran yang meresahkan. Kerentanan santri bukan semata terjadi karena dinamika kuasa dan ketiadaan payung keadilan, tetapi sedikit banyak disebabkan oleh kepolosan mereka dan minimnya pengetahuan tentang kekerasan seksual. Kerentanan mereka senyap dan tersembunyi, acapkali terabaikan dalam diskursus yang berpusat dalam kerangka hukum atau reformasi struktural semata.

Bab ini akan banyak melihat pelajaran yang saya petik dari pengambilan data selama penelitian di pesantren. Saya

akan banyak membicarakan kerentanan santri terhadap kekerasan seksual, sebab kepolosan mereka dan bagaimana lingkungan pesantren membentuknya. Saya juga akan menjelaskan bagaimana kerentanan santri terhadap kekerasan seksual terungkap tidak hanya melalui data survei dan apa yang informan dikatakan, tetapi juga melalui apa yang tidak dapat mereka utarakan.

Kepolosan, Ketidaktahuan, dan Kerentanan Santri

Selama turun lapangan, pengalaman wawancara dengan santri yang cukup membekas dalam ingatan saya adalah ketika menanyakan isu kekerasan seksual. Selain karena saya sudah membaca banyak literatur untuk memformulasikan daftar pertanyaan ini, saya sedari awal sudah memiliki kekhawatiran bahwa saya akan kesulitan mendapatkan jawaban dari santri. Ini terbukti ketika wawancara, saya menyadari ada perubahan atmosfer dalam perbincangan kami, dari suasana yang santai dan lancar saat menceritakan aktivitas mereka di pesantren hingga diam tatkala menjumpai pertanyaan tentang kekerasan seksual. Beberapa santri menundukkan mata atau menolak untuk bertemu pandang. Sementara santri yang lain terlihat gelisah dalam duduknya seakan ingin meninggalkan tempat wawancara saat itu juga. Meskipun ada yang menjawab, jawaban mereka sekedar respons ala kadarnya, dengan kata-kata yang tidak jelas atau samar terdengar.

Pengalaman ini tidak hanya terjadi pada saya, tetapi juga pada peneliti lain. Keheningan santri dihadapkan pada pertanyaan tentang kekerasan seksual bukan menunjukkan penolakan, tetapi keraguan. Seakan mereka tahu ada yang salah, namun tidak memiliki kata yang cukup untuk menjelaskannya. Mereka bukannya tidak mau, tetapi tidak mampu menjawab. Mereka merasa ragu dan dalam beberapa kesempatan, santri sangat terlihat tidak nyaman. Sikap bimbang dan sunyi banyak santri inilah yang membuka mata saya bahwa kepolosan

menjadi salah satu bentuk kerentanan terhadap kekerasan seksual. Kepolosan semacam ini tidak bermakna kurang pengalaman, namun lebih pada keluguan yang dibentuk oleh keterbatasan ruang dan kurangnya keterbukaan pesantren terhadap isu seksualitas. Sikap diam santri menandakan minimnya pengetahuan mereka tentang kekerasan seksual, sehingga membuat mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual daripada luput dan terhindar dari bahaya ini.

Saya tumbuh besar di pesantren, dunia yang begitu akrab dengan aturan, batasan, dan moralitas yang dijaga ketat. Ketika melakukan riset ini dan mengamati kepolosan santri, wawancara menjadi terasa personal. Saya bisa melihat diri saya sendiri dalam sikap diam dan kepatuhan mereka: bagaimana mereka menunggu isyarat atau ucapan yang mengizinkan mereka untuk berbicara, bagaimana mereka ragu-ragu menjawab, dan bagaimana mereka berusaha menjelaskan sesuatu yang mereka tahu salah. Saya bisa memahami mengapa mereka menjadi ragu menghadapi pertanyaan tentang kekerasan seksual. Kepolosan mereka juga pernah saya alami selama bertahun-tahun bagaikan katak dalam tempurung: tidak tahu apa pun tentang dunia luar, hanya berpegang teguh pada aturan dan kepercayaan penuh pada otoritas pesantren.

Ketiadaan pengetahuan ini tidak hanya nampak nyata dari sikap bungkam atau rasa tidak nyaman, tetapi juga tercermin dari cara santri memahami kekerasan seksual. Dalam survei yang kami lakukan, beberapa pertanyaan tentang kekerasan seksual disusun dalam bentuk isian. Banyak santri mengasosiasikan kekerasan seksual secara ekstrem sebagai pemakaian fisik atau penetrasi. Sebagai seseorang yang pernah belajar di pesantren, saya sudah memperkirakan kecenderungan jawaban mereka. Namun ternyata, saya tidak benar-benar siap menghadapi kenyataan tentang kepolosan santri yang begitu nyata bentuknya.

Begitu banyak santri tidak tahu apa itu kekerasan seksual. Sebagian besar hanya menyebut istilah seperti “pemerkosaan,” “dipaksa,” “memegang organ intim,” atau “tidak menutup aurat”. Ada juga yang menuliskan “melecehkan perempuan,” tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Bentuk lain kekerasan seksual terutama yang bersifat non-fisik jarang dan hampir tidak ditemukan dalam jawaban mereka. Pelecehan seksual yang bersifat verbal, misalnya, sentuhan atau paksaan dari orang yang punya otoritas dan kuasa juga tidak dianggap sebagai kekerasan seksual. Saya membaca lembar demi lembar jawaban mereka. Selagi mencatat jawaban mereka, sesekali saya berhenti untuk mencoba membayangkan wajah santri yang menjawab pertanyaan ini. Terlihat masih polos, belum tahu bahwa tubuh mereka berharga dan bahwa kekerasan tidak selalu berbentuk fisik.

Pemahaman santri yang sempit ini bukan hanya muncul di survei nasional kami, tetapi juga saya temukan kala terjun ke lapangan untuk mewawancara santri secara langsung. Di berbagai daerah, banyak santri yang jujur mengatakan bahwa mereka tidak tahu arti pelecehan juga kekerasan seksual. Mirisnya, santri yang mengaku tahu, malah menjelaskan kekerasan seksual menggunakan narasi agama yang mengaburkan persoalan. Misalnya anggapan bahwa pacaran adalah bentuk kekerasan seksual.

Di pesantren dengan ajaran yang menitikberatkan moralitas, pacaran merupakan dosa besar dan biasanya mendapat hukuman paling berat. Ketika mendengar kekerasan seksual, saya kira santri memahami ini adalah sebuah kejahatan, namun tak punya kata untuk menjabarkannya sehingga “pacaran” menjadi definisi yang banyak dipahami sebagai bentuk kekerasan seksual.

Mitos tentang pemerkosaan juga kerap saya dengar dari mulut para santri baik putra maupun putri, di berbagai pesantren dan wilayah. Saya merasa sakit hati setiap kali

mendengarnya. Misalnya, anggapan bahwa kekerasan seksual hanya terjadi kepada perempuan yang “mengumbar” aurat atau bahwa laki-laki adalah makhluk penuh nafsu yang pasti tergoda ketika melihat perempuan berpakaian “mengundang”. Di banyak pesantren, pelajaran tentang adab dan pergaulan justru lebih sering ditekankan dibandingkan dengan pemahaman tentang hak atas tubuh. Akibatnya, definisi kekerasan seksual yang mereka pahami tercampur dengan konsep zina dan dosa. Tentu saja, saya tidak menyalahkan ajaran agama, sama sekali tidak. Tetapi saya menyadari bahwa tafsir keagamaan yang kaku serta pola pengajaran yang minim ruang dialog justru bisa menutup pintu menuju pengetahuan yang lebih luas dan terbuka.

Yang paling sulit saya cerna adalah betapa kuatnya budaya yang tidak berpihak pada penyintas. Alih-alih menunjukkan keberpihakan, masyarakat cenderung menyalahkan penyintas kekerasan seksual. Selain karena salah kaprah memahami kekerasan seksual, pemikiran yang bernuansa mitos pemerkosaan kerap saya tangkap dari uraian santri di berbagai wilayah. Banyak dari mereka percaya bahwa kekerasan seksual terjadi karena cara perempuan berpakaian atau bersikap. Akibatnya beban pencegahan kekerasan seksual sepenuhnya dibebankan kepada perempuan, tanpa ada ruang perbincangan mengenai bentuk penanganan dan pencegahan lain yang lebih menyeluruh. Di beberapa pesantren, santri putri harus memakai gamis panjang, dilarang berinteraksi dengan laki-laki, dan harus menjaga jarak dalam berbagai aktivitas, demi memastikan perempuan “menjaga diri”. Catatan demi catatan saya himpun, mencoba memahami berbagai aturan yang dibuat untuk mencegah apa yang mereka sebut sebagai “fitnah”.

Tetapi ketika saya bertanya lebih lanjut kepada santri tentang apa yang akan dilakukan jika kekerasan seksual terjadi kepada mereka atau orang terdekat, mereka terdiam. Mereka

seolah bingung atau bahkan tidak tahu harus menjawab apa. Dalam diam mereka, saya merasakan kegamangan. Respons semacam ini menggambarkan minimnya edukasi yang menye-luruh terkait kekerasan seksual. Selain itu, terbatasnya akses terhadap informasi yang relevan membuat banyak santri mengisi kekosongan pengetahuan tersebut dengan beragam asumsi, yang tanpa disadari justru ikut melanggengkan kekerasan.

Kondisi di atas menandakan bahwa pemahaman banyak santri dan bahkan guru di pesantren tentang kekerasan seksual sangat sempit. Kekerasan seksual seolah hanya meli-batkan orang tak dikenal, pemaksaan fisik, dan kasus yang ekstrem seperti pemerkosaan. Skenario kekerasan seksual yang melibatkan manipulasi atau tekanan emosional hingga penyalahgunaan wewenang sama sekali tidak terpikirkan oleh mereka. Apalagi jika pelaku adalah seseorang yang dikenal atau dihormati, hampir mustahil rasanya santri dapat mema-hami kemungkinan skenario ini. Belum lagi pandangan bahwa ketika perempuan sudah menjaga dirinya dengan menutup aurat akan terhindar dari kekerasan seksual, juga masih saya dapat. Pandangan ini terlampau menyederhanakan kompleksitas kekerasan seksual dan hanya menempatkan beban pencegahan pada korban. Mitos pemerkosaan yang mereka pahami tidak hanya membungkam pengalaman para penyintas yang tidak sesuai dengan deskripsi sempit tersebut. Justru, para korban kesulitan mengenali penderitaan yang mereka alami sebagai bentuk tindak kejahatan kekerasan seksual atau, bahkan, merasa tidak berhak untuk bersuara.

Selain itu, satu pola yang saya tangkap di banyak perca-kapan, baik dengan pihak internal maupun eksternal pesan-tren, adalah penyangkalan (*denial*). Ada keyakinan kuat bahwa kekerasan seksual tidak mungkin terjadi di pesantren. Mereka meyakini, di luar pagar pesantren, di dunia yang penuh kebe-basan dan absen kontrol moral, kekerasan seksual mungkin

terjadi. Tetapi tidak di sini, tidak di pesantren. Saya masih mengingat ekspresi bingung seorang santri saat ditanya soal kekerasan seksual di pesantren. Ia dengan tegas menolak kemungkinan itu. Baginya, kekerasan seksual hanya mungkin terjadi di luar sana, di tempat di mana laki-laki dan perempuan bergaul bebas. Di pesantren, yang sedari dulu saya kenal dengan istilah “penjara suci”, tempat dengan berbagai batasan dan aturan untuk menjaga santri, rasanya mustahil kekerasan seksual bisa terjadi. Pernyataan ini dirapalkan seperti doa seakan membentengi santri dari kenyataan. Saya tidak menyanggah, tetapi dalam hati saya bertanya-tanya, “apakah mungkin mereka tidak tahu atau menolak untuk tahu?”

Saya bisa memahami keinginan masyarakat pesantren untuk mempertahankan citra kesucian pesantren. Saya tahu pesantren adalah rumah, tidak hanya tempat menimba ilmu tetapi juga tempat santri membentuk identitas sosial dan agama yang akan ia bawa hingga dewasa. Seolah ada keengganan di wajah mereka untuk mengakui bahwa kekerasan seksual terjadi di pesantren. Jika mengakuinya, mereka seakan berkianat pada marwah pesantren. Sehingga, seolah membuka aib rumah sendiri. Bukan saya tidak peduli dengan marwah pesantren. Saya peduli! Saya mendambakan pesantren menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi semua anak. Karenanya, saya tidak bisa diam.

Sikap diam justru memberikan ruang yang nyaman bagi pelaku! Sebaliknya, korban dibebani rasa bersalah, keraguan, dan ketakutan yang membuat mereka sering kali memilih bungkam. Ini adalah bentuk pengabaian yang semakin mempersulit korban untuk bicara. Ketika kekerasan seksual terjadi, yang disalahkan justru korban, atau lebih parah lagi, dianggap sama sekali tidak terjadi. Penyangkalan bukan semata soal ketidaktahuan, tetapi juga bagian dari upaya

kolektif menjaga reputasi, yang tanpa disadari mengorbankan mereka yang paling rentan.

Ketiadaan Bahasa Seputar Kekerasan Seksual

Istilah pelecehan dan kekerasan seksual terasa asing di benak santri karena tidak diperkenalkan di pesantren. Dalam beberapa wawancara, santri akan berhenti sejenak, menunduk atau dengan gugup meremas tangannya sebelum menjawab. Mereka bukannya tidak mau menjawab, hanya saja istilah itu tidak pernah diperkenalkan apalagi dinormalisasi dalam kurikulum pesantren. Saya memahami bahwa bagi sebagian dari mereka, sikap diam berarti upaya “cari aman”. Sesuatu yang tak dikenal akan lebih mudah dianggap tidak ada dibandingkan dicari definisinya, sehingga membuat mereka tidak nyaman. Terutama di pesantren dengan imej kesucian dan kedisiplinan, membicarakan isu kekerasan seksual seakan melanggar norma sosial yang berlaku di sana. Sikap diam ini bukan hanya hasil dari ketidaktahuan. Inilah imbas dari lingkungan di mana membicarakan tubuh, persttujuan (*consent*), dan kuasa jarang sekali diperkenankan. Percakapan mengenai hal-hal ini hampir tidak ada. Tidak adanya pengetahuan mengenai kekerasan seksual yang tidak diajarkan di pesantren akhirnya berkontribusi meningkatkan kerentanan santri.

Ketiadaan pemahaman ini sangat berkaitan dengan kesenjangan yang lebih struktural, yaitu kurangnya pendidikan formal mengenai seksualitas, hak-hak reproduksi, dan otonomi tubuh dalam kurikulum pesantren. Sebagian besar pesantren tidak menyediakan edukasi tentang kesehatan reproduksi dalam bentuk apa pun. Jangankan membincang hak reproduksi dan hak otonomi tubuh, membahas terjadinya kehamilan dari sisi biologis rasanya jarang dilakukan. Topik-topik seperti pubertas, menstruasi, dan perubahan pada tubuh umumnya hanya dibahas dalam konteks kesucian

(*thaharah*) yang diajarkan di kitab fikih. Tubuh hanya dilepaskan dari sisi aurat dengan kerangka kewajiban agama, bukan sebagai bagian dari hak dan otoritas individu.

Akibatnya, santri tidak mendapat bimbingan mengenai seksualitas yang dibutuhkan saat masa pubertas sehingga banyak yang tidak memahami tubuhnya sendiri. Tubuh perempuan misalnya, lebih banyak diperbincangkan sebagai sesuatu yang harus ditutup, dijaga, dan dikontrol bukan yang seharusnya dipahami, dirawat, atau bahkan dimiliki. Tubuh bahkan anggota tubuh intim adalah wilayah pesantren untuk dikontrol.

Saya teringat pengalaman seseorang yang saya kenal baik. Menuliskan pengalamannya membuat saya berderai air mata. Teman saya ini pernah belajar di pesantren yang mewajibkan semua santri baru untuk disunat, termasuk santri putri. Saat itu, ia baru saja lulus dari Sekolah Dasar (SD) dan hanya mengikuti perintah yang diumumkan melalui pengeras suara di asrama. Di pojok kamar asrama, di balik kain penutup sederhana, ia disunat. Yang ia ingat hanyalah kehadiran dukun sunat, sayatan sebuah silet, dan rasa sakit yang tak ia pahami tujuannya.

**Jangankan
melaporkan atau
mencari bantuan,
memahami bentuk
kekerasan seksual
yang terjadi di
depan mata pun
bisa menjadi hal
yang sulit bagi
mereka.**

Bertahun-tahun kemudian, ia berkesempatan mempelajari praktik *female genital mutilation* (FGM) yang terjadi di Afrika. Ia bertanya pada ibunya apakah sang ibu tahu bahwa ia pernah disunat di pesantren. Ibunya menjawab bahwa, umumnya, perempuan tidak perlu disunat, tetapi jika

pesantren mewajibkannya, maka itu dianggap benar. Bahkan seorang ibu yang melahirkan pun mengakui otoritas pesantren atas tubuh anak perempuannya sendiri.

Santri diharuskan tinggal jauh dari orang tua. Pendidikan pesantren mengharuskan santri berjarak dengan keluarga, tidak hanya ditinggalkan untuk bermukim di luar rumahnya, kontak dengan keluarga juga dibatasi. Aturan ini bertujuan sangat baik, yaitu untuk menumbuhkan kemandirian, tetapi tetap ada kelemahan yang diakibatkan, yaitu kurangnya figur orang tua di kehidupan anak. Anak tidak mendapatkan bimbingan tentang isu seksualitas dari orang terdekat. Mereka harus belajar dari temannya atau kakak kelasnya yang masih sama-sama remaja. Akibatnya, pengetahuan mereka terbatas dan penuh dengan kesalahpahaman. Kekurangan pahaman ini bisa berdampak serius bagi keselamatan santri. Ketika mereka tidak memahami tubuh dan hak-hak reproduksi mereka sendiri, kemungkinan besar mereka tidak akan menyadari jika sedang mengalami pelecehan. Jangankan melaporkan atau mencari bantuan, memahami bentuk kekerasan seksual yang terjadi di depan mata pun bisa menjadi hal yang sulit bagi mereka.

Salah satu peneliti menceritakan wawancaranya dengan pendamping penyintas kekerasan seksual di pesantren di Nusa Tenggara Barat. Ia menceritakan kasus-kasus kekerasan seksual antara guru dengan santri yang pernah ia tangani. Bagaimana santri begitu polosnya, tidak memahami otoritas tubuh dan konsep persetujuan, sehingga menjadi korban manipulasi narasi yang dibuat oleh pelaku. Salah satu kasus menggambarkan budaya di pesantren di mana santri menyodorkan kepala untuk disentuh gurunya sebagai penanda hormat dan takzim seraya mengharapkan berkah dari orang yang berilmu. Rekan peneliti juga terkejut saat akan wawancara, santri menundukkan kepalanya seolah berharap untuk

disentuh. Bagi santri ini adalah perwujudan rasa hormat murid pada gurunya. Sebuah niat yang amat mulia.

Namun, budaya sopan santun ini dimanfaatkan oleh oknum guru untuk menyentuh anggota tubuh santri yang seharusnya tidak boleh dilihat, apalagi disentuh. Santri tidak tahu batasan tubuhnya sehingga tidak menyadari bentuk pelecehan yang menimpa dirinya. Sementara dalam kasus lainnya, seorang santri dimanipulasi untuk berhubungan badan dengan iming-iming akan mendapatkan berkah luar biasa, yaitu mendapatkan keturunan dari seorang tokoh agama. Bagi kita hal ini jelas merupakan bentuk kekerasan seksual. Namun, tidak demikian bagi santri yang minim pemanahaman. Keterbatasan pengetahuan ini bukanlah kekurangan santri, tetapi dampak dari pendidikan pesantren yang luput membicarakan tubuh dan hak atas tubuh.

Di banyak pesantren, percakapan mengenai seksualitas bukan hanya jarang, tetapi hampir tidak dilakukan. Membicarakan tubuh intim dengan teman saja tabu dan asing apalagi untuk diajarkan di ruang kelas dan pengajian. Saya dulu belajar menstruasi dan perubahan badan dalam diam, berbisik dengan teman. Pada saat itu saya tidak mempertanyakan. Saya kira memang senyap adalah norma yang berlaku. Dulu, saya rasa kami diajarkan untuk malu dengan tubuh kami dengan cara ditutup, dijaga, dan dikontrol karena aurat. Norma kesopanan mewajibkan kami untuk melihat hal ini sebagai sesuatu yang tidak pantas dan bermoral untuk dibicarakan.

Melakukan penelitian ini membuat saya mengonfrontasi begitu beratnya hal yang tidak pernah diajarkan kepada saya dan para santri. Saya tidak hanya mendengar cerita mereka. Dalam kebingungan, jeda, dan kegelisahan mereka, saya melihat cerminan diri saya yang lebih muda. Sekalipun pelecehan seksual terjadi, akan sulit untuk menggambarkannya,

apalagi melaporkannya, karena tidak ada istilah yang tepat, dan tidak ada ruang untuk membicarakannya dengan aman.

Etika, Emosi, hingga Dilema Peneliti

Selama penelitian ini berlangsung, saya menghadapi berbagai tantangan terutama beban emosional pribadi dan momen ketika terjadi konflik dalam diri saya sendiri. Saya merasa berada di ambang dilema. Saya pikir saya memiliki posisi yang unik. Di satu sisi, saya pernah menjadi santri; di sisi lain, saya adalah peneliti yang meneliti isu kekerasan seksual di pesantren.

Tentu saja, latar belakang pernah menjadi santri mempermudah mendapatkan akses dan kepercayaan dari pesantren yang diteliti. Cerita masa santri saya bagikan dengan para santri dan saya gunakan untuk membuka percakapan agar lebih mengalir alami. Tetapi latar belakang pesantren juga membawa kompleksitas emosi terutama kembali ke dunia yang berbeda dengan apa yang ada di benak saya sebelumnya.

Selain itu, karena topik penelitian ini adalah kekerasan seksual di pesantren, saya juga harus berjuang mengelola empati saya: bagaimana mengatur batasan dengan informan, bagaimana mendapatkan kepercayaan tanpa melanggar kode etik penelitian, dan bagaimana memperhatikan hal-hal kecil untuk menciptakan rasa nyaman dan aman selama wawancara. Terlebih lagi ketika saya harus berhadapan dengan kepulosan para santri.

Kata “polos” sering terlintas di kepala saya saat berinteraksi dengan santri, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Mereka tidak bisa menggunakan Bahasa Indonesia, sehingga saya harus mengandalkan asisten peneliti lokal untuk menerjemahkan ke dalam bahasa daerah. Masih dengan malu-malu, santri merespons pertanyaan terkait kekerasan seksual, meskipun tidak sepenuhnya menjawab. Gerak gerik santri terlihat kurang nyaman ditanyai hal itu.

Salah satu santri laki-laki bahkan terlihat sangat malu dan menolak menatap mata saya sepanjang wawancara. Rasa malu ini terkesan bagi saya sebagai wujud kepolosan sekaligus beban emosional dari ketidaktahuan mereka. Malu karena tidak memahami pertanyaan dan tidak tahu isu yang ditanyakan.

Padahal sebelum wawancara dimulai, saya sudah memastikan santri merasa nyaman dan aman ketika menjawab pertanyaan saya. Kami duduk secara informal di aula, tidak ada kursi dan meja, saya dan informan duduk selonjoran di lantai beralaskan sajadah. Saya menyiapkan kudapan dan minuman untuk informan santri yang boleh dimakan selama wawancara. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya menjelaskan tujuan dan teknis penelitian, termasuk jaminan kerahasiaan data dan identitas mereka. Santri juga boleh bertanya jika tidak paham pertanyaan, bahkan berhak untuk tidak menjawab atau mengundurkan diri kapan saja di tengah penelitian ketika tidak berkenan atau tidak nyaman dengan pertanyaan. Saya menjelaskan semua itu di awal, santri yang tadinya terlihat tegang karena akan diwawancara menjadi sedikit terlihat lebih lega.

Pertanyaan sudah saya atur sedemikian rupa agar percakapan mengalir. Dimulai dari perkenalan dan cerita keseharian di pesantren. Sebisa mungkin saya menghindari gaya interogatif dan lebih memilih berdialog dengan berbekal pengalaman dan identitas saya sebagai mantan santri. Santri menyambut baik obrolan yang sudah saya buka. Cerita hari-hari di pesantren mengalir begitu lancar. Anekdote yang mereka bagikan membuat saya tertawa dan mengingat masa-masa yang saya juga alami sebagai santri.

Suasana berubah ketika saya memasuki serangkaian pertanyaan tentang kesehatan reproduksi dilanjut kekerasan seksual. Sebelumnya kami berbincang tentang kurikulum pesantren terutama apa saja yang dipelajari dan bagaimana

metode pembelajaran di pesantren. Lalu saya masuk ke pertanyaan tentang kesehatan reproduksi dengan alat bantu berupa gambar tubuh manusia. Saya meminta mereka menandai bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh atau dilihat. Santri masih terlihat nyaman, beberapa mengerjakan dengan santai sambil berbaring menelungkup di lantai. Namun, beberapa santri putra, terutama di Aceh, mulai terlihat tidak nyaman. Kemungkinan, karena gambar tubuh tersebut digambarkan tanpa busana, meskipun hanya siluet. Mungkin itu sebabnya santri tersebut malu-malu mengerjakan bagian ini.

Setelah itu, saya minta santri untuk menjelaskan apa yang mereka tandai pada gambar tersebut. Selanjutnya saya bertanya tentang pemahaman mereka terkait kesehatan reproduksi, dan dilanjutkan dengan pertanyaan kekerasan seksual. Umumnya saya memulai dari pengetahuan, kurikulum di pesantren mengenai isu tersebut, pengalaman hingga mekanisme penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di pesantren. Terkait dengan tubuh, santri putri ataupun santri putra menggambarkan batasan yang boleh dan tidak boleh dilihat atau disentuh berdasarkan ajaran agama dengan rujukan aurat. Definisi kekerasan seksual yang mereka jelaskan pun masih mengandung banyak kesalahpahaman dan belum menyentuh esensi yang sebenarnya.

Kepolosan dan ketidaktahuan mereka meninggalkan kesan mendalam bagi saya. Betapa mereka begitu rentan terhadap kekerasan seksual. Apalagi ketika saya menanyakan pengalaman atau pengetahuan mereka tentang kekerasan seksual di pesantren. Di sini saya sendiri juga sedikit berdebar menanyakan apakah mereka pernah mendengar kekerasan seksual terjadi di sekitar mereka. Mayoritas menjawab tidak pernah mengalami atau mendengar secara langsung jika ada kasus terjadi. Mereka hanya melihat atau mendengar

di pemberitaan media. Tetapi ada juga santri menceritakan pengalaman mereka berhadapan dengan kekerasan seksual.

Seorang santri putra, misalnya, mengaku pernah mengintip santri putri di asrama. Ada juga cerita tentang relasi kuasa antara kakak kelas dan adik kelas yang mengarah pada kekerasan seksual terutama pelecehan yang dibalut budaya perundungan. Pola ini lebih sering saya temukan di kalangan santri putra. Temuan ini sesuai dengan hasil survei nasional penelitian kami yang menemukan bahwa putra lebih rentan mengalami kekerasan seksual di pesantren.

Momen-momen mendengarkan cerita banyak santri tentang perundungan yang mengarah pada pelecehan seksual membuat hati saya gundah. Penelitian ini menuntut lebih dari sekedar keterampilan teknis. Selama mewawancarai para santri dan mendengarkan cerita tentang kekerasan seksual, saya mencoba hadir dengan kepekaan, empati, juga batasan yang jelas. Di satu sisi, saya harus bisa menciptakan ruang aman dan nyaman bagi santri untuk berbagi. Tapi di sisi lain, saya harus menjaga jarak supaya tidak terlalu hanyut dalam emosi. Dibandingkan banyak penelitian yang pernah saya lakukan, riset ini terasa begitu sulit. Saya selalu menutup wawancara dengan hati yang pilu. Bukan hanya kelelahan secara fisik tetapi juga emosional. Cerita-cerita mereka begitu berat, namun dibagikan dengan begitu polos.

Saya masih ingat salah satu santri putra di Jawa Barat menceritakan candaan antar teman yang mengarah pada kekerasan seksual verbal dan fisik. Ia pernah mendengar temannya memainkan alat kelamin temannya yang lain sebagai bentuk gurauan. Selain itu, santri putra lainnya memberikan testimoni pernah melihat adik kelas dipanggil ke belakang asrama oleh kakak kelasnya lalu dipegang kedua tangan dan kakinya, dibuka celananya, dimainkan alat kelaminnya, dan dilihat oleh kakak kelas lainnya. Informan saya menceritakan ini sambil memperagakan kejadian tersebut

seolah reka adegan. Ini ia lakukan dengan tertawa kecil. Tidak ada kemarahan. Tidak ada rasa takut. Tidak ada kesadaran bahwa yang ia amati sejatinya adalah bentuk kekerasan seksual. Sementara saya bergejolak mendengarnya. Tetapi hanya bisa terdiam. Di situlah saya merasakan dilema antara peneliti yang menggali data dan manusia yang ingin berbuat sesuatu untuk mereka.

Kepolosan para santri tampak dari cara mereka mence-ritakan pelecehan seolah itu hanya candaan. Seorang santri bahkan dengan ringan menceritakan bahwa alat kelaminnya pernah dimainkan saat ia sedang tertidur lelap, ia hanya menyadari jejak kotor air mani di sekitar tubuhnya di pagi hari. Justru kerentanan terhadap kekerasan seksual bersembunyi dalam kepolosan santri. Pendidikan mengenai seksualitas dan ruang yang aman bukanlah kemewahan yang jauh dari pesantren. Ini adalah kebutuhan mendesak yang perlu segera diwujudkan.

Ajakan Meruntuhkan Kepolosan

Kepolosan tidak selalu bermakna sebagai hal yang baik. Ia bisa berubah menjadi pintu kerentanan di lingkungan pesantren dengan penekanan pada diam sebagai tanda kesalehan dan kepatuhan yang harus dijunjung tinggi. Ketika santri tidak dibekali dengan pengetahuan untuk memahami hak dan batasan tubuhnya juga dididik dengan kesadaran untuk menyuarakan ketidaknyamanan, mereka menjadi rentan. Seperti kasus yang saya ceritakan sebelumnya, bagaimana seorang santri diyakinkan oleh seseorang yang ia percaya dan hormati penuh bahwa tindakan pelecehan yang ia alami adalah bentuk keberkahan. Ini bukan karena santri ceroboh atau terlalu polos. Tapi ini terjadi karena ia tidak pernah diajarkan sebaliknya. Ia tidak tahu. Ketika pengetahuan tidak ada, kuasa bicara sepenuhnya.

Penelitian ini menegaskan urgensi pendidikan seksual yang komprehensif di pesantren sebagai bagian dari upaya perlindungan anak. Pengetahuan tentang tubuh, batasan, dan relasi kuasa perlu diajarkan secara kontekstual dan selaras dengan nilai-nilai keislaman, namun tetap berpijakan pada prinsip hak asasi dan perlindungan martabat anak. Pendidikan ini bukan untuk menjauhkan santri dari agama, melainkan untuk membekali mereka dengan kesadaran yang dapat melindungi mereka. Jika pesantren ingin menjadi ruang aman, sudah saatnya isu ini dihadirkan dalam wacana pendidikan mereka.

Tulisan ini bukan ditujukan sebagai seruan untuk mencela pesantren atau membongkar aib lembaga pendidikan keagamaan yang suci. Ini saya tuliskan semata-mata sebagai ajakan untuk peduli. Bagaimana santri harus kita berikan ruang yang aman dan nyaman untuk bertumbuh. Bagaimana kepolosan santri merupakan kerentanan. Bagaimana pendidikan tentang kekerasan seksual harus diberikan agar santri punya pengetahuan untuk melindungi dirinya. Saya ingin membangun ruang seluasnya untuk santri bertanya tanpa takut. Melindungi santri bukan berarti menyembunyikan mereka dalam kegelapan, namun membantu mereka melihat dengan terang.

TRAUMA YANG MENYELINAP: REFLEKSI EMOSI PENELITI

Grace Sandra Pramesty Rachmanta

Membahas isu kekerasan seksual sering kali menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi banyak orang. Ketika kekerasan seksual terjadi di lingkungan terdekat, atau korbananya adalah seseorang yang dikenal, dampak psikologisnya juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka berpotensi mengalami apa yang disebut sebagai trauma sekunder (*secondary trauma*). Trauma sekunder memengaruhi orang-orang yang menyaksikan peristiwa traumatis atau mendampingi seseorang yang memiliki trauma. Hal ini terjadi ketika seseorang dihadapkan pada peristiwa traumatis orang lain (*National Child Traumatic Stress Network, Secondary Traumatic Stress Committee*, 2011). Figley (1995) menggambarkan trauma sekunder sebagai konsekuensi alami dari kepedulian, yang menunjukkan kondisi ini sangat umum terjadi di berbagai profesi yang berhubungan dengan kesehatan dan sosial.

Pada bab ini, saya akan lebih banyak menceritakan pengalaman yang dialami oleh peneliti selama proses penelitian, serta bagaimana kami mempersiapkan diri dalam

menghadapi kemungkinan munculnya trauma sekunder, atau bahkan trauma langsung yang dialami oleh informan. Sebagai lulusan psikologi, saya memiliki ketertarikan khusus pada aspek psikologis yang erat kaitannya dengan isu ini. Namun, ada tantangan besar yang sejak awal membuat saya ragu dan kurang percaya diri. Saya bukan berasal dari latar belakang pesantren.

Sejak kecil saya menempuh pendidikan di sekolah umum hingga tingkat menengah. Dulu, sempat ada keinginan dari orang tua untuk memasukkan saya ke pondok pesantren saat SMP, namun tidak terwujud. Akibatnya, saya tidak memiliki gambaran jelas tentang kehidupan di pesantren, baik terkait budaya yang berlaku, maupun cara berkomunikasi yang sopan dan tepat dengan kiai, ibu nyai, ustaz, ustazah, dan santri. Meski begitu, saya mencoba meyakinkan diri bahwa meskipun penelitian ini penuh tantangan, saya tidak sendirian. Keyakinan dari rekan-rekan tim, dukungan dari lembaga, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta sejumlah pihak peduli pada isu ini menjadi kekuatan bagi saya untuk terus melangkah.

Langkah Awal Perlindungan

Sejak awal kami telah mempertimbangkan kemungkinan munculnya dampak atau efek samping psikologis selama proses penelitian berlangsung. Dampak ini tidak hanya mungkin dialami oleh responden, tetapi juga oleh peneliti dan enumerator. Dalam proses perencanaan penelitian, kami berkonsultasi dengan berbagai pihak dan para ahli yang memiliki perhatian terhadap isu kekerasan seksual, anak, dan perempuan. Selain itu, dalam proses pengurusan izin penelitian dan pemenuhan aspek kode etik, kami perlu menyiapkan sejumlah dokumen, salah satunya adalah

strategi penanganan apabila dalam proses pengambilan data di lapangan muncul potensi trauma pada informan.

Mempertimbangkan hal tersebut, kami merasa sangat perlu untuk menyiapkan mekanisme *Psychological First Aid* (PFA) agar proses pengambilan data dapat berjalan dengan lancar dan tetap menjaga keselamatan serta kenyamanan para partisipan. Dalam menyusun strategi PFA ini, kami melibatkan jaringan dari Kementerian Agama serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di wilayah setempat, yang dapat membantu menyediakan layanan konseling sebagai tindak lanjut.

Strategi lainnya, sebelum melakukan pengambilan data di lapangan, kami melakukan uji coba sebanyak tiga kali di pesantren yang berbeda. Dari jenis pesantren yang lokasinya berada di wilayah kota dan kabupaten, untuk bisa melihat apakah pertanyaan atau pernyataan yang ada dalam instrumen dapat dipahami oleh para santri dan juga bagaimana respons mereka ketika mengisi instrumen tersebut. Hasil dari ketiga uji coba tersebut, kami mendapatkan beberapa masukan. Setelah itu, kami menyesuaikan kembali instrumen penelitian berdasarkan masukan yang ada.

Tidak sampai itu saja, untuk memastikan saat pengambilan data di lapangan kami mengadakan pelatihan untuk asisten peneliti lokal agar mereka juga mendapatkan bekal PFA. Selain itu, kami juga membuat video yang bisa dijadikan contoh proses pengambilan data. Pelatihan ini kami lakukan secara daring selama satu hari, dan membagi waktu pelatihan menjadi lima kali sesi dengan jumlah peserta tiap sesinya sekitar 30 orang.

Proses kompleks penelitian ini tidak terbayangkan sebelumnya. Kami harus mengalami proses perizinan yang berliku, mengatur strategi agar penelitian dapat berjalan dengan baik. Upaya yang dilakukan perlu lebih *extra* dibandingkan penelitian-penelitian lain.

Saat pertama kali saya bergabung dengan tim dan mulai mencari tahu lebih jauh isu kekerasan seksual terutama dalam konteks pesantren, ada beberapa pertanyaan di pikiran saya “Apa *iyu* ada banyak kasus kekerasan seksual di pesantren?”, “Apa *sih* motif yang membuat oknum atau pelaku melakukan hal itu?”, “Yakin *nih* kita bisa masuk ke pesantren membawa isu ini?” Pertanyaan-pertanyaan itu sering bermunculan dan membuat saya merasa tidak yakin akan berhasil mendapatkan data sesuai harapan.

Untuk menyusun instrumen penelitian ini kami memerlukan waktu yang cukup panjang, dan menguras tenaga juga emosi. Ada saat di mana kami merasa buntu karena kesulitan menemukan kata-kata yang “pas”—yakni sesuai dengan bahasa yang digunakan di lingkungan pesantren, tidak terlalu “berat” agar mudah dipahami oleh santri, terutama mereka yang tinggal di wilayah pedalaman. Akan tetapi, juga tidak terlalu “gamblang” dalam artian tidak menyebutkan secara eksplisit isu-isu seperti kekerasan seksual.

Di sinilah letak dilema seorang peneliti. Satu sisi, kami ingin menggali isu yang dianggap “sensitif”. Di sisi lain, kami harus menggunakan bahasa yang “terselubung”—dalam pengertian tidak vulgar. Risikonya, makna atau pertanyaan yang ingin kami telusuri bisa jadi hanya tersampaikan di permukaan, tidak menyentuh inti persoalan secara mendalam.

Selain itu, kami menggunakan teknik *projective question*, yaitu teknik di mana kami menanyakan pengalaman kekerasan seksual responden dengan menggunakan pengandaian

jika pengalaman tersebut terjadi pada orang lain/di sekitarnya. Teknik ini bertujuan agar para santri lebih mudah dan nyaman saat menjawab pertanyaan yang mungkin dirasa sangat sensitif. Contohnya pertanyaan yang berhubungan dengan bagian tubuh, kami menyiapkan satu lembar berisikan ilustrasi tubuh manusia laki-laki dan perempuan. Ketika menjawab pertanyaan mereka hanya perlu memberikan tanda pada gambar yang telah tersedia. Cara ini cukup efektif untuk tetap menjaga kenyamanan responden dalam menjawab pertanyaan peneliti.

Pemicu Trauma Sekunder Para Peneliti

Salah satu tanda jika seseorang mengalami *secondary trauma* adalah ketika ia merasa tidak nyaman membahas kasus-kasus kekerasan. Ketika tim peneliti mulai mendiskusikan kasus-kasus kekerasan seksual, terutama yang terjadi di lingkungan pesantren, salah satu peneliti mulai merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Dalam proses penyusunan desain penelitian, tim melakukan tinjauan pustaka dan mengumpulkan berita-berita terkait kasus kekerasan seksual di pesantren dari tahun 2023 ke belakang.

Salah satu dari peneliti adalah seorang ibu yang memiliki anak perempuan, yang secara tidak langsung merasa terlibat secara emosional dan ikut membayangkan apabila hal tersebut terjadi kepada anaknya. Ia sampai tidak berani untuk membaca hasil putusan pengadilan kasus kekerasan seksual di pesantren yang saat itu sedang hangat diperbincangkan. Ia seketika mengalami kecemasan dan serangan panik, tangannya pun bergetar, tubuhnya merasa dingin tiba-tiba, bulu-bulu halus di lengan pun berdiri, bahkan ia sampai mengalami kesulitan untuk tidur. Setiap ia harus mempresentasikan hasil temuan penelitian di depan orang banyak dalam berbagai kegiatan, serangan panik, gemetar, masih kerap kali muncul.

Pengalaman tidak menyenangkan ini tidak hanya dialami oleh satu orang peneliti. Ketika kami mengunjungi pesantren dan beberapa lembaga di wilayah yang telah ditentukan, beberapa anggota tim juga mengalami situasi yang cukup mengganggu.

Salah satunya terjadi ketika seorang peneliti yang bertugas mengambil data di wilayah Jawa melakukan wawancara dengan seorang narasumber. Selama proses wawancara, peneliti merasa sangat tidak nyaman dan terkejut mendengar pernyataan narasumber yang dinilai kurang sensitif serta tidak menunjukkan keberpihakan terhadap korban. Bahkan, narasumber beberapa kali mengeluarkan candaan yang bernada seksual. Saat itu juga, peneliti merasa ingin segera mengakhiri wawancara. Namun, ia tetap berusaha menahan diri dan mengelola emosinya agar proses wawancara dapat diselesaikan dengan baik.

Sesaat setelah selesai wawancara, ia langsung menghubungi saya melalui pesan teks dan suara, ia menceritakan kejadian tersebut dan terdengar dari suaranya yang sedikit berat sampai ingin menangis. Padahal setelah itu, ia harus lanjut menemui narasumber lain lagi, agar emosinya kembali netral ia perlu mengeluarkan perasaannya. Saat dihubungi olehnya, *sontak* saya pun ikut kaget mendengar hal yang baru saja ia alami. Saya berusaha untuk menenangkan dirinya, memberikan waktu agar ia meluapkan semua emosi yang ia rasakan. Ketika sudah tenang, saya pastikan bagaimana keadaannya, dan memintanya untuk istirahat makan sebelum melanjutkan wawancara ke narasumber selanjutnya. Langkah pertama yang perlu dilakukan ketika seseorang mengalami “serangan”, beri ia waktu untuk menenangkan diri. Kedua dengarkan cerita darinya tanpa perlu memberikan intervensi apa pun. Setelah itu, menanyakan apa yang dia butuhkan. Terkadang seseorang hanya perlu didengarkan, dan diberikan validasi atas apa yang dia rasakan.

Bahkan ketika saya menanyakan kembali kejadian tersebut lebih dari enam bulan setelahnya, ia masih merasa sangat tidak nyaman. Gerak tubuhnya menunjukkan keengganan untuk mengingat kembali peristiwa itu. Pengalaman tersebut meninggalkan bekas luka, sebuah memori yang kemungkinan besar akan terus melekat dalam ingatannya.

Kemudian, saat kami memasuki tahap pengolahan data lapangan dari penelitian kuantitatif (survei nasional), terdapat pertanyaan terbuka yang menanyakan apakah responden—dalam hal ini para santri—pernah melihat atau mengalami kekerasan seksual. Hasilnya sungguh mengejutkan. Di luar ekspektasi, bahkan semua peneliti terkejut saat membaca jawaban-jawaban yang diisi oleh para santri. Kami menemukan respons yang tidak lazim dan tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Rasa empati yang mendalam berubah menjadi kesedihan yang menyelimuti. Salah satu peneliti bahkan teringat masa-masa ketika menjadi santri, membayangkan kembali kondisi pesantren tempat ia pernah belajar. Perlahan, memori lama pun tergali ke permukaan. Emosi yang muncul saat itu sempat mengubah cara pandangnya dari yang semula objektif menjadi lebih subjektif.

Hingga saat ini pun, pengalaman yang ia rasakan, ataupun yang dialami oleh teman dekatnya terkadang kembali muncul. Marah, sedih, kalut, lebih dari satu emosi yang dirasakan bersatu dalam waktu yang sama. Tentu ini bukan hal yang mudah. Baginya, ini seperti membuka luka lama yang sudah tertutup.

Selanjutnya, peneliti lain yang bertugas di wilayah Nusa Tenggara kaget dengan informasi yang didapatkan saat mewawancara narasumber. Ternyata banyak sekali kasus kekerasan seksual dengan berbagai modus. Saya sendiri, yang mendengar ulang cerita itu dari rekan peneliti, mengalami gejolak emosional yang sulit dijelaskan. Rasanya seperti ditarik masuk ke dalam realitas yang begitu gelap—membayangkan

bagaimana seseorang bisa merasa begitu terjebak dalam situasi berbahaya tanpa menyadarinya, dan lebih menaikkan lagi, saat pelakunya justru adalah sosok yang seharusnya menjadi pelindung dan panutan.

Di hari lain, peneliti menemui narasumber dari salah satu lembaga yang memberikan pendampingan bagi korban kekerasan seksual. Di luar rencana, ia menyaksikan langsung kedatangan seorang korban yang baru saja tiba. Hanya berjarak beberapa meter, ia melihat raut wajah yang tertunduk, langkah kaki yang pelan, dan tubuh yang nyaris tanpa daya. Meskipun tidak mengetahui detail kasusnya, pemandangan tersebut membekas kuat. Peneliti merasakan emosi yang bercampur antara empati, keingintahuan, dan dorongan untuk mendekati langsung korban. Namun, di sisi lain, muncul perasaan bersalah dan dibenturkan dengan pertimbangan etis: apakah ini bentuk kepedulian atau justru hilangnya empati? Ia pun memilih menahan keinginan tersebut. Pengalaman ini menjadi titik awal kesadarannya akan beban emosional yang muncul secara tidak langsung.

Selain bertugas di Nusa Tenggara, peneliti juga bertugas ke Kalimantan. Ini adalah kali pertama menjelaskan kaki di Kalimantan, terlebih lokasi yang didatangi bukanlah perkotaan, melainkan di sebuah desa yang cukup terpencil atau pelosok. Sejauh jauh hari sebelum berangkat, muncul perasaan cemas yang terus membebani pikirannya. Beberapa pertanyaan muncul di pikirannya, “bagaimana karakter pesantren di Kalimantan?”; “apakah akan terjadi penolakan seperti di pesantren lain?” Keraguan ini diperkuat oleh informasi awal yang ia terima, yang mengarah pada potensi penolakan pesantren. Bahkan hingga satu minggu sebelum keberangkatan, belum ada kepastian dari pesantren. Tiket sudah dipesan, tetapi konfirmasi baru diberikan dua hari sebelum keberangkatan. Sebuah ketidakpastian yang penuh ketegangan.

Setibanya di lokasi, peneliti langsung berkesempatan bertemu dengan kiai. Ia membangun pendekatan dengan menggunakan bahasa dan identitas yang akrab di lingkungan pesantren, seperti menyebut dirinya sebagai “alumni pesantren,” dan berasal dari kampus Islam, UIN. Peneliti juga mengikuti ziarah ke makam pimpinan pesantren terdahulu sebagai bagian dari strategi membangun kedekatan. Pendekatan ini perlakan membuka pintu kepercayaan, hingga pihak pesantren merasa cukup nyaman untuk berbagi cerita. Peneliti memahami bahwa sikap hati-hati dari pihak pesantren sangat wajar. Ada kekhawatiran terhadap pihak luar yang tiba-tiba datang dan ingin mengetahui hal-hal sensitif. Akhirnya perasaan waswas yang menyertainya pun perlakan hilang.

**Pengalaman ini
bisa terjadi di
mana, kapan
saja, dan
bahkan kepada
siapa saja.**

Beberapa cerita di atas menggambarkan pengalaman tidak menyenangkan bagi para peneliti. Pengalaman negatif ini meninggalkan jejak yang mendalam dalam ingatan—dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan menimpa siapa saja. Tentu, kemudahan dalam menjalani ini semua didukung oleh kerja tim yang baik.

Kami juga sangat bersyukur dipimpin oleh seorang koordinator yang tidak hanya memperhatikan kondisi fisik dan mental setiap anggota tim, tetapi juga peka terhadap potensi trauma sekunder yang mungkin muncul selama proses penelitian. Tidak jarang, ia menanyakan kabar kami—apakah sedang merasa terbebani secara emosional maupun profesional, bagaimana perasaan kami setelah terlibat dalam kegiatan lapangan—and memberikan kelonggaran waktu agar tim tidak terlalu tertekan dalam menyelesaikan tugas. Perhatian seperti ini mungkin tampak sederhana, tetapi sangat berarti

bagi kami, terutama ketika harus menghadapi cerita-cerita yang berat secara emosional. Dukungan internal dari sesama anggota tim pun memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental dan mencegah kelelahan emosional akibat paparan berulang terhadap pengalaman traumatis orang lain.

PENUTUP

 Windy Triana

Dibuang sayang!

Inilah yang ada di benak kami ketika kami selesai melakukan penelitian. Di sela-sela diskusi bahkan obrolan santai setelah makan siang, kami saling bercerita tentang apa yang kami temukan di lapangan. Cerita-cerita yang tidak mungkin masuk ke dalam laporan. Baik karena bisa menjadikan laporan terlalu panjang, tidak fokus, dan “ke mana-mana.” Tetapi kami merasa cerita-cerita ini unik, dalam konteks penelitian. Kami merasa ini perlu diceritakan sebagai refleksi metodologis untuk menunjukkan bahwa penelitian bukan hanya sekedar proses yang terencana, tetapi juga melibatkan sisi kemanusiaan kami, setiap peneliti. Di balik metode, instrumen dan data, ada perasaan, kegagaman, kejutan bahkan kelelahan emosional.

Masuk ke wilayah pesantren untuk penelitian yang sensitif bukan hal yang mudah. Ada tantangan resistensi dan ancaman penolakan. Tetapi kami belajar, bahwa dengan pendekatan yang tepat, hati-hati, sinergi dengan berbagai pihak, dialog bersama tokoh-tokoh di pesantren, penelitian ini menjadi mungkin. Pendekatan ini bukan hanya sekedar strategi komunikasi, tetapi juga tentang ketulusan niat, membangun kepercayaan, dan menghormati kultur dan norma pesantren. Ada hal yang akhirnya kami sadari menjadi kunci untuk membuka ruang tertutup, yaitu kesabaran dan empati.

Menjadi bagian dari pesantren dan peneliti di saat yang sama merupakan tantangan bagi kami. Namun, ini juga kekuatan kami untuk dapat lebih memahami pesantren

dari dalam; untuk dapat lebih berempati dan menghormati budaya pesantren tanpa prasangka. Kami datang bukan hanya sebagai pengumpul data, tetapi pembelajar yang menyadari betul kompleksitas dari isu yang kami teliti.

Kami mengungkapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah menjadikan penelitian ini mungkin, terutama pada pihak pesantren dan santri yang bersedia berbagi cerita. Buat kami, ini adalah penelitian yang membutuhkan keberanian, bukan hanya keberanian menggali, tetapi juga merasakan, menghadapi dan menyuarakan. Kekhawatiran kami akan penolakan, resistensi atau bahkan potensi kegagalan ternyata tidak sepenuhnya terbukti. Kami menemukan ruang dialog terbuka, keramahan untuk menuju perubahan. Keberhasilan penelitian menjadikan kami optimis bahwa Pesantren Ramah Anak dapat menjadi cita-cita yang mungkin dan layak diperjuangkan bersama.

BIOGRAFI PENULIS

❸ Windy Triana

Windy adalah peneliti di PPIM UIN Jakarta dan dosen di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan Doktoralnya di School of Law, University of Melbourne, Australia, setelah sebelumnya menyelesaikan Magister di bidang Interdisciplinary Islamic Studies di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pendidikan S1 juga ditempuh pada universitas yang sama di Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2004.

❸ Haula Noor

Haula adalah peneliti di PPIM UIN Jakarta dan juga dosen di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Depok. Ia memulai pendidikannya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk jenjang Sarjana dan Magisternya. Kemudian melanjutkan pendidikan doktoralnya ke Department of Political and Social Change di Australian National University (ANU), Canberra, Australia.

❸ Narila Mutia Nasir

Narila adalah peneliti di PPIM UIN Jakarta dan dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan doktoral di Graduate School of Human Sciences, Osaka University, Jepang pada tahun 2013, setelah sebelumnya menempuh pendidikan magister dan sarjana di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.

 **Aptiani Nur Jannah**

Aptiani adalah peneliti di PPIM UIN Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan magister pada jurusan Hubungan Internasional di Australian National University (ANU) pada tahun 2018 setelah sebelumnya menyelesaikan pendidikan sarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada jurusan yang sama di tahun 2015.

 **Savran Billahi**

Savran adalah peneliti di PPIM UIN Jakarta dan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menempuh pendidikan magister pada Departemen Sejarah di Hacettepe University Ankara, Turki setelah sebelumnya menyelesaikan pendidikan sarjana Jurusan Sejarah di Universitas Indonesia. Mengambil pendidikan magister kedua di Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

 **Grace Sandra Pramesty Rachmanda**

Grace adalah peneliti di PPIM UIN Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan strata-1 di Fakultas Psikologi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2017.

 **Dedy Ibmar**

Dedy adalah peneliti di PPIM UIN Jakarta dan dosen di Fakultas Ushuluddin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan magisternya pada jurusan Filsafat Modern di Ural Federal University Russia pada tahun 2023. Sebelumnya, ia menyelesaikan pendidikan sarjana pada jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019.

 **Citra Dwikasari**

Citra menyelesaikan pendidikan magister pada jurusan Hubungan Internasional di Universitas Paramadina pada tahun 2024 setelah sebelumnya menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada jurusan yang sama di tahun 2021.

MENJAGA MARWAH PESANTREN

REFLEKSI PENELITIAN KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN

Menjaga Marwah Pesantren adalah kumpulan refleksi mendalam dari perjalanan para peneliti melakukan studi sensitif tentang kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Ditulis oleh para peneliti yang sebagian besar merupakan alumni pesantren, buku ini menghadirkan pengertahan yang berdasar pada pengalaman langsung, menggambarkan kompleksitas relasi antara emosi, etika, dan institusi keagamaan dengan cara yang jujur dan autentik. Melalui narasi reflektif para peneliti, buku ini berupaya menawarkan perspektif yang seimbang menengai apa yang terjadi di pesantren sebagai bagian dari kerentanan institusi, dengan juga mengakui bahwa pesantren memiliki potensi ketahanan yang cukup baik. Karya ini tidak hanya memainkan perannya dalam mendiseminasi konsep pesantren ramah anak dalam ranah perlindungan anak, tetapi juga menjadi panduan praktis bagi siapa pun yang melakukan penelitian sensitif di masyarakat.



ISBN 978-623-8552-37-5

9 786238 552375

